

KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN



Indardi

**KOMUNIKASI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

UNPAD PRESS

Tim Pengarah

Ganjar Kurnia
Mahfud Arifin, Engkus Kuswarno
Memed Sueb

Tim Editor

Wilson Nadeak (Koordinator), Tuhpawana P. Sendjaja
Fatimah Djajasudarma, Benito A. Kurnani
Denie Hariyadi, Wahya, Cece Sobarna
Dian Indira

Judul : *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*
Penulis : Indardi
Layout : Trisatya
Cetakan 1 : Oktober 2010
Cetakan 2 : Desember 2016

UNPAD PRESS
Copyright @ 2010
ISBN : 978-979-3985-96-1

PENGANTAR

Puji syukur diucapkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang saat ini telah berada di hadapan pembaca. Pada akhir-akhir masa Orde Baru istilah pemberdayaan masyarakat menjadi sangat populer. Memasuki era reformasi dan otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi pembangunan yang berdimensi kerakyatan semakin banyak diterapkan di tingkat kabupaten/kota. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menekankan pentingnya partisipasi semua lapisan masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan pada berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Komunikasi menjadi unsur penting dalam proses pembangunan khususnya melalui strategi pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengingatkan bahwa intensitas komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat relatif lebih tinggi dari pada dalam strategi pembangunan lainnya. Menariknya lagi, kajian pemberdayaan masyarakat dari aspek komunikasinya belum banyak dilakukan. Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengungkap berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pemberdayaan masyarakat dari aspek komunikasi.

Buku ini dapat disusun atas bantuan hibah penelitian dari Direktur Jendral Perguruan Tinggi yang penulis terima terkait dengan penyelesaian disertasi untuk program doktor di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Buku ini dapat disusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, yang pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan mulai dari awal, proses penyusunan, sampai selesainya buku ini. Pertama, kepada pihak DP2M Direktur Jendral Perguruan Tinggi Depdiknas atas bantuan biaya hibah penelitian sehingga penulis

dapat menyusun buku yang hadir ke hadapan pembaca. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kesempatan untuk bisa belajar dalam meraih gelar doctor, dan kesempatan mendapat hibah penelitian sehingga salah satunya menghasilkan buku ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan Program Pascasarjana yang telah memberikan kesempatan belajar, memperoleh bantuan hibah penelitian, dan pembuatan buku ini. Terakhir ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para promotor yaitu Prof.Dr.Ir.HMI Hasansulama, Prof.Dr.Hj.Mien Hidayat, Dra.,MS dan Prof. Dr.H. Engkus Kuswarno, Drs, MS. atas motivasi dan bimbingannya baik dalam menyelesaikan kuliah, menyelesaikan disertasi serta penulisan buku ini..

Bandung, Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
GLOSARI	xii
BAB I.....	1
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN	
MASYARAKAT.....	1
A. Konsep dan Teori Pembangunan.....	2
1. Pertumbuhan (<i>growth</i>)	5
2. Rekonstruksi	7
3. Modernisasi.....	7
4. Westernisasi.....	8
5. Perubahan sosial	8
6. Pembebasan	9
7. Pembaharuan.....	9
8. Pembangunan bangsa.....	10
9. Pembangunan nasional	10
10. Pengembangan.....	11
11. Pembinaan.....	11
12. Pembangunan.....	12
13. Pembangunan nasional (Indonesia)	13
B. Kritik Terhadap Teori Pembangunan	14
C. Pembangunan Berorientasi Masyarakat	23
D. Pemberdayaan Masyarakat	35
BAB II	42
DASAR DASAR KOMUNIKASI.....	42
A. Pengertian Komunikasi.....	43
B. Unsur dan Proses	45
1. Unsur Komunikasi	48

C. Klasifikasi Komunikasi	55
1. Klasifikasi Komunikasi Berdasar Jumlah Orang yang Terlibat	55
2. Klasifikasi Komunikasi Berdasarkan Penggunaan Media	60
3. Klasifikasi Komunikasi Berdasarkan Kecepatan Pesan Diterima	60
4. Klasifikasi Komunikasi Berdasarkan Saluran (Indera Penerima)	61
5. Klasifikasi Komunikasi Berdasarkan arah pesan.....	62
6. Klasifikasi Komunikasi Berdasarkan Kode yang Digunakan	64
7. Klasifikasi Komunikasi Berdasarkan Bidang Kajian.....	66
D. Model Komunikasi	66
1. Fungsi Model	67
2. Mengenal Beberapa Model Komunikasi	67
E. Komunikasi Efektif.....	74
F. Perspektif Komunikasi	76
BAB III.....	78
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	78
A. Konsep Komunikasi Pembangunan.....	79
B. Perspektif Komunikasi Pembangunan.....	86
1. Komunikasi Pembangunan dalam Perspektif Keilmuan.....	86
2. Komunikasi Pembangunan dalam Perspektif Kebijakan di Indonesia	96
C. Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat	106
BAB IV.....	115

REALITAS KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN	
MASYARAKAT.....	115
A. Kegiatan Kelompok Pemberdayaan	117
B. Pemaknaan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	126
C. Proses Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	136
D. Keberhasilan dalam Pemberdayaan Masyarakat	142
DAFTAR PUSTAKA	152
INDEKS	158

GLOSARI

***Kelompok
Pemberdayaan***

Adalah kumpulan orang-orang dalam suatu kelompok social (seperti kelompok tani) yang terlibat dalam kegiatan produktif bersama yang dilaksanakan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Komunikasi

Proses penyampaian pesan dari pihak satu pada pihak lain, baik sebagai proses linear, interaktif, maupun transaksional.

***Komunikasi
Pembangunan***

Proses penyampaian pesan yang berisi pesan-pesan pembangunan biasanya dimotori pemerintah.

***Komunikasi
Pemberdayaan
Masyarakat***

Proses penyampaian pesan yang terjadi dalam proses ataupun kegiatan pembangunan yang pendekatannya menggunakan pemberdayaan masyarakat

***Konsep dan teori
Pembangunan***

Konsep-konsep yang memiliki makna tertentu dan memiliki kaitan erat dengan konsep pembangunan itu sendiri dan sudah dipandang sebagai suatu teori, yang pernah diterapkan di suatu belahan dunia dengan latar belakang dan kronologisnya yang tersendiri pula.

Pembangunan

Proses perubahan direncanakan menuju kehidupan yang lebih baik dalam berbagai aspeknya.

Pemberdayaan Masyarakat

Suatu pendekatan pembangunan yang berpusat pada pemberian kemampuan dan kebebasan pada masyarakat untuk memutuskan dan bertanggungjawab dalam perbaikan hidupnya.

Realitas Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat

Suatu penelaahan fenomena di lapangan yang dilakukan untuk mengetahui berbagai hal yang terkait dengan berbagai kegiatan komunikasi (seperti pemaknaan pemberdayaan, memahami arti keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat, proses komunikasi dalam kegiatan kelompok yang bersangkutan) dari kelompok pemberdayaan (kelompok tani jamur merang) yang ada di Desa Argorejo, Sedayu, Bantul.

BAB I.
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

A. Konsep dan Teori Pembangunan

Berdasarkan tata bahasa pembangunan berasal dari kata dasar 'bangun' yang memiliki multi arti. Dalam kamus John M. Echols dan Hassan Shadily (1994) edisi Kamus Indonesia-Inggris, kata 'bangun' bisa berarti: *wake up, get up, rise, structure/form*, dan *type/model*. Ketika mendapat awalan *me* (membangun) diartikan *build/construct/pay, develop, rise*. Jika mendapatkan awalan *pe-* (pembangun) berarti pelaku seperti: *builder, constructor*; dan apabila mendapatkan awalan-akhiran 'pem-an' (pembangunan) berarti *reconstruction, development*. Kamus John M. Echols dan Hassan Shadily (1984) edisi Inggris-Indonesia *develop* berarti memperkembangkan, menghasilkan, mencuci, memperkuat, membangun. *Developer* berarti pelakunya, yakni pembangun (ahli bangunan). *Development* : perkembangan, pembangunan, pertumbuhan.

Secara etimologik, setidaknya ada empat makna yang terkandung dalam kata 'bangun' (Ndraha, 1990:1). Pertama, bangun dalam arti sadar atau siuman, kedua dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga bangun dalam arti bentuk dan keempat, bangun berarti kata kerja 'membuat/mendirikan atau membina'.

Istilah pembangunan selanjutnya banyak diidentikkan dengan *development*. Terkait sejauhmana suatu negara telah maju dalam kegiatan pembangunan, muncul dikotomi dengan sebutan *negara maju*, negara modern yang kebanyakan merupakan negara-negara di benua Eropa, Amerika dan Australia di satu sisi, dan *negara berkembang*, dunia ketiga, negara-negara miskin, yang kebanyakan berada di benua Afrika dan Asia di sisi lain. Selanjutnya untuk penghalusan bahasa, negara-negara maju disebutnya sebagai negara yang sudah berkembang (*developed countries*), dan negara-negara miskin disebutnya sebagai negara yang sedang berkembang (*developing countries*).

Semula diyakini oleh banyak ahli bahwa dikotomi antara negara maju dengan negara berkembang, pangkal

persoalannya adalah persoalan ekonomi. Muncullah berbagai teori pembangunan yang menekankan pemecahan masalah ekonomi. Kecenderungan pemikiran tersebut terlihat dari pemikiran awal mengenai pembangunan, seperti teori Harrod Domar, Arthur Lewis, WW Rostow, Hirschman, Rosenstein Rodan, Nurkse, Leibenstein (Mudrajat Kuncoro, 2006: 9).

Namun negara-negara berkembang mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi (melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan) tidak mengatasi tetapi justru dibarengi dengan masalah pengangguran, kemiskinan di pedesaan, ketidakseimbangan struktural dan distribusi pendapatan yang timpang. Ini terjadi di akhir dasa warsa 60-an.

Sehingga paradigma baru mengenai pembangunan mulai bermunculan. Everett M. Rogers (1976:2) mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan yang berguna menuju suatu system social dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Myrdal (Mudrajat Kuncoro 2006: 11) misalnya, mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (*growth with change*), terutama perubahan nilai dan kelembagaan.

Berbagai pengertian pembangunan, juga diungkapkan oleh Moelyadi Banoewidjojo, Saul M. Katz, serta Irma & Cynthia (Slamet Ryadi, 1981: 10-13). Menurut Moelyadi Banoewidjojo *development* atau pembangunan adalah kemajuan; halmana untuk mencapainya harus dilakukan perubahan-perubahan dan pertumbuhan yang terus-menerus. Kemajuan dicapai melalui perubahan-perubahan sosial atau struktur sosial maupun pertumbuhan ekonomi yang dipercepat. Kemajuan hendaknya memiliki dimensi kesinambungan (*sustainable*) dan arah perkembangan yang jelas (teratur dan terarah). Saul M. Katz berpandangan terhadap pokok-pokok pembangunan, ia menekankan pentingnya adanya perubahan-perubahan di masyarakat. Proses perubahan yang dinamis

perlu didukung oleh kekuatan pembaharuan yang timbul dan bergerak dalam masyarakat itu sendiri. Kekuatan pembangunan juga termasuk potensi masyarakat melalui peran-sertanya yang mampu dibangkitkan secara wajar (oleh pemerintah) hingga membudaya. Irma dan Cynthia berpandangan, bahwa hakikat pembangunan merupakan perubahan-perubahan sosial yang besar dan oleh karena itu tumbuh dan berkembangnya harus dilakukan secara bertahap untuk menghindari ekses-ekses yang dapat merugikan proses pembangunan itu sendiri pada tahap rintisananya.

Pemahaman akhir pembangunan (paradigma baru) apa yang disebut pembangunan berpusat pada rakyat. Ginanjar Kartasasmita (1996:133) menyebutnya pemberdayaan masyarakat, yang dipandang sebagai strategi pembangunan yang berakar kerakyatan. Ada yang menyebut konsep pembangunan model partisipasif, yakni pandangan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat, yang beradaptasi dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik(Sumadi Dilla,2007:104). Paradigma ini melihat hakekat pembangunan dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaran pembangun yang hendak dicapai harus melibatkan masyarakat banyak dan akhirnya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat pula.

Sebelum jauh mengkaji pemberdayaan masyarakat, dirasa perlu mengenal berbagai konsep/teori yang terkait dengan kegiatan pembangunan yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang dengan pendekatannya masing-masing sesuai situasi dan kondisi suatu negara., seperti berikut ini:

Konsep/Teori	Pendekatan	Ditujukan pada
1. Pertumbuhan (<i>Growth</i>)	ekonomi	negara-negara pada umumnya
2. Rekonstruksi	pemulihan ekonomi	Eropa(negara yg

(<i>Reconstruction</i>)		terlibat PD II)
3. Modernisasi (<i>Modernization</i>)	teknologi dan ilmu pengetahuan	terutama dunia ketiga
4. Westernisasi (<i>Westernization</i>)	kebudayaan dan iptek sosial	terutama dunia ketiga sebelah timur
5. Perubahan sosial (<i>Social change</i>)	sosial	terutama dunia ketiga
6. Pembebasan (<i>Liberation</i>)	ekonomi-politik	terutama Amerika Latin
7. Pembaharuan (<i>Innovation</i>)	iptek, kemudian sosial-politik	terutama dunia ketiga
8. Pembangunan bangsa (<i>Nation building</i>)	politik	terutama negara baru merdeka
9. Pembangunan nasional (<i>National development</i>)	politik	terutama negara baru merdeka
10. Pengembangan	politik	Indonesia
11. Pembinaan	politik	Indonesia
12. Pembangunan	eklektik	Dunia ketiga

Sumber: Ndraha, 1990

1. Pertumbuhan (*growth*)

Pertumbuhan (*growth*) adalah konsep ekonomi, dikaji dalam disiplin ilmu Ekonomi Pembangunan. Konsep ini melihat proses pembangunan lebih didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, yakni kenaikan pendapatan nasional nyata dalam jangka waktu tertentu. Teori ini dibedakan menjadi teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori neo klasik. Kebanyakan teori pertumbuhan ekonomi klasik, dikemukakan sebelum para ahli ekonomi mulai tertarik pada masalah pembangunan di negara-negara berkembang. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi neo klasik mulai dikemukakan pada

tahun 1950-an, hampir bersamaan dengan berkembangnya perhatian ahli-ahli ekonomi pada masalah pembangunan di negara-negara berkembang (Sadono Sukirno, 1985). Tokoh-tokoh yang termasuk dalam golongan pertama adalah Adam Smith, David Ricardo, Robert Maltus, John Stuart Mill, Schumpeter, dan Harrod Domar dan lain-lain. Tokoh neo klasik antara lain adalah RM Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan JE Meade. Termasuk juga WW Rostow, dengan tulisannya yang berjudul “*The Take-Off Into Self Sustained Growth*” dalam *Economic Journal* Edisi Maret 1956. Pemikiran dan pandangan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh neo klasik didasarkan pada pemikiran-pemikiran sebelumnya (teori-teori pertumbuhan ekonomi klasik).

Adam Smith merupakan pelopor perkembangan ilmu ekonomi dan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan pentingnya kebijakan *laissez-faire*. Menurutnya, *laissez-faire* (sistem mekanisme pasar) akan memaksimalkan pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat.

Sebuah teori pertumbuhan pada masa neo klasik yang sangat terkenal adalah yang disampaikan oleh Rostow, yang disebutnya sebagai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi (*The stage of economic growth*). Disebutkan ada 5 tahap utama pertumbuhan, yakni tahap masyarakat tradisional, tahap transisional, tahap tinggal landas, tahap pematangan atau tahap pendewasaan, dan tahap konsumsi massa tinggi.

Kecepatan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh berbagai faktor. Menurut M. Todaro (Ndraha,1990: 3), ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu pembangunan ekonomi negara-negara dunia ketiga, yakni: akumulasi modal, perkembangan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi.

2. Rekonstruksi

Rekonstruksi dimaksudkan sebagai upaya membangun kembali perekonomian suatu negara. Konsep ini merupakan upaya pembangunan untuk pemulihan ekonomi negara-negara sekutu yang terlibat perang dunia kedua, terutama untuk negara-negara yang kalah perang seperti Jerman Barat dan Italia. Salah satu program rekonstruksi yang terkenal adalah Rencana Marshall. Jenderal GC Marshall adalah ketua gabungan kepala-kepala staf Amerika Serikat dalam perang dunia kedua, kemudian diangkat menjadi menteri luar negeri di tahun 1947-1949. Ia berpendapat bahwa kemiskinan dan kekacauan ekonomi di berbagai negara Eropa akibat perang, merupakan bahaya bagi stabilitas politik di negara-negara tersebut. Kedaulatan ekonomi yang kurang baik, merupakan lahan subur bagi dan dapat mengundang bahaya komunisme.

3. Modernisasi

Modernisasi merupakan proses penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas, semua bidang kehidupan, atau semua aspek-aspek masyarakat (JW. Schoorl, dalam Ndraha 1990: 4-5). Modernisasi merupakan konsep populer yang berawal dari salah satu bentuk perubahan sosial yang berasal dari revolusi industri di Inggris tahun 1760-1830 dan revolusi politik di Perancis di tahun 1789-1794. Aspek yang paling menonjol dalam proses modernisasi adalah perubahan teknik industri dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern yang dihasilkan oleh revolusi industri. Penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi ciri yang menonjol seperti diketemukannya mesin uap oleh James Watt di tahun 1769. Dalam perjalanannya proses modernisasi akhirnya terjadi di mana-mana, baik di negara maju maupun negara berkembang. Modernitas diukur dengan sejauhmana suatu bangsa menerapkan iptek tersebut.

4. Westernisasi

Westernisasi berarti penempatan suatu unsur budaya setempat (indigenous) oleh barat, termasuk peran fungsionalnya (Hideo Kishimoto dalam Garna, 2006: 142). Contohnya seperti penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi dalam berbagai lingkaran kehidupan. Penggunaan istilah westernisasi ada konotasi makna yang kurang bisa diterima, khususnya pada negara-negara timur (negara dunia ketiga). Semula ada paradigma bahwa kegiatan modernisasi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang adalah dalam upaya peningkatan taraf hidup untuk menandingi dengan apa yang terjadi di negara-negara barat, sehingga diharapkan memiliki taraf hidup yang hampir sama. Dalam proses modernisasi tersebut mau tidak mau pertumbuhan kebudayaan duniapun akan memiliki ciri-ciri negara Barat, sehingga istilah westernisasi hanyalah dikenakan pada dunia non-barat (pada abad kedua puluh ini).

5. Perubahan sosial

Menurut Selosoemardjan (Soekanto, 1990: 337) perubahan sosial, adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga (*institutions*) kemasyarakatan di suatu masyarakat. Sedangkan Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat (Soekanto, 1990: 336). Perubahan bisa bersifat evolusioner, revolusioner, dialektikal, peribahan yang dipaksakan dan perubahan terkendali.

Perubahan sosial memiliki kaitan yang erat dengan modernisasi. Modernisasi akan memerlukan perubahan sosial. Permasalahannya adalah bagaimana modernisasi tidak terhambat oleh hal-hal atau faktor-faktor yang merintangai perubahan sosial. Menurut Daniel Lerner (Ndraha, 1990:8), setidaknya ada empat faktor yang mendorong perubahan sosial sekaligus sebagai indikator modernitas, yakni: urbanisasi, kemampuan baca dan tulis, partisipasi media, dan *emphaty*.

6. Pembebasan

Paham ini memandang bahwa konsep pembebasan lebih tepat dari konsep pembangunan dengan dua alasan. Pertama, pembangunan terlalu dikaitkan dengan efisiensi yang umumnya dikendalikan oleh kelompok elit yang biasanya menguasai teknologi, sementara sebagian besar masyarakat (miskin dan terbelakang pemikirannya) terabaikan dan tidak dapat berperan di dalamnya. Kedua, pembangunan menolak kekerasan sebagai suatu hal yang tidak konstruktif dan juga menolak untuk mengutuk kekerasan terhadap pola perubahan yang legal. Pandangan ini mengajarkan bahwa pembangunan berarti menilai kembali keadaan setiap kelompok masyarakat dan mengadakan perbaikan kualitatif. Pembangunan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk memanusiaikan manusia. Paham ini disebut juga Mazhab Perancis (*French School*), yang diilhami oleh nilai-nilai teologis-etis, sehingga disebut juga paham teologi pembebasan (*theology of liberation*).

Paham ini diminati untuk perubahan-perubahan sosial seperti yang terjadi di Cina, Kuba dan Tanzania. Cina berhasil membebaskan rakyatnya dari kelaparan massal dan berhasil menghapuskan sistem feodal. Kuba berhasil membebaskan diri dari dominasi Amerika Serikat, dan berusaha mandiri. Tanzania berhasil membebaskan rakyatnya dari buta huruf, dan hati-hati dalam menerima bantuan dari luar negeri.

7. Pembaharuan

Istilah ini memiliki kaitan dengan modernisasi dan perubahan sosial. Pembaharuan salah satu bentuk proses sosial. Pembaharuan terjadi karena penemuan-penemuan ilmiah. Demikian juga, modernisasi terjadi karena penggunaan berbagai inovasi tersebut. Pembaharuan dan perubahan sosial merupakan konsekuensi logis dari proses sosial di masyarakat, dan keduanya memiliki hubungan timbal balik. Istilah pembaharuan biasa digunakan untuk proses pembangunan di

masyarakat pedesaan yang umumnya masyarakat petani. Orang-orang tertentu yang menggerakkan pembangunan untuk melakukan perubahan biasa disebut agen pembaharu (*change agent*). Agen pembaharu ini biasanya seorang *inovator* maupun *early adopter* yang ada di suatu masyarakat.

8. Pembangunan bangsa

Pembangunan merupakan perubahan sosial yang dikendalikan, yang menyangkut segenap aspek kehidupan bangsa termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi bangsa. Konsep pembangunan bangsa diterapkan pada negara yang baru merdeka, atau persiapan menuju kemerdekaan, negara yang masih labil, negara yang terdiri dari aneka ragam kebudayaan (Ndraha, 1990:11). Pembangunan bangsa lebih ditujukan pada upaya pemantapan dan peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, berwawasan ideologi, dan pencegahan berbagai perpecahan, konflik, dan disintegrasi baik antar suku, antar agama, antar daerah maupun antar kelompok kepentingan.

9. Pembangunan nasional

Konsep ini berkaitan erat dengan konsep pembangunan bangsa. Menurut Ponsioen (Ndraha, 1990:12), bahwa pembangunan bangsa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara. Konsep pembangunan nasional umumnya digunakan untuk negara-negara dunia ketiga, halmana bangsa tersebut sedang semangat dalam melakukan pembangunan yang multidimensional, yakni meliputi semua segi kehidupan nasional, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pada prakteknya pembangunan nasional ini lebih berorientasi pada pembangunan politik dari pada pembangunan lainnya. Pandangan ini lebih menekankan /mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan lainnya. Semangat nasionalisme menjiwai berbagai aspek pembangunan. Misalnya dalam pembangunan bidang ekonomi, muncul konsep *economic nationalism*. Pembangunan nasional

ini akan berhasil baik bila didukung oleh kemampuan politik (ideologi, sistem politik), kemampuan ekonomi (sumber-sumber pendapatan), dan kondisi sosial (perubahan sosial). Akhirnya pembangunan nasional ini akan mampu menegakkan ketahanan nasional suatu negara yang bersangkutan.

10. Pengembangan

Konsep ini muncul setelah disadari bahwa negara-negara miskin, atau negara-negara dunia ketiga pada hakekatnya tidak miskin dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semula negara-negara dunia ketiga tersebut mendapatkan sebutan sebagai masyarakat primitif (pendekatan antropologi), kemudian berubah menjadi masyarakat sederhana. Seperti halnya sebagai bangsa negara-negara tersebut mendapatkan sebutan *backward countries*, kemudian diubah menjadi *underdeveloped countries* (belum atau kurang maju). Sebutan-sebutan tersebut memiliki konotasi yang kurang baik (negatif). Pada kenyataannya negara-negara dunia ketiga memiliki potensi serta sumber-sumber daya yang melimpah-ruah, disamping kemerdekaan nasional sebagai modal utama. Kelemahan dunia ketiga sesungguhnya hanyalah tertinggal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga *pembangunan atau pengembangan* dibidang tersebutlah sesungguhnya yang dibutuhkan oleh negara dunia ketiga untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju. Akhirnya digunakanlah istilah yang lebih positif untuk sebutan negara dunia ketiga, yakni disebut sebagai *developing countries* atau negara (yang sedang) berkembang.

11. Pembinaan

Konsep ini ditujukan untuk pelurusan terhadap ajaran-ajaran kelompok masyarakat yang keliru. Hal ini terutama didukung dengan operasi militer sebagai upaya rehabilitasi dan pemulihan ketertiban umum. Di Indonesia konsep pembinaan muncul ketika pemerintah berupaya menghancurkan sisa-sisa

G 30 S PKI pada tahun 1965. Pemerintah berusaha meluruskan pola pikir dan pola tindak kelompok masyarakat yang sementara menyeleweng dari garis yang telah ditetapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama menyangkut masalah ideologi. Maka dikenallah pembinaan ideologi, yang orientasinya untuk menjelaskan mana yang keliru dan mengajarkan ideologi yang dipandang benar. Pembinaan ideologi ini merupakan bagian dari pembinaan wilayah, yakni suatu pembinaan untuk menyiapkan kondisi wilayah, baik dari unsur penduduk, alam, lingkungan, dan sumber-sumber dayanya untuk menunjang ketahanan nasional

12. Pembangunan

Istilah pembangunan itu sendiri juga berawal dari pendekatan ekonomi. Pembangunan menunjukkan taraf kemampuan ekonomi nasional suatu negara untuk berubah dari tahap awal yang relatif statis menuju peningkatan GNP tahunan secara konsisten sebesar 3 sampai 7 % atau lebih, disertai perubahan struktural di bidang agraria, industri dan jasa, produksi dan lapangan kerja. Sikap hidup semakin rasional dan penerapan teknologi semakin meningkat (Ndraha, 1990:14). Ada beberapa perkembangan yang perlu dicatat terkait dengan konsep pembangunan ini, yakni:

Pertama, berakar dari pandangan Plato (25 abad lalu) bahwa dasar filosofis tentang hakikat negara sebagai wadah bagi setiap warga negara adalah untuk mencapai eudaimonia, yaitu kebahagiaan sejati dan tertinggi. Kedua, pembangunan sebagai bahan studi dianggap bermula dari paham klasik tentang ekonomi politik abad ke delapanbelas. Adam Smith (1723-1790) meletakkan dasar-dasar ekonomi *laissez faire* (ekonomi bebas) dan munculnya abad industri (abad 20), yakni zaman pembangunan sebagai suatu gerakan internasional. Setelah PD II (mampu mengubah profil dunia), namun para ahli ekonomi masih mendominasi sampai tahun 50-an dan 60-an.

Ketiga, bahwa pada dekade 70-an ada perubahan dalam pendekatan pembangunan. Pendekatan baru ini diungkapkan oleh Carolie Bryant dan Louise White (Ndraha, 1990:15-16), bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada 5 implikasi utama definisi ini, yakni: membangkitkan kemampuan (*capacity*), tumbuhnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan (*equity*), mempercayai dan memberi kesempatan memilih dan memutuskan sehingga berdaya (*empowermen*), membangkitkan kemampuan membangun secara mandiri (*sustainability*), dan mengurangi ketergantungan pada negara lain, menciptakan hubungan saling untung dan saling menghormati (*interdependence*).

13. Pembangunan nasional (Indonesia)

Konsep ini tumbuh subur pada masa pemerintahan Orde Baru. Pembangunan di Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Hakekat pembangunannya "pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia". Strategi pembangunannya "trilogi pembangunan. (pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas politik)". Ideologi pembangunan (Pancasila) telah diterjemahkan dalam produk perundang-undangan berupa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Strategi pembangunan (trilogi pembangunan) diterjemahkan dalam produk perundang-undangan dalam wujud GBHN. Berbagai bidang kegiatan pembangunan lima tahunan diatur dalam GBHN tersebut.

Barangkali yang belum diatur dalam bentuk perundang-undangan adalah hakekat pembangunan, yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan manusia seutuhnya memiliki makna yang mendalam. Pembangunan di Indonesia menempatkan manusia memiliki harkat dan martabat yang harus diperjuangkan dan dijunjung tinggi.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, dalam mempelajari pembangunan terjadi proses diferensiasi melalui suatu dominasi ruang lingkup tertentu yang kemudian ada spesifikasi dalam mengkajinya, seperti: *Community development* (pembangunan masyarakat), *Rural development* (pembangunan desa), *Urban development* (pembangunan kota), *Agricultural development* (pembangunan pertanian), *Economic growth* (pertumbuhan ekonomi), *Area development* (pembangunan wilayah) yang melahirkan istilah *growth poles* dan *growth centres*. (Slamet Ryadi 1981:11-12).

B. Kritik Terhadap Teori Pembangunan

Begitu banyak dikenal adanya teori pembangunan, yang masing-masing menonjolkan kelebihanannya dibandingkan dengan teori lain. Di sisi lain melalui sudut pandangnya seorang ahli telah mencoba mengabaikan ataupun kurang memperhatikan cara pandang pihak/pakar yang lain. Sebuah perspektif yang dituangkan dalam suatu teori pembangunan tidaklah sempurna, karena ketika seseorang telah mengambil suatu cara pandang berarti mengutamakan terhadap apa-apa yang mereka anggap penting sesuai dengan cara pandangnya tersebut, dan mengabaikan atau meniadakan atau mereduksi aspek-aspek lainnya yang kurang menjadi perhatiannya.

Setiap teori pembangunan yang digunakan selalu mengandung kelemahan-kelemahan dalam penerapannya, yang seringkali hal ini tidak disadari oleh pemikir yang bersangkutan. Seorang ahli dengan penuh keyakinannya mencoba mengungkapkan teorinya dengan konsep-konsep yang dianggapnya penting dan mereduksi ataupun mengabaikan konsep-konsep lain yang dipandanginya kurang memiliki peran. Hal ini perlu kritik terhadap teori-teori pembangunan tersebut, baik itu muncul dari kesadaran seorang pakar pencetusnya maupun kritik yang dilakukan oleh pakar-pakar yang lain.

Sebagai ilustrasi, dalam sub bab ini akan diungkapkan kritik terhadap beberapa teori pembangunan yang ada.

Teori modernisasi muncul sebagai konsekuensi terhadap fenomena dunia, dimana *teori pembagian kerja secara Internasional* tidak bisa lagi menjelaskan kenapa ada ketimpangan tingkat ekonomi (kekayaan) antara negara-negara utara (negara industri) yang semakin kaya, dan negara-negara katulistiwa (negara pertanian) yang semakin miskin. Teori pembagian kerja secara Internasional menyatakan bahwa setiap negara harus melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keuntungan komparatif yang dimilikinya. Halmana negara-negara di katulistiwa yang tanahnya subur, misalnya, lebih baik melakukan spesialisasi di bidang produksi pertanian. Sedangkan negara-negara di bagian bumi sebelah utara, yang iklimnya tidak cocok untuk pertanian, sebaiknya melakukan kegiatan produksi di bidang industri. Mereka harus mengembangkan teknologi untuk menciptakan keunggulan komparatif bagi negerinya. Karena jika tidak demikian, apabila negara-negara katulistiwa bergerak di bidang industri dan negara-negara belahan bumi utara bekerja di bidang pertanian, maka keduanya memerlukan ongkos produksi yang mahal.

Dengan spesialisasi tersebut, teori pembagian kerja secara internasional tersebut mengungkapkan bahwa terjadilah perdagangan internasional yang saling menguntungkan dari berbagai negara katulistiwa dengan negara-negara belahan bumi utara. Negara-negara katulistiwa akan membeli barang-barang industri lebih murah dari pada memproduksi sendiri, demikian juga negara-negara belahan bumi utara akan membeli barang-barang pertanian yang lebih murah juga dibanding produksi sendiri.

Setelah beberapa puluh tahun kemudian, nampak bahwa negara-negara industri semakin kaya dan negara-negara pertanian semakin tertinggal. Selajutnya muncul pertanyaan mengapa demikian, apa yang menjadi penyebabnya ? Mengapa

negara industri menjadi kaya dan negara pertanian menjadi miskin. Berdasarkan pertanyaan tersebut, terdapatlah dua kelompok teori. Pertama, teori-teori yang menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat dalam suatu negara tersebut, yang disebut sebagai *teori modernisasi* yang akan dibahas dalam sub bab ini. Kedua, adalah teori-teori yang lebih banyak mempersoalkan faktor-faktor eksternal atau kekuatan-kekuatan luar (dari negara-negara industri) sebagai penyebab negara-negara pertanian tidak mampu atau tidak berdaya dan gagal melakukan pembangunan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yang disebut sebagai *teori struktural*.

Pada akhirnya teori modernisasi gagal untuk memenuhi janji dalam mensejahterakan rakyat di dunia ketiga. Memang teori ini telah menaikkan pertumbuhan GNP, namun setelah perang dunia semua strategi ekonomi dari teori ini dikritik. Fenomena yang terjadi justru sebaliknya, bahwa pembangunan telah membawa dampak negatif, seperti kenyataan bahwa pembangunan telah melanggengkan pengangguran, metumbuhkan ketidakmerataan, dan menaikkan kemiskinan absolut. Mengapa demikian, barangkali perlu dipelajari agak detail dari teori modernisasi ini. Beberapa teori yang termasuk dalam teori modernisasi adalah : teori Harrod-Domar (tabungan dan investasi), Max Weber (etika protestan), David McClelland (dorongan berprestasi atau n-Ach), WW Rostow (limatahap pembangunan), Bert F. Hoselitz (faktor-faktor non-ekonomi), serta Alex Inkeles dan David H. Smith (manusia moder).

Teori Harrod-Domar: Tabungan dan Investasi, adalah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih dipakai dan telah dikembangkan. Evsey Domar dan Roy Harrod, keduanya ahli ekonomi yang secara terpisah mencapai kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau

tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara juga akan rendah. Walaupun teori ini telah mengalami perkembangan dan modifikasi, namun tetap pada asumsi bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi modal.

Max Weber: etika protestan, merupakan teori yang mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama. Max Weber mengungkapkan bahwa agama merupakan faktor penting timbulnya kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pandangan tersebut ia bahas dalam dua buah esei pada tahun 1904 dan 1905, yang akhirnya diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Dalam buku tersebut, Max Weber mencoba menjawab pertanyaan, mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami kemajuan ekonomi yang pesat di bawah sistem kapitalisme. Setelah di analisis, Weber mencapai suatu kesimpulan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah apa yang ia sebut sebagai etika protestan.

Ajaran etika protestan ini mengatakan bahwa seseorang itu sudah ditakdirkan sebelumnya untuk masuk surga atukah masuk neraka. Namun manusia yang bersangkutan belum tahu, dan untuk itu ia menjadi cemas dan tidak tenang karena ketidakjelasan nasibnya ini. Sebagai cara untuk mengetahui apakah ia masuk surga atau neraka salah satunya adalah dengan melihat keberhasilan kerjanya di dunia ini. Kalau orang berhasil dalam kerjanya di dunia ini, hampir dapat dipastikan bahwa ia akan naik ke surga setelah ia mati nanti. Sedangkan jika kerjanya di dunia ini selalu gagal, maka hampir dapat dipastikan bahwa ketika ia mati nanti akan masuk neraka.

Ajaran ini lahir di Eropa melalui agama Protestan yang dikembangkan oleh Calvin. Adanya kepercayaan ini membuat orang-orang penganut agama Prtotestan Calvin bekerja keras untuk meraih sukses. Mereka bekerja tanpa pamrih, yakni

bekerja bukan untuk mencapai kekayaan material, tetapi dalam rangka mengatasi kecemasannya. Dengan kerja keras dan akhirnya sukses, membuat orang lebih merasa tenang, karena jika mati nanti akan masuk ke surga. Inilah yang disebut sebagai etika protestan oleh Weber, yakni cara bekerja yang keras dan sungguh-sungguh, lepas dari imbalan material. Memang pada akhirnya orang-orang ini menjadi kaya, yang merupakan hasil sampingannya. Mereka bekerja keras sebagai pengabdian untuk agama mereka, bukan untuk mengumpulkan harta. Tetapi Weber sebagai sosiolog mengakui bahwa hal ini kemudian berubah jadi sebaliknya. Pada akhirnya etika protestan inilah yang menjadi faktor utama bagi munculnya kapitalisme di Eropa.

Fenomena yang dikaji Weber merupakan fenomena ideal. Hal mana kaum Calvinist, yang dengan keyakinan agamanya akhirnya mendapatkan kebahagiaan akherat (yakin akan masuk surga) sekaligus mendapatkan kebahagiaan dunia (ekonomi yang tinggi) sebagai produk sampingan. Namun Weber sama sekali tidak tertarik menteorisasikan fenomena tersebut sebagai teori yang lebih ideal, hal mana ukuran keberhasilannya tidak hanya diukur secara materiil saja tetapi hal yang lebih bersifat hakiki (ukhrowi). Apabila hal ini dilakukan, barangkali faham kapitalisme sedikit banyak tidak akan sehebat seperti sekarang ini. Kapitalisme berkembang ketika masyarakat tersebut mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sementara hakekatnya (motivasi keyakinan agama tentang kerja keras) tercabut dari kaum-kaum sesudahnya. Dan yang tertinggal hanyalah kerja keras dan kebanggaan terhadap keberhasilan material.

David McClelland: dorongan berprestasi atau n-Ach. Belajar dari doktrin kaum Calvinis, akhirnya David McClelland menyimpulkan bahwa untuk membuat pekerjaan berhasil, yang paling penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut. Jadi yang terpenting adalah: apakah seseorang

memiliki *semangat baru yang sempurna* dalam menghadapi pekerjaannya ? Apakah ia memiliki keinginan untuk berhasil ?

Sebagai seorang ahli psikologi, David McClelland mengungkapkan konsepnya yang terkenal, yakni *the need for Achievement* (kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi), dan disingkat dengan simbol yang sangat terkenal, yakni: *n-Ach*. Seperti juga konsep etika protestan, bahwa keinginan, kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi ini tidak sekedar untuk meraih imbalan materiil yang besar. Orang dengan *n-Ach* yang tinggi, yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, mengalami kepuasan bukan karena mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya, tetapi karena hasil kerja tersebut dianggapnya sangat baik. Ada kepuasan batin tersendiri kalau seseorang berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna.

McClelland selanjutnya mengatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat terdapat banyak orang yang memiliki *n-Ach* yang tinggi, dapat diharapkan masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Didukung dengan penelitian dokumen-dokumen kesusasteraan maupun dokumen-dokumen sejarah akhirnya McClelland tambah yakin bahwa adanya *n-Ach* yang tinggi dalam sebuah masyarakat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat tersebut. Selanjutnya ia katakan bahwa tempat yang paling baik untuk memupuk *n-Ach* adalah di dalam keluarga melalui orangtua. Pendidikan anak menjadi penting, dan cerita untuk anak-anak hendaknya diarahkan pada nilai *n-Ach* yang tinggi. Akhirnya tidak jauh berbeda dengan Weber, bahwa muaranya adalah ekonomi. Ukuran keberhasilan tidak menekankan pada proses yang baik, tetapi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dari berbagai penelitiannya tentang berbagai dokumen sejarah, dokumen kesusasteraan maupun tentang cerita anak-anak, semuanya hanya sekedar sebagai alat bahwa jika suatu masyarakat ingin memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka sebagian besar masyarakat

tersebut hendaklah memiliki *n-Ach* yang tinggi. *N-Ach* yang tinggi hanya sebagai alat, sedang tujuannya (sebagai ukuran keberhasilan pembangunan) adalah ekonomi yang lebih baik. Keberhasilan kehidupan suatu bangsa adalah (direduksi) keberhasilan ekonomi.

WW Rostow (lima tahap pembangunan). Seperti yang telah disinggung di sub bab sebelum ini, ia sangat terkenal dengan bukunya *The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto* yang mula-mula terbit pada tahun 1960. dalam bukunya, ia menguraikan teori tentang proses pembangunan dalam suatu masyarakat. Ia memandang bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak secara linear seperti garis lurus, dari masyarakat terbelakang menuju masyarakat yang maju. Proses pembangunan suatu negara dengan berbagai variasinya akan melalui ke lima tahapan proses (masyarakat tradisional, pra kondisi untuk lepas landas, lepas landas, bergerak ke kedewasaan, dan jaman konsumsi masal yang tinggi). Bahkan teori ini dengan berbagai modifikasi telah diterapkan di Indonesia, melalui tahapan pembangunan lima tahunan, dan setelah dua puluh lima tahun pertama (PJPT I : Pembangunan Jangka Panjang I), maka pada awal PJPT II (pembangunan lima tahunan yang ke enam) Indonesia telah memasuki era tinggal landas. Namun apa yang terjadi, fakta sejarah membuktikan bahwa teori ini bisa dikatakan gagal dilakukan. Hal ini perlu diingat bahwa Rostow sebagai ahli ekonomi yang memiliki perhatian yang luas dan memahami masalah ekonomi tidak hanya dalam arti yang sempit. Bahkan perhatiannya meluas pada masalah sosialologi dalam proses pembangunan, namun tetap saja titik berat analisisnya masih tetap pada masalah ekonomi.

Bert F. Hoselitz (faktor-faktor non-ekonomi). Bert F. Hoselitz membahas faktor-faktor non-ekonomi yang kurang diperhatikan oleh Rostow. Faktor ini disebutnya sebagai faktor *kondisi lingkungan*, yang dianggap penting dalam proses

pembangunan. Hoselitz mempertanyakan/mengkritisi Rostow, mengapa sebuah ekonomi tiba-tiba memiliki kesanggupan untuk menabung dan melakukan investasi sebagian besar dari pendapatannya, terutama bila dia tidak pernah bisa melakukannya untuk jangka waktu yang lama sebelumnya sampai pada titik lepas landas ? Sebagai jawabannya barangkali bisa ditemukan kalau kita menanyakan apakah *kondisi lingkungan* umumnya sudah dibentuk pada masa sebelum lepas landas. Selanjutnya Hoselitz mengatakan bahwa kondisi lingkungan ini harus dicari terutama dalam aspek-aspek non ekonomi dari masyarakat. Ia menekankan kembali, meskipun permasalahan utama pembangunan adalah kekurangan modal (teori Harrod-Domar), sebenarnya ada masalah lain yang juga sangat penting yakni adanya ketrampilan kerja tertentu, termasuk tenaga wiraswasta yang tangguh. Maka agar pemasokan modal menjadi produktif , perlu perubahan-perubahan kelembagaan sebelum lepas landas. Perubahan kelembagaan ini menghasilkan tenaga wiraswasta dan administrasi serta ketrampilan teknis dan keilmuan yang dibutuhkan. Menurut Hoselitz pembangunan membutuhkan pemasokan dari beberapa unsur, yakni: 1) pemasokan modal besar dan perbankan, dan 2) tenaga ahli yang terampil.

Walaupun teori ini juga menambahkan faktor non-ekonomi, secara substansi tidak beda dengan teori-teori sebelumnya, yakni menekankan aspek pertumbuhan ekonomi juga. Karena teori ini sifatnya melengkapi teorinya Rostow.

Alex Inkeles dan David H. Smith (manusia moder). Teori ini berbicara tentang pentingnya faktor manusia sebagai komponen penting penopang pembangunan. Pembangunan bukan sekedar perkara pemasokan modal dan teknologi saja, tetapi dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material tersebut supaya menjadi produktif. Menurut Alex Inkeles dan David H. Smith dibutuhkan apa yang disebutnya sebagai *manusia modern*. Dalam bukunya *Becoming Modern*,

kedua tokoh tersebut mencoba memberikan ciri-ciri manusia modern, antara lain: keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi ke masa sekarang dan masa depan, mempunyai kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam dan bukan sebaliknya, dan sebagainya. Ciri-ciri tersebut bisa saja ditambah, dikurangi, dikritisi ketepatannya. Teori ini hampir sama dengan teori-teori sebelumnya, hanya Inkeles dan Smith menguraikannya secara lebih rinci dan menguji konsep-konsep ini dalam penelitian empiris di enam negara berkembang. Mereka menyatakan bahwa dengan memberikan lingkungan yang tepat, orang bisa diubah menjadi manusia modern setelah ia berusia dewasa.

Hasil penelitiannya, Inkeles dan Smith menjumpai bahwa pendidikan adalah yang paling efektif mengubah manusia. Dampak pendidikan tiga kali lebih kuat dibanding usaha-usaha yang lain. Kemudian cara kedua yang efektif adalah pengalaman kerja dan pengenalan terhadap media massa. Hal ini sesuai dengan pandangan Daniel Lerner yang menekankan pentingnya media massa sebagai lembaga yang mendorong proses modernisasi. Selanjutnya Inkeles dan Smith menekankan faktor pengalaman kerja, terutama pengalaman kerja di pabrik sebagai faktor yang berperan besar dalam mengubah manusia tradisional menjadi manusia modern.

Tidak ada bedanya dengan teori-teori sebelumnya, teori Inkeles dan Smith ini menjadikan manusia modern (dengan berbagai ciri) untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang muara akhirnya adalah peningkatan pendapatan (ekonomi), dengan mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan lainnya. Bahkan manusia modern ini lebih dipandang sebagai alat produksi sebuah industri modern.

Sebagai alternatif, konsep yang dipandang sesuai adalah *pembangunan berdimensi kerakyatan*. Konsep pembangunan ini memiliki kehendak ideal, hal mana masyarakat adil dan makmur dan konsep keadilan sosial ekonomi merupakan

aspek normatif yang kuat dan menjadi harapan para pemikir politik dan ekonomi Indonesia sejak lama (sebelum kemerdekaan). Hal yang menjadi pusat perhatian mencakup pengentasan kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, dan partisipasi masyarakat yang emansipatif (kesetaraan gender).

Dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan pada kenyataan yang kurang seimbang, yang umumnya lebih menekankan aspek ekonomi yang lebih mudah dalam pengukurannya dari aspek sosialnya. Bahkan dalam aspek ekonomipun, konsep pembangunan berdimensi kerakyatan juga mengalami kesulitan dalam implementasinya. Kesulitan pertama para pakar ekonomi adalah mengoperasionalkan ide-ide dalam kerangka usaha ekonomi (alokasi sumber-sumber ekonomi), kedua dihadapkan adanya jarak antara teori dengan rencana atau kebijaksanaan ekonomi, dan kesulitan ketiga selalu menunjukkan terdapatnya perbedaan antara rencana dan kebijaksanaan dengan implementasi / pelaksanaan rencana dan kebijaksanaan tersebut (Sjahrir dalam DC Korten dan Sjahrir, 1988:318). Nampaknya sangat disadari oleh para pakar ekonomi maupun politik bahwa besarnya jarak antara kehendak yang ideal dengan situasi perbaikan yang nyata bagi pelaku-pelaku utama ekonomi (di Indonesia seperti petani, pedagang, buruh, pengusaha dan investor, serta masyarakat lainnya) merupakan permasalahan terbesar bagi konsep pembangunan berdimensi kerakyatan ini untuk diperjuangkan.

C. Pembangunan Berorientasi Masyarakat

Pembangunan yang berorientasi masyarakat yang dimaksud adalah suatu konsep pemangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian. Kemudian disebut sebagai *pembangunan masyarakat* atau pembangunan berpusat pada masyarakat. Berdasarkan tata bahasanya, konsep pembangunan masyarakat terdiri dari kata "pembangunan" dan "masyarakat". Dalam kaidah bahasa Indonesia, yakni kaidah DM (diterangkan-menerangkan), maka kata "masyarakat" yang

posisinya di belakang menerangkan kata "pembangunan" yang letaknya di depan. Sehingga konsep pembangunan masyarakat, dapat ditafsirkan bahwa yang dibangun adalah masyarakat. Bisa dikatakan bahwa dalam pembangunan masyarakat yang menjadi titik sentral perhatiannya adalah masyarakat itu sendiri, yang berarti membangun aspek manusianya. Tujuan pembangunan masyarakat adalah membangun orang dan masyarakat, bukan membangun barang (UNESCO, dalam Soetomo 2006:4). Namun demikian dalam pembangunan masyarakat bukan berarti boleh mengabaikan atau tidak memperhatikan pembangunan fisik. Pembangunan fisik tetap dilakukan dan diperlukan dalam kerangka untuk menunjang dalam membangun manusianya dan masyarakat.

Pada awalnya, pelaksanaan pembangunan di negara-negara sedang berkembang mulai dekade 1950-an penggunaan strategi *community development* banyak direkomendasikan. Strategi ini banyak mendorong prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat tingkat komunitas. Namun sejalan kebijakan nasional di Indonesia yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pendekatan tersebut ditinggalkan.

Pendekatan pembangunan menekankan pertumbuhan ekonomi ini dirasakan bahwa di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, masih banyak kelompok masyarakat miskin yang tidak terangkat kehidupan ekonominya. Bahkan di bagian kelompok masyarakat miskin yang lain justru kehidupannya semakin susah. Terjadi polarisasi kehidupan ekonomi masyarakat."... yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin" Barangkalai cukup jelas bahwa ilustrasi Indonesia bisa menjadi contoh yang sangat nyata dalam hal ini. Selama Orde baru dengan pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi ternyata pada akhirnya cukup rentan terhadap berbagai guncangan. Ketika terjadi krisis multidimensional, yang diawali dengan krisis moneter yang akhirnya berkembang menjadi krisis moral, dan krisis

ketidakpercayaan kepada pemerintah, dan semakin kompleks lagi, maka akan menjadi sulit untuk bangun kembali. Efek dari penekanan pertumbuhan ekonomi, yang implementasi pembangunannya adalah keperpihakan pada kaum konglomerat (perusahaan-perusahaan besar) yang penuh proteksi dari pemerintah, menjadi sangat rentan ketika terjadi guncangan global. Menjadi tidak mampu bangkit dan bersaing lagi ketika pemerintah tidak memberikan proteksi. Di sisi lain, kebaikan kebijakan ini yang didambakan, yakni terjadinya *multiplier effect* bagi tumbuhnya usaha mikro kecil dan menengah dan terjadinya pemerataan ekonomi jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan pada pengalaman tersebut, perkembangan berikutnya dirasakan kembali adanya kecenderungan untuk semakin berorientasi pada pendekatan yang lebih memperhatikan aspek manusia atau pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat pada tingkat komunitas. Setidak-tidaknya ada kemauan dan usaha ke arah itu. Hal ini menjadi nyata setelah suksesi kepemimpinan dan terjadinya perubahan besar dalam tatanan penyelenggaraan negara termasuk perubahan kebijakan dan pendekatan pembangunannya.

Sebenarnya kesadaran akan hal ini sudah mulai ada sejak dekade 1970-an. Hal ini tercermin dari tajuk yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada periode tersebut, yaitu *Socio-economic Development* (Soetomo, 2006:5-6). Dari judulnya saja sudah secara eksplisit menonjolkan aspek sosial disamping aspek ekonomi. Selanjutnya diungkapkan bahwa pendekatan pembangunan ini dalam implementasinya disamping diorientasikan untuk peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, program-program pembangunan juga diarahkan untuk memberikan prioritas pelayanan kepada lapisan masyarakat yang hidup di bawah standar yang layak. Program-program pembangunan diorientasikan bisa sampai ke kelompok-kelompok sasaran secara langsung dan cepat (*delivery approach*). Implikasi yang

diharapkan dari pendekatan tersebut adalah adanya hasil-hasil yang nyata dari kegiatan pembangunan tersebut baik di bidang ekonomi maupun bidang sosialnya. Baik itu berupa pertumbuhan ekonomi yang pesat dan sustain, berkurangnya pengangguran, partisipasi masyarakat yang meningkat dalam kegiatan pembangunan, semakin banyaknya anggota masyarakat yang menikmati hasil-hasil pembangunan, dan sebagainya.

Dalam perspektif pembangunan yang berorientasi kerakyatan, harkat dan kapasitas manusia serta kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan semakin mendapat pengakuan. Pembangunan masyarakat yang merupakan konsep dalam perspektif yang berorientasi rakyat, ada beberapa hal yang menjadi perhatiannya, yakni: 1) masyarakat sebagai subyek dan obyek, 2) proses perubahan, 3) pemanfaatan sumber daya, 4) pengembangan kapasitas masyarakat, 5) mengenal berbagai perspektif (Soetomo 2006: 7-35).

Masyarakat sebagai subyek dan obyek. Sebagai obyek pembangunan, masyarakat berhak menerima berbagai program pembangunan, yang tidak menempatkan masyarakat sebagai sasaran untuk dieksploitasi dalam berbagai bentuk yang mungkin terjadi. Sebagai sasaran pembangunan, masyarakat berhak mendapatkan informasi, kursus, pelatihan, proyek-proyek pembangunan yang mengarah pada peningkatan ketrampilan fisik maupun ketrampilan berfikir dalam berusaha untuk perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya, harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Masyarakat sebagai subyek pembangunan harus terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan bahkan evaluasinya dalam setiap kegiatan ataupun proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain. Karena manusia adalah subyek/pelaku pembangunan, maka para *change agent* harus membawanya untuk menjadi manusia pembangun, manusia yang mandiri

dalam memajukan kehidupan diri, keluarga maupun masyarakat sekitar dimana ia tinggal..

Pembangunan masyarakat sebagai proses perubahan. Perubahan masyarakat bisa berarti kemunduran (*regress*) dan kemajuan (*progress*), tentu saja perubahan yang diharapkan adalah terjadinya kemajuan masyarakat. Pembangunan yang menekankan aspek manusia, memberikan kesadaran bahwa pembangunan adalah merupakan proses, pembangunan bukan perubahan yang sifatnya tiba-tiba (*instant*).

Kesadaran dan sikap manusia dan masyarakat untuk menerima terhadap proses itu sendiri untuk bersedia dengan ikhlas dan sungguh-sungguh melaluinya adalah bagian dari pembangunan manusia itu sendiri.

Proses perubahan ke arah kemajuan yang dikehendai adalah tercapainya pemenuhan kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Hal yang perlu disadari adalah bahwa kebutuhan manusia, tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan mental dan sosial.

Pemanfaatan sumber daya. Tujuan pembangunan masyarakat diantaranya adalah tercapainya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup manusia dan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidup diperlukan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial, dan modal. Hal penting adalah bagaimana membangun hubungan harmonis dan lestari antara manusia dengan berbagai sumber daya tersebut.

Penggunaan sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencari taraf hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera harus dikelola secara arif. Pengelolaan sumber daya hendaknya dikelola di dasarkan pada prinsip: berkeadilan, keseimbangan, keberlanjutan, optimalisasi.

Selanjutnya perlu diperhatikan bagaimana pengelolaan yang bisa memberikan kemaslahatan bagi banyak orang. Hal

penting yang perlu dipikirkan dan dilakukan adalah bagaimana sumber daya potensial yang ada di masyarakat tersebut bisa dikelola secara baik dan diubah menjadi sumber daya yang aktual untuk kemajuan masyarakat.

Pengembangan kapasitas masyarakat. Sebelumnya sudah disinggung bahwa pembangunan masyarakat merupakan proses perubahan (ke arah kemajuan), halmana perubahan ini bisa terjadi secara evolusi (proses yang sangat lama), reformasi (relatif lebih cepat) maupun proses revolusi (proses yang sangat cepat). Masing-masing proses tersebut akan memberikan perubahan ke arah kemajuan maupun efek samping yang berbeda-beda. Revolusi merupakan proses perubahan yang biasanya memberikan efek samping negatif yang paling besar. Resiko-resiko sosialnya sangat besar, hal ini bisa berupa konflik antar kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan tatanan sosial yang berbeda (nilai-nilai modern dengan nilai-nilai tradisional), konflik kepentingan, konflik antar strata sosial dalam masyarakat, dan sebagainya.

Dengan kesadaran yang penuh tentang pentingnya kemajuan hidup dan pentingnya kemandirian, memungkinkan berbagai sumber daya yang ada dikelola secara lestari pula. Pembangunan yang berkelanjutan ini meliputi setidaknya tiga dimensi yang saling mendukung, yakni: keberlanjutan sumber daya alam, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial (Soetomo, 2006:25).

Selanjutnya dalam proses pengembangan kapasitas masyarakat, di dalamnya juga terkandung proses belajar juga. Halmana masyarakat selalu berbuat/beraktifitas dalam berbagai kegiatan pembangunan sambil belajar terhadap hal-hal yang belum ia mengerti ataupun memperbaiki dan mengganti pengertian-pengertian yang ada yang dimiliki sebelumnya menjadi pengertian-pengertian baru yang lebih baik. Dalam pembangunan masyarakat, orang-orang setempat terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan untuk mengembangkan

kapasitasnya melalui proses belajar sepanjang hayat. Orang-orang bekerja dan saling belajar dengan sesamanya maupun dengan pihak luar, baik secara individual/personal maupun secara kelembagaan/kelompok.

Mengenal berbagai perspektif. Proses pembangunan masyarakat selalu melibatkan tiga unsur penting, yakni adanya 1) proses perubahan, 2) mobilisasi atau pemanfaatan sumber daya dan 3) pengembangan kapasitas masyarakat. Oleh Soetomo (2006:31) disebutnya sebagai tiga konsep dasar pembangunan masyarakat, yang dapat digunakan sebagai basis pemahaman dan penjelasan pembangunan masyarakat sebagai suatu fenomena. Dalam perkembangannya sangat terbuka bagi munculnya pemikiran dan pandangan yang bervariasi dalam menjelaskan dan memahami fenomena tersebut, termasuk dalam aktualisasi ketiga konsep dasar tersebut. Variasi tersebut bisa dilihat dengan berbagai cara/dasar/kriteria. Sebagai misalnya bisa didasarkan pihak mana yang lebih dominan dalam mendorong proses perubahan, apakah pihak eksternal atau pihak internal.

Variasi pendekatan juga dapat muncul dengan cara sejauhmana perubahan terjadi. Ada pihak yang beranggapan bahwa suatu perubahan dilakukan secara mendasar sehingga terjadi transformasi struktural, sementara ada pandangan lain melihat bahwa perubahan dalam pembangunan masyarakat tidak perlu sampai pada level struktural. Cukup melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan dalam beberapa metode kerja atau misalnya peningkatan input produksi.

Variasi pandangan juga bisa terjadi dari cara mengelola dan mobilisasi sumber daya, apakah secara terpusat ataukah desentralisasi oleh pemerintah kabupaten/kota ataukah oleh masyarakat setempat, ataukah perlu melibatkan pihak lain.

Kehidupan masyarakat pada dasarnya bersifat multidimensional, sehingga ada pandangan lainnya bahwa dalam pembangunan masyarakat perlu juga memperhatikan

berbagai dimensi, seperti dimensi sosial, politik, psikologis, maupun dimensi lainnya.

Dalam rangka memahami dan menjelaskan fenomena pembangunan masyarakat dikenal adanya berbagai perspektif yang berangkat dari asumsi dan sudut pandang yang berbeda. Sama-sama menjelaskan fenomena pembangunan masyarakat, masing-masing perspektif akan mengelaborasi permasalahan dan melakukan analisis dengan cara yang berbeda. Selain ditentukan oleh perspektif, pilihan pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat sering juga mempertimbangkan tujuan yang menjadi prioritas, situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan, serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Seperti halnya dengan berbagai faktor yang menyebabkan munculnya berbagai perspektif, variasi yang ada dalam pendekatan pembangunan masyarakat dapat dideskripsikan dari berbagai kriteria antara lain, dari intensitas perubahan yang diharapkan, dilihat dari proses dan mekanisme dalam pencapaian tujuan, dapat dilihat dari proporsi peranan sumber daya internal-eksternal yang ada, juga dapat dilihat dari sejauhmana toleransinya terhadap berbagai kondisi masing-masing komunitas.

Pada prinsipnya, dengan menggunakan kriteria tertentu akan dapat diinventarisasi variasi pendekatan yang cukup banyak, tetapi semuanya dapat ditempatkan di antara dua kutub ekstrim. Masih dengan menggunakan cara pandangnya Soetomo, variasi pendekatan lebih lanjut dibuat perbandingan antara dua kutub ekstrim agar dapat dilihat perbedaannya secara lebih jelas dan lebih tajam. Hal ini memudahkan dalam melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya sebagai ilustrasi diungkapkannya berbagai kutub-kutub pendekatan yang berorientasi proses, kutub pendekatan *self help*, dan kutub pendekatan yang memberi toleransi pada variabel lokal, yakni: 1) *Improvement vs Transformation*, 2)

Proses vs Hasil Material, 3) *Self Help vs Technocratic* dan 4) Uniformitas vs Variasi Lokal.

Improvement vs Transformation. Telah diketahui bahwa pembangunan masyarakat merupakan proses perubahan menuju perbaikan. Perubahan itu sendiri bisa merupakan perubahan yang terjadi secara alamiah, sesuai irama dan dinamika masyarakat setempat. Perubahan ini biasanya berjalan sangat lambat, walaupun tidak menutup kemungkinan pada suatu waktu karena adanya stimulus tertentu yang ada di masyarakat bisa terjadi perubahan secara cepat dan sangat dinamis. Perubahan yang lain adalah perubahan yang direncanakan atau perubahan terencana. Dalam banyak pandangan para ahli, yang dimaksud dengan pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan/terencana menuju kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik sesuai dengan yang dikehendaki.

Perubahan terencana bisa bersifat gradual/ tambal sulam (*improvement approach*), ada yang bersifat fundamental atau dengan membongkar fondasinya (*transfomation approach*). Dalam *improvement approach*, walaupun dilakukan perubahan tetapi masih berbasis pada struktur sosial yang sudah ada. Sedangkan dalam *transfomation approach*, perubahan justru terjadi pada level struktur masyarakatnya melalui transformasi sosial. Transformasi struktural digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan transformasi sosial itu sendiri dapat dilihat sebagai tujuan. Transformasi sosial dapat dipandang sebagai sarana, karena melalui struktur sosial yang baru kemudian dapat dikembangkan kondisi kehidupan yang lebih baik. Sedangkan transformasi sosial dapat dipandang sebagai tujuan, ketika dalam pembangunan masyarakat tersebut target utamanya adalah adanya perubahan struktural.

Proses vs Hasil Material. Perubahan yang terjadi dalam kegiatan pembangunan, ada yang menekankan pada tercapainya target-target pembangunan, dan ada pula yang

menekankan pada bagaimana proses perubahan selama kegiatan pembangunan itu terjadi. Pendekatan yang mengutamakan proses merupakan mekanisme perubahan dalam kegiatan pembangunan yang menekankan pada bagaimana prosesnya sampai suatu hasil pembangunan terwujud. Pendekatan yang mengutamakan hasil material merupakan mekanisme perubahan dalam kegiatan pembangunan halmana proses dan mekanisme perubahan untuk mencapai hasil material tidak begitu dipersoalkan, yang penting dalam waktu yang relatif singkat dapat dilihat hasilnya secara fisik.

Selama kegiatan pembangunan pada masa Orde Baru, nampak bahwa target-target pembangunan dari berbagai bidang pembangunan, dan bahkan masing-masing sektor dalam setiap bidang pembangunanpun sangat jelas angka-angka yang menjadi sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahunan, lima tahunan, ataupun PJP). Seringkali dengan berbagai cara dilakukan oleh pemerintah daerah mulai dari potong kompas sampai pada manipulasi data untuk menunjukkan pada pemerintah pusat bahwa pembangunan di wilayahnya berhasil. Hal ini terbukti dengan berakhirnya Orde Baru di tahun 1998, setelah membangun lebih dari 25 tahun, maka muncul krisis multidimensional yang sesungguhnya disebabkan oleh aspek-aspek yang mendasar seperti mental, moral dan etika yang rapuh dari bangsa ini. Halmana aspek-aspek tersebut relatif lengah dari perhatian pemerintah, karena memang sulit diukur. Sehingga kalau boleh meminjam istilah dari dunia pendidikan, mestinya evaluasi pembangunan tidak hanya mengukur (untuk data-data kuantitatif) keberhasilan pembangunan, tetapi juga menilai (untuk data-data kualitatif) keberhasilan pembangunan.

Self Help vs Technocratic. Bahwa perubahan dalam pembangunan masyarakat bisa terjadi karena kekuatan berasal dari sumber daya yang ada di masyarakat. Tetapi perubahan dalam pembangunan juga disebabkan karena adanya kekuatan

dari luar. Pada kenyataannya di lapangan, perubahan dalam pembangunan masyarakat merupakan kombinasi dari kekuatan tersebut. Hanya mana yang lebih dominan, apakah karena kekuatan dari luar ataukah karena mobilisasi dan pemanfaatan sumber daya masyarakat setempat. Pembangunan masyarakat yang menekankan pada kemampuan dan potensi sumber daya yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan disebut *Self Help Approach*. Sedangkan pembangunan masyarakat yang perubahannya menekankan pada kekuatan dari luar biasa disebut *Technocratic Approach*.

Self Help Approach didasarkan pada pemikiran bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki kemampuan, baik sudah direalisasikan maupun masih merupakan potensi yang terpendam. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa pihak yang paling bertanggungjawab untuk merubah seseorang adalah diri dan masyarakat itu sendiri. Prinsip menentukan nasib sendiri, dan lebih bersifat humanis. Yakni prinsip yang lebih menghargai akan kemampuan diri dan menjunjung harkat martabat manusia/diri sendiri yang memiliki berbagai kemampuan dan potensi. Dalam pandangan agamapun juga disampaikan bahwa Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Sementara bantuan pihak luar lebih bersifat sebagai stimulan/pemicu saja. Pendekatan untuk membantu diri sendiri memiliki pemahaman akan pentingnya kemandirian.

Sementara *Technocratic Approach* memandang bahwa untuk kemajuan suatu masyarakat ditentukan oleh sejauhmana terjadi perubahan paradigma dan perubahan pemikiran untuk dapat terjadinya perubahan/kemajuan suatu masyarakat, dan hal ini akan terjadi jika ada pemikiran dan pandangan baru, ataupun material baru (seperti teknologi, dan inovasi baru) yang didatangkan dari luar masyarakat. Dalam serba keterbatasan yang ada dari masyarakat, baik dari sisi sumber daya (SDA, SDM, sumber daya modal, dan sebagainya) maupun berbagai

sarana dan prasarana lainnya, maka perlu asupan/masukan dari pihak lain untuk berpartisipasi baik dalam bentuk bantuan SDM, sumber daya fisik, maupun berbagai teknologi maupun perbaikan kelembagaan yang diperlukan untuk terjadinya perubahan ke arah kemajuan secara signifikan. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa pihak yang memiliki kemampuan hendaklah bisa memberikan bantuan pada pihak lain (masyarakat) untuk maju.

Keterlibatkan pihak luar ini juga sangat menentukan terjadinya suatu perubahan masyarakat, terutama dalam hal merubah *mindset* serta berbagai karakteristik masyarakat yang kurang baik. Dalam konteks masyarakat dunia berkembang yang merupakan masyarakat agraris, Everett M. Rogers menyebutnya sebagai sub-culture peasantry, khususnya untuk masyarakat petani kecil (petani gurem), seperti ketergantungan terhadap pemerintah, fatalis, kurang berorientasi ke masa depan, mudah puas dengan sedikit perbaikan, sudah suratan takdir, lokalit, dan sebagainya. Berbagai persoalan budaya masyarakat yang kurang baik tersebut apabila telah menjadi kebiasaan yang tertanam dalam tiap individu dan temurun, maka bukan hal yang mudah mereka bisa sadar diri dan merubah diri dan keluarganya untuk kemajuan. Hal ini mau tidak mau diperlukan motivator, dinamisator, atau *chnge agent* untuk memberikan kesadaran terhadap apa yang terjadi di masyarakat dan memberikan *power charge* agar lebih semangat dan bergairah untuk merubah kebiasaannya ke arah lebih baik.

Uniformitas vs Variasi Lokal. Pada dasarnya suatu masyarakat secara umum memiliki karakteristik tertentu yang relatif seragam yang bisa dibedakan dengan suatu masyarakat lainnya. Keceragaman yang sifatnya relatif sama untuk suatu masyarakat ini misalnya bisa dilihat dari status sosial, status ekonomi, pendidikan masyarakat, kepercayaan, dan sebagainya. Di sisi lain suatu masyarakat jika dicermati akan memiliki variasi-variasi. Variasi ini misalnya bisa dilihat dari kondisi

geografi, potensi yang dimiliki tiap-tiap individu atau kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat, maupun perkembangan ekonomi, dan sebagainya.

Pendekatan *Uniformitas* adalah pendekatan yang lebih menitik beratkan pada keseragaman. Biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena dengan pendekatan ini, kompleksitas realita yang tidak mungkin semuanya diakomodasi, maka bisa dilihat atas dasar karakteristik generalisasinya di suatu masyarakat atau dilakukan reduksi-reduksi. Sehingga kebijakan yang diambil, atau pprogram-program pembangunan masyarakat yang dirumuskan akan mengarah pada ciri-ciri umum yang ada. Sebagai ilustrasi karena mayoritas adalah petani, maka program-program pembangunannya terutama adalah di bidang pertanian.

Sementara pendekatan *Variasi Lokal* merupakan pendekatan pembangunan masyarakat yang memperhatikan dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap keberagaman yang ada di suatu masyarakat. Hal ini sangat mungkin dilakukan terutama oleh kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat yang datangnya dari pemerintah kabupaten/kota. Otonomi daerah akan memberikan keleluasan bagi kabupaten/kota untuk mengambil alih sebagian program-program yang dulunya dirangcang dari pemerintah pusat. Banyak sektor pembangunan yang di delegasikan kewenangannya ke daerah. Hal ini lebih memungkinkan bagi kabupaten / kota untuk melakukan pembangunan dengan pendekatan *Variasi Lokal*. Ini berarti kelompok-kelompok minoritas juga menjadi diperhatikan. Pendekatan ini lebih memperhatikan seluruh lapisan masyarakat dari pada pendekatan menekankan keseragaman.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Telah diungkapkan mengenai berbagai konsep pembangunan, dan sejumlah kritiknya. Nampaknya banyak kalangan yang lebih menekankan/berorientasi pada pentingnya peranan manusia dan masyarakat sebagai pusat perhatiannya,

yakni memposisikan manusia terutama sebagai subyek pembangunan, disamping sebagai obyek pembangunan. Perhatian yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi dipandang kurang menjamin terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Berbagai pemikiran pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan manusia (peningkatan SDM) menjadi perhatian banyak kalangan, tidak hanya kalangan akademisi, tetapi juga para praktisi dan terutamanya birokrat/ penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara negara lainnya. Muncullah *konsep pembangunan masyarakat* yang telah banyak diulas dalam sub bab sebelum ini. Barangkali konsep yang lebih dulu muncul yang senada dengan konsep pembangunan masyarakat adalah *pembangunan berdimensi kerakyatan*. Pembangunan masyarakat merupakan konsep yang lebih memperhatikan aspek manusia dan masyarakatnya dalam kegiatan pembangunannya, dibanding aspek-aspek yang lain. Misalnya pembangunan yang menekankan pembangunan fisik, sarana dan prasarana, pembangunan ekonomi, dan sebagainya. Sementara pembangunan berdimensi kerakyatan, merupakan suatu konsep pembangunan yang lebih menekankan aspek manusia dan masyarakatnya dibanding unsur-unsur lain dalam suatu negara. Misalnya pembangunan yang menekankan pada pemerintahan yang kuat, pembangunan yang menekankan kekuatan pasar/pelaku-pelaku ekonomi, atau pembangunan yang menekankan aspek legislatifnya yang merupakan manifestasi dari rakyat, dan sebagainya. Jadi kedua konsep tersebut sama-sama menempatkan aspek manusia dan masyarakat sebagai aspek terpenting dalam pembangunan.

Di sisi lain dikenal konsep pemberdayaan masyarakat. Menurut Ginanjar Kartasasmita bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai strategi dalam pembangunan yang berdimensi kerakyatan. Pembangunan masyarakat dan pembangunan berdimensi kerakyatan

merupakan konsep yang memiliki paradigma yang sama dalam menjelaskan fenomena pembangunan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat juga dapat dipandang sebagai salah satu strategi dalam pembangunan masyarakat pula.

Era otonomi daerah merupakan babak baru sistem pembangunan Indonesia lebih menekankan atau memperbesar peranan daerah (kabupaten / kota) untuk memutuskan, merencanakan dan melaksanakan sejumlah/berbagai program pembangunan yang telah didelegasikan kewenangannya (bidang-bidang / sektor-sektor pembangunan tertentu) oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah bisa dilihat sebagai upaya pemberdayaan daerah dalam kegiatan pembangunan. Soenyoto Usman mengungkapkan, dalam upaya pemberdayaan daerah setidaknya memperhatikan tiga hal penting, yakni 1) bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar, 2) aspirasi masyarakat daerah sendiri, terutama yang terefleksi pada prioritas program-program pembangunan daerah, dan 3) keterkaitan antar daerah dalam tata perekonomian dan politik.

Pembangunan di level kabupaten / kota (pembangunan daerah) di era otonomi akan memiliki watak/ciri tersendiri yang berbeda antara daerah kabupaten/kota yang satu terhadap yang lain. Hal ini mengingat bahwa masing-masing daerah memiliki sumber daya dan potensi yang berbeda antara kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya. Jelas bahwa dalam pembangunan daerah di era otonomi daerah bukan semata duplikasi dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah juga bukan merupakan bentuk kecil dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah memiliki pola dan spirit yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.

Dengan demikian bagaimana posisi pembangunan daerah di hadapan pembangunan nasional ? Pembangunan daerah *tidak dapat dilihat* hanya sebagai serpihan dari pembangunan nasional, dan menjadi tidak berarti apa-apa jika

serpihan tersebut tidak ada/hilang (toh masih ada banyak serpihan yang lain). Sesuai dengan ciri dan wataknya yang berbeda, pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pembangunan nasional yang memiliki kebulatan tersendiri, yang bersifat fungsional bagi keseluruhan sistem pembangunan nasional (Soenyoto Usman, 2003:7).

Terkait dengan pendekatan pembangunan yang ada yang sudah dibahas pada sub bab sebelum ini, strategi pembangunan seperti apakah atau pemberdayaan masyarakat yang seperti apakah yang seyogyanya dikembangkan di era otonomi daerah sekarang ini? Berikut ini mencoba menganalisis pendekatan yang seperti apakah yang sekiranya lebih sesuai di era sekarang ini.

Pemberdayaan masyarakat yang cermat dalam memilih bentuk perubahan, apakah bersifat improvement ataukah transformation. Untuk menjawab pertanyaan ini bukan merupakan hal yang mudah. Hal ini akan menyangkut pada banyak aspek, baik itu berkaitan dengan struktur birokrasi pemerintahan yang sudah ada dan berjalan selama ini, dan sejauhmana hal tersebut telah dianggap berfungsi dan memuaskan bagi seluruh elemen dan kekuatan masyarakat yang berkepentingan. Bagaimana pula dengan karakter dan budaya masyarakat. menyangkut dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dan berbangsa di suatu wilayah, termasuk empathy dan toleransi dalam dinamika dan perubahan masyarakat. Termasuk juga pola dan mekanisme perpolitikan yang ada di daerah yang bersangkutan. Hal ini akan berlainan antara wilayah kabupaten/kota yang satu dengan yang lain.

Terutama di bidang pertanian, maka pemberdayaan masyarakat tani akan berkaitan dengan sejauhmana kondisi riil dan potensi sumberdaya alamnya untuk dikembangkan. Bagaimana pula gambaran sumber daya manusianya khususnya petani dan kultur yang berkembang, berkaitan pula dengan

komitmen pemerintah daerah khususnya dinas-dinas yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Hendaklah perlu dikaji secara cermat oleh para praktisi pembangunan baik oleh pemerintah ataupun *change agent* lain yang ada di daerah-daerah, sub-sub sistem mana yang dipandang sudah baik, sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsinya. Dicermati pula sub-sub sistem mana yang dipandang kurang baik, dimana fungsi-fungsi lembaga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sub-sub sistem yang relatif sudah baik dan berfungsi sebagaimana mestinya, baik itu di level pemerintah, lembaga swasta, maupun kelembagaan di tingkat maka pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan secara *improvement*. Sementara pada sub-sub sistem yang sama sekali tidak berfungsi, justru bersifat parasit terhadap sistem yang ada secara keseluruhan, maka disarankan pemberdayaan pada lembaga-lembaga ini dilakukan secara *transformation*, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial-politik dan budaya masyarakat, sehingga dinamika yang ada tidak menjurus pada situasi yang *cheos*. Dengan kata lain bahwa pemberdayaan masyarakat tani seyogyanya dilakukan secara selektif, baik itu bersifat *improvement* maupun *transformation*. Pemberdayaan masyarakat yang bersifat *selective improvement* pada sub-sub sistem tertentu dan *selective transformation* pada sub-sub bagian lain akan lebih diperoleh perubahan ataupun *progress* yang lebih signifikan dengan biaya ataupun resiko sosial-ekonomi-politik-budaya yang relatif kecil. Nampaknya di era otonomi sekarang ini kurang tepat apabila pemberdayaan masyarakat dilakukan bersifat *total improvement* (*improvement* secara menyeluruh), karena akan berjalan tidak tepat sasaran. Lembaga-lembaga yang sudah baik fungsinya justru bisa mengalami kemunduran. Tidak memungkinkan juga pemberdayaan masyarakat dilakukan secara *total transformation* (*transformation* secara menyeluruh) untuk semua sub sistem yang ada di wilayah kabupaten/kota, karena

social cost-nya akan terlalu tinggi. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat secara selektif yang merupakan kombinasi dari keduanya adalah pilihan yang relatif bijak, dengan memperhatikan situasi dan kondisi sehingga perubahan yang diharapkan dari pembangunan betul-betul ke arah kemajuan (*progress*), bukan kemunduran yang akhirnya merusak tatanan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang sudah ada.

Pemberdayaan masyarakat yang memperhatikan pentingnya proses ataukah yang berorientasi pada hasil akhir. Dalam suatu kegiatan pembangunan ataupun berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan manusia di muka bumi ini, bahwa seberapa besar hasil yang diperoleh dari suatu usaha manusia tersebut umumnya dipandang sebagai keberhasilan dari suatu usaha tersebut. Semakin besar hasil yang diperoleh, maka dikatakan semakin berhasil. Nampaknya hal tersebut sudah menjadi nilai yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang manusia. Namun bagaimana dengan ilustrasi berikut ini. Mengukur ketaatan seseorang dalam beragama, adalah dengan melihat ketaatannya dalam mengeluarkan zakat mal sesuai dengan ketentuan. Seseorang tersebut bersedia mengeluarkan zakat yang sangat besar jauh lebih tinggi dari orang-orang islam lainnya. Ternyata belakangan diketahui bahwa orang tersebut terlibat korupsi trilyunan rupiah yang telah diputuskan secara hukum. Apakah orang tersebut telah dikatakan mentaati agama, walaupun ia telah mengeluarkan zakat sesuai ketentuan, sementara proses dalam mencari harta tidak sesuai dengan ketentuan agama ? Bahkan di mata Tuhan ukuran ketaatan tidak diukur dari besarnya zakat yang telah dikuarkan, tetapi oleh keikhlasan dengan jumlah yang sesuai ketentuan aturan agama.

Pemberdayaan masyarakat menekankan pendekatan selfhelp dan memposisikan pendekatan technocratic secara tepat. Pemberdayaan ini terasa tepat untuk suatu masyarakat dengan SDM lokal yang sudah relatif baik. Orang-orang

setempat sudah memiliki rasa percaya tinggi, mempunyai orientasi ke depan, kemana perubahan/kemajuan akan dituju. Sementara menempatkan suatu teknologi dan berbagai inovasi, ataupun pemanfaatan SDM dari luar sebagai alat untuk mencapai kemajuan masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat yang menekankan variasi lokal. Pemberdayaan ini penting dilakukan untuk suatu masyarakat yang memiliki potensi yang masing-masing memiliki arti penting atau keunikan-keunikan. Sebagai ilustrasi dalam upaya memberdayakan seniman-seniman lokal untuk melestarikan berbagai seni budaya daerah yang mereka kuasai.

BAB II

DASAR DASAR KOMUNIKASI

A. Pengertian Komunikasi

Hal yang paling awal dalam memahami arti komunikasi pembangunan adalah dengan mengkaji kembali tentang pengertian dasar dari istilah komunikasi dan pembangunan itu sendiri. Istilah *komunikasi* dapat diberikan pengertian dengan berbagai cara, sesuai dengan kepentingannya. Diantaranya istilah komunikasi dapat diberi pengertian baik secara *etimologis*, *terminologis*, maupun *paradigmatis* (Onong, UE, 1992:3-5). Dalam memberikan pengertian komunikasi juga tidak terlepas dari latar belakang ahli yang mendefinisikannya dan kebutuhan dalam tulisannya. Aspek lain, baik secara sengaja ataupun tidak, definisi komunikasi tidak akan terlepas dari kurun waktu kapan tokoh/ahli tersebut berkiprah. Karena hal ini tidak akan lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada dalam suatu kurun masa tertentu. Pengertian *etimologis* (asal-usul kata), bahwa komunikasi berasal dari bahasa Latin *communis* yang berarti sama (dalam bahasa Inggris: *common*). Komunikasi diterjemahkan dalam bahasa Inggris *communication*. *Commonness* berarti membuat sama. Maksudnya bahwa dalam proses komunikasi diorientasikan pada pencapaian kesamaan makna diantara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Istilah *communicare* (bahasa Latin) berarti memberitahukan (menyampaikan). Sehingga secara harfiah istilah komunikasi diberikan pengertian sebagai *upaya penyampaian sesuatu*.

Pengertian *terminologis* adalah suatu cara untuk memberikan pengertian pada suatu istilah (konsep) yang menekankan suatu *proses*. Sebagai contoh, pengertian komunikasi didefinisikan sebagai *proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain*. Sedangkan pengertian *paradigmatis* adalah suatu cara memberikan pengertian pada suatu konsep yang lebih menekankan pada *tujuan*. Contoh, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk *memberitahu*,

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Banyak ahli telah memberikan pengertian terhadap istilah komunikasi. Ada ahli yang mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pengertian dan mengandung semua unsur prosedur yang dapat mempertemukan suatu pemikiran dengan pemikiran lainnya. Ahli lainnya mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan proses jalur informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Ruben (1988:18) memberikan pengertian komunikasi (*human communication*) sebagai proses yang terus menerus dimana individu-individu dalam hubungannya dengan kelompok, organisasi dan masyarakat secara kreatif mentransfer dan menggunakan informasi untuk mengatur satu dengan yang lain dan lingkungannya. Sedangkan menurut Onong U.E (1992:6), komunikasi yang penting adalah bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator menimbulkan efek tertentu pada komunikan. Komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih, yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan, terjadi dalam suatu konteks tertentu, memppunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik (DeVito, 1997:23). Masih banyak lagi contoh-contoh pendefinisian istilah komunikasi oleh sejumlah ahli yang lain sesuai dengan latar belakang dan penekanannya masing-masing.

Ada beberapa hal yang bisa dicermati dari berbagai definisi komunikasi yang telah diungkapkan di atas , nampaknya ada kesepakatan mengenai pengertian komunikasi terhadap beberapa hal berikut ini:

- Komuniaksi adalah *suatu proses*
- Komunikasi *menyampaikan sesuatu (pesan komunikasi)*
- Dalam komunikasi selalu *ada pihak-pihak yang terlibat* (ada pihak memberi dan pihak yang menerima pesan)

komunikasi ataupun sama-sama memberi dan/atau menerima pesan-pesan komunikasi).

Secara implisit juga mengandung pengertian bahwa proses komunikasi akan selalu *menggunakan lambang-lambang* baik berupa bahasa atau bentuk lainnya (kode, isyarat, dan sebagainya) yang *bermakna* dalam penyampaian pesannya, serta selalu *memiliki maksud atau tujuan*.

Pemahaman lebih lanjut tentang komunikasi selalu terkait dengan kebutuhan / kepentingan dan konteksnya. Fenomena dalam prakteknya, setidaknya kegiatan komunikasi bisa dilihat dalam tiga perspektif, yakni: perspektif komunikasi sebagai proses linear, perspektif komunikasi sebagai proses interaktif, dan proses komunikasi sebagai proses transaksional

Perspektif komunikasi sebagai proses linear, terlihat seperti pada kegiatan pidato atau komunikasi dengan media massa, bahwa pesan mengalir secara searah, dari pihak sumber kepada audiennya. Sementara perspektif komunikasi sebagai proses interaktif menekankan peran feedback., yakni setelah pesan dikirimkan oleh pihak pertama, maka khalayak akan memberikan respon ke sumber sesuai pemahaman yang ada padanya. Komunikasi dilihat sebagai proses mengalirnya pesan yang terjadi secara bergantian. Komunikasi sebagai proses transaksional melihat bahwa proses komunikasi terjadi secara simultan. Pesan yang mengalir dari pihak satu ke pihak kedua, hampir berbarengan dengan pesan yang mengalir dari pihak dua ke pihak satu. Dan aliran pesan diantara ke dua belah pihak akan berkembang sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan dari pesan-pesan yang mengalir sebelumnya.

B. Unsur dan Proses

Proses Komunikasi

Proses komunikasi adalah suatu proses bagaimana suatu pesan/informasi bisa sampai dari penyampai pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan). Pada

kenyataannya, sampainya pesan dari satu pihak ke pihak lain dapat melalui berbagai cara. Jadi proses komunikasi cukup bervariasi, mulai dari yang sederhana sampai yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Pada level komunikasi yang relatif sederhana (*face to face communication* atau *diadic communication*), maka suatu pesan dapat langsung disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dan jawaban/tanggapan dapat segera diketahui komunikator.

Bagaimana proses komunikasi yang terjadi pada komunikasi kelompok (*small group communication*)? Bisa saja dapat dilakukan seperti *face to face communication*, tetapi dapat juga menggunakan berbagai cara lain. Misalnya: dengan pesan tertulis, surat, kertas memo, pesan di white board, undangan, melalui teman dan sebagainya. Tentu saja berbeda lagi dengan bagaimana proses komunikasi dalam level komunikasi organisasi (*organizational communication*). Pada kelompok formal/organisasi (misal: lembaga pendidikan, perusahaan agribisnis, lembaga siaran, lembaga penerbitan, perusahaan perkebunan, lembaga perbankan, dan sebagainya). Pada tingkatan ini penggunaan berbagai teknologi informasi atau teknologi komunikasi lebih maju dibanding pada tingkatan kelompok. Sehingga penggunaan berbagai media komunikasi tersebut biasa dilakukan. Kegiatan komunikasi juga dapat menggunakan email, faksimili, telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Oleh komunikator, suatu pesan disusun sedemikian rupa disesuaikan dengan teknologi informasi yang digunakan.

Semakin kompleks lagi gambaran proses komunikasi pada level komunikasi massa. Sebagai ilustrasi untuk penyampaian pesan iklan tentang bibit jagung unggul atau salah satu jenis produk pestisida dengan durasi hanya beberapa detik, maka sebuah perusahaan bisa melibatkan berbagai pihak dalam pembuatannya. Mereka harus menentukan aktor/aktris yang dipandang tepat yang dapat memberi dampak yang besar pada pemasaran produknya. Untuk pembuatan filmnya juga

harus melibatkan kru yang terdiri dari banyak orang(kameramen, lighting, tata rias, teknisi, sutradara, pembantu umum, dan sebagainya). Belum lagi perizinan, jika pengambilan gambar dilakukan di lapangan (di wilayah tertentu). Belum lagi jika melibatkan sebagian anggota masyarakat (misal: kelompok tani). Juga proses editing dan dubbing yang dilakukan oleh beda orang. Jika hasil dipandang belum optimal, sehingga perlu kembali ke lapangan untuk pengambilan gambar, dan sebagainya. Dengan pembiayaan yang relatif besar.

Jelas bahwa bagaimana proses komunikasi berjalan, terkait dengan level komunikasi dan penggunaan teknologi di dalamnya. Pada komunikasi lisan secara langsung (face to face communication), pembicara menyampaikan pesan dalam bentuk gelombang longitudinal yang langsung dapat ditangkap pendengaran penerima pesan. Lain halnya komunikasi lisan yang telah menggunakan teknologi komunikasi (misalnya: telepon), maka suara pembicara dalam bentuk gelombang longitudinal harus diubah terlebih dahulu menjadi gelombang elektromagnetik oleh peralatan telepon dan dipancarkan kembali dalam bentuk gelombang longitudinal berupa suara yang dapat di dengar oleh penerima.

Ada hal yang seringkali tidak menjadi perhatian kita, bahwa sebenarnya sebelum terjadi proses komunikasi dengan pihak lain, telah terjadi proses komunikasi yang terjadi pada diri seorang komunikator terlebih dahulu. Hal ini biasa disebut dengan komunikasi intrapersonal, yang sebenarnya tidak lain adalah proses menyandi pesan (proses encoding) yang dilakukan oleh encoder. Komunikasi intrapersonal yang dilakukan bisa dalam bentuk proses berpikir, merenung atau lainnya. Ketika seorang komunikator dihadapan komunikannya atau sudah menempelkan gagang telepon di telinganya (dan ini dapat dipandang sebagai stimulus) dan siap berbicara, maka dari indera kita mengirimkan pesan ke otak melalui saraf

sensorik. Di otak informasi yang akan disampaikan diolah, di susun dan didisain sedemikian yang menurut pertimbangan otak akan efektif jika disampaikan. Selanjutnya dari otak melalui saraf motorik orang tersebut mulai melakukan pembicaraan pada pihak lain. Jelas bahwa proses komunikasi intrapersonal merupakan prasyarat yang mutlak harus ada sebelum terjadi proses-proses komunikasi pihak lain pada berbagai bentuknya.

1. Unsur Komunikasi

Unsur komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar suatu proses komunikasi dapat berlangsung. Dari pengertian ini maka yang dimaksud unsur komunikasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Hal ini terkait pula dengan perkembangan peradaban manusia dalam caranya berkomunikasi. Tentu saja sangat terkait pula dengan penggunaan teknologi. Pada awal perkembangan ilmu komunikasi, Aristoteles menyebutkan adanya unsur komunikasi terdiri dari 3 hal: a) *pembicara*, b) *apa yang dibicarakan* dan c) *penerima*. David K. Berlo mengungkapkan unsur komunikasi terdiri dari 4 hal: a) sumber (*source*), pesan (*message*), saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*). Berlo menambahkan satu unsur (*channel*) dari apa yang dikatakan Aristoteles. Saluran yang dimaksud oleh Berlo adalah melalui mana suatu pesan komunikasi dapat diterim oleh *receiver*. Ia menunjuk tentang panca indera penerima pesan (penglihatan, pendengaran, indera pembau, paraba dan perasa).

Selanjutnya David A. De Vito menambahkan 2 unsur lagi, yakni adanya: *efek* dan *feed back*. Akhirnya berkembang berbagai unsur-unsur komunikasi lain dengan berbagai istilah. Stewart L Tubb dan Sylvia Moss mengungkapkan adanya unsur gangguan (*interference*) dan proses menyandi sebagai *filter*; ahli lain menyebutkan gangguan (misalnya Joseph R. Dominick) sebagai *noise* dan menyebut proses menyandi

sebagai *proses encoding* dan *decoding*. Masih Tubb dan Moss mengungkapkan adanya unsur *input*, dengan maksud bahwa dalam proses komunikasi selalu ada berbagai informasi lain yang dimiliki dan dimasukkan dalam proses komunikasi ketika menyampaikan dan menerima pesan. Dalam hal ini (walaupun tidak sama persis pengertiannya) James C. Mc Croskey menyebutnya sebagai *pembentukan ide dan pemilihan tingkah laku*. Secara lengkap Joseph R. Dominick menyebutkan adanya 8 unsur komunikasi, yaitu: sumber (*a source*), proses encode (*a process of encoding*), pesan (*a message*), saluran (*a channel*), proses decode (*a process of decoding*), penerima (*a receiver*), potensi umpan balik (*the potential for feed back*) dan kemungkinan adanya gangguan (*the chance of noise*).

a. Komunikator (*communicator*)

Komunikator (*communicator*) adalah pihak (baik bersifat perorangan, kelompok maupun lembaga) yang berbicara untuk menyampaikan pesan di dalam suatu proses komunikasi. Terkait dengan istilah ini, ada berbagai istilah lain untuk maksud yang sama, tetapi bisa saja berbeda. Selain istilah komunikator, dikenal istilah-istilah sumber (*source*), pengirim (*sender*), penyandi (*encoder*). Yang dimaksud sumber adalah pihak yang memiliki informasi atau pihak dimana informasi itu berasal, yang nantinya akan disampaikan pada pihak lain. Sedangkan pengirim adalah pihak yang mengirimkan pesan dalam suatu proses komunikasi. *Penyandi* adalah pihak yang membuat sandi, hal mana sandi atau lambang-lambang tersebut diperuntukkan bagi pihak lain. Dalam suatu konteks komunikasi, bisa saja yang dimaksud komunikator adalah pengirim pesan (*sender*) itu sendiri atau *encoder*.

Dalam proses komunikasi yang lebih kompleks (misalnya: komunikasi massa), maka sumber informasi / *source* (misalnya: perguruan tinggi, lembaga penelitian) tidak harus berperan sebagai *encoder* (misalnya: proses penyandian bisa dibuat paket siaran tertentu yang melibatkan banyak kru). Atau

seorang *sumber* informasi (misal: Prof. Dr. Titi Sumiyati, M.Sc.) tidak harus berperan sebagai sender. *Sender* bisa diperankan oleh artis ataupun penyiar, dan sebagainya.

b. Proses mengkode (*a process of encoding*)

Proses mengkode adalah proses, sehingga suatu pesan menjadi siap untuk dikirim/disampaikan/dibicarakan. Proses mengkode dilakukan oleh encoder atau bisa juga oleh *sender*, *source* atau komunikator. Jadi di dalam proses mengkode, suatu pesan yang akan dikomunikasikan dikemas sedemikian rupa sehingga ketika pesan tersebut disampaikan, mudah dipahami oleh penerima (*komunikan*). Dalam komunikasi massa, sebelum suatu pesan siap tayang (siap disiarkan lewat media massa), maka harus dikemas lebih dahulu dalam format tertentu (misalnya: format fragmen, feature, majalah udara, berita, laporan eksklusif dan sebagainya). Proses mengkode dalam hal ini melibatkan banyak orang (artis, kameramen, teknisi, dubber, editor, dan sebagainya).

c. Pesan (*message*)

Pesan adalah sesuatu yang akan disampaikan dalam proses komunikasi. Sesuatu tersebut bisa berupa informasi, teknologi, pengetahuan, sikap tertentu, opini tertentu, hiburan, ketrampilan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh komunikator atau sender berupa lambang-lambang yang memiliki makna atau arti, baik dalam bentuk lambang-lambang verbal maupun non verbal.

d. Saluran (*channel*)

Telah diungkapkan bahwa saluran komunikasi adalah melalui mana suatu pesan dapat diterima oleh komunikan. Saluran komunikasi dibedakan menjadi saluran bermedia (media komunikasi) dan saluran tanpa media. Saluran tanpa media, bisa dalam bentuk komunikasi intrapersonal (misalnya: meditasi dan doa), komunikasi interpersonal (misalnya: face to face communication), Small Group communication (misalnya: ceramah), dan Public communication (misalnya: pidato,

retorika). Sedangkan saluran bermedia terdiri dari non media massa dan menggunakan media massa. Saluran bermedia non media massa bisa berupa manusia (misalnya: kurir dan utusan) dan benda (misalnya: telepon, faksimili, surat dan sebagainya). Saluran bermedia dengan media massa bisa terdiri dari: 1) non periodik, meliputi manusia (misalnya: seminar) dan benda (misalnya: buku, brosur, leaflet dll); 2) periodik, meliputi tercetak (misalnya: surat kabar, majalah dll), dan elektronika (misalnya: radio, TV, film); serta 3) interaktif, yakni telematika (misalnya: TV kabel, komputer komunikasi, internet)

Media adalah suatu alat/sarana yang diharapkan dapat memperbaiki penyampaian pesan dalam proses komunikasi. Media komunikasi merupakan peralatan yang dalam penggunaannya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses komunikasi yang berlangsung. Media komunikasi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan jumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi, media juga dapat mengatasi batas ruang dan waktu. Perkembangan media komunikasi yang begitu pesat, baik berupa teknologi informasi maupun teknologi komunikasi, telah merubah peradaban manusia secara global, dengan segala konsekuensinya dan disebut era informasi.

e. Proses membuka kode (*a process of decoding*)

Proses membuka kode adalah suatu proses untuk menterjemahkan suatu pesan yang dilakukan oleh penerima pesan. Dalam menyampaikan suatu pesan digunakan lambang-lambang (baik berupa bahasa maupun lambang non verbal), dan lambang-lambang tersebut akan diberi arti atau dimaknai oleh penerima pesan. Apabila lambang-lambang sudah dikenal dan difahami oleh kedua pihak (pengirim dan penerima pesan) yang terlibat, maka akan dimaknai secara sama oleh kedua pihak yang terlibat tersebut, dan dikatakan bahwa proses komunikasi dapat berjalan efektif.

Proses encoding maupun proses decoding baik dalam bentuk komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok,

maupun dalam komunikasi organisasi pada hakekatnya merupakan komunikasi intrapersonal dari orang-orang yang terlibat (komunikator dan komunikan) dalam proses komunikasi tersebut. Demikian juga untuk proses decoding pada komunikasi massa. Sedangkan proses encoding dalam komunikasi massa lebih merupakan proses pengemasan pesan (pengambilan suara dan gambar termasuk proses editing) dalam format tertentu yang bisa melibatkan banyak orang (kru).

f. Komunikan (*cummunicant*)

Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dalam suatu proses komunikasi. Ada berbagai istilah lain yang memiliki maksud hampir sama dengan komunikan adalah penerima pesan (*receiver*), penangkap pesan (*decoder*), pendengar (*audience*), pemirsa, pembaca. Istilah pendengar, pembaca dan pirsawan biasanya diperuntukkan untuk penerima pesan melalui media massa.

Penerima pesan (*receiver*) bisa bersifat individual/personal, kelompok, maupun massa. Hal ini tergantung bentuk komunikasinya. Dalam konteks komunikasi interpersonal, maka komunikannya individual. Dalam komunikasi kelompok, maka komunikannya terdiri dari sejumlah orang yang saling kenal dengan baik (kelompok). Sedangkan dalam komunikasi massa, maka audiennya juga bersifat massa. Yakni terdiri dari banyak orang yang tersebar secara geografis, dan tidak saling kenal satu dengan yang lain.

g. Efek (*effect*)

Efek adalah pengaruh komunikasi pada komunikan atau pengaruh yang terjadi pada diri komunikan sebagai konsekuensi karena menerima pesan dalam proses komunikasi. Efek yang terjadi pada komunikan akan sangat bervariasi. Suatu proses komunikasi yang terjadi bisa tanpa efek (*zero effect*) sampai pada efek yang kuat bagi penerima pesan (*full effect*). Secara umum efek yang terjadi bisa berupa efek kognitif, efek afektif maupun efek psikomotorik. Efek kognitif

yaitu efek pada diri komunikan yang ditandai oleh tambahnya pengetahuan baru atau perbaikan pemahaman dari pengetahuan yang selama ini telah dimiliki. Efek afektif adalah efek yang berupa adanya perubahan sikap yang terjadi pada diri komunikan setelah menerima pesan komunikasi. Efek afektif ini bisa bersifat positif maupun negatif. Sedangkan efek psikomotorik adalah efek berupa tambahan ketrampilan pada diri komunikan setelah menerima pesan-pesan komunikasi. Efek motorik akan diperoleh oleh khalayak jika pesannya berupa teknologi atau inovasi. Bukan pesan yang hanya sekedar informatif (atau pengetahuan) saja.

h. Umpan balik (*feedback*)

Umpan balik merupakan reaksi yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator setelah ia menerima pesan. Umpan balik dapat dipandang sebagai informasi tentang keberhasilan penerima dalam menangkap pesan. Sebagai ilustrasi, ketika seorang dosen menjelaskan suatu topik atau materi kuliah, mahasiswa menunjukkan reaksi dengan menganguk-angukkan kepala, yang berarti bahwa mahasiswa tersebut telah paham terhadap apa yang disampaikan oleh dosen tersebut.

Sama halnya dengan efek, umpan balik yang terjadi dalam proses komunikasi juga akan sangat bervariasi. Bisa saja dalam suatu konteks komunikasi, tidak disertai umpan balik sama sekali. Hal ini maka umpan balik akan sama dengan nol atau tanpa umpan balik (*zero feedback*). Umpan balik juga bisa sangat banyak bermunculan selama terjadinya proses komunikasi. Hal ini disebut *full feedback* (bebas umpan balik). Dalam konteks komunikasi interpersonal akan memiliki kecenderungan *full feedback*, sedangkan pada konteks komunikasi massa akan cenderung mengarah ke *zero feedback*.

i. Gangguan (*interference*)

Gangguan atau hambatan komunikasi adalah berbagai hal yang menyebabkan suatu proses komunikasi tidak berjalan secara efektif. Gangguan komunikasi dapat terjadi di mana saja selama berlangsungnya proses komunikasi. Hambatan bisa berasal dari komunikatornya selama proses encoding (pengemasan pesan), pesannya sendiri, saluran komunikasi (pemilihan media komunikasi yang kurang sesuai) maupun penerima informasi dalam melakukan proses decoding.

Ada berbagai istilah lain dari gangguan komunikasi yang biasa dikenal dalam komunikasi, yakni *noise* dan *barrier*. *Noise* biasanya untuk memberi pengertian gangguan komunikasi yang sifatnya teknis dan mekanis, ataupun kondisi alam. Hambatan komunikasi ini bukan berasal dari kesalahan manusia selama proses komunikasi. Sebagai contoh, kerusakan pada pengeras suara sehingga tidak cukup didengar dengan baik oleh seluruh peserta rapat. Frekuensi radio yang tidak jernih pada cuaca hujan, sehingga suara tidak jelas terdengar oleh audien. Atau mahasiswa yang tidak jelas membaca tulisan di whiteboard karena penerangan ruangan yang kurang baik, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud *barrier* biasanya merujuk pada pengertian gangguan dalam proses komunikasi karena kesalahan manusia yang terlibat di dalamnya. Sebagai contoh, suara komunikator yang kurang jelas, sehingga pendengar tidak bisa menangkap maksud dari apa yang baru diucapkannya. Kesalahan memilih lambang dari komunikator, sehingga dimaknai secara berbeda dari komunikannya. Atau perbedaan-perbedaan persepsi yang sering muncul di antara orang-orang yang terlibat proses komunikasi, dan sebagainya.

Gangguan akan teratasi dengan baik, lebih dulu harus dikenali dari mana sumber gangguan. Apakah dari komunikator, komunikan atau dari media yang digunakan. Seorang komunikator hendaklah peka terhadap berbagai kemungkinan gangguan yang muncul selama berlangsungnya proses komunikasi. Mengatasi gangguan hendaknya juga harus

bijaksana, bersifat fair (tidak mudah menyalahkan pihak lain), dan sidini mungkin. Dengan memperhatikan pesan-pesan verbal dan (terutama) non verbal yang ditampilkan, maka memungkinkan gangguan tersebut segera dapat diatasi pada saat itu juga.

C. Klasifikasi Komunikasi

Fenomena kegiatan komunikasi pada kenyataannya memiliki berbagai ragam dan coraknya. Terkait dengan fenomena ini secara teoritik ragam aktivitas komunikasi dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Misalnya penggolongan komunikasi didasarkan pada penggunaan alat, arah komunikasi, jumlah orang yang terlibat, kode yang digunakan, dan saluran yang digunakan. Onong UE (1993: 52-56) mengungkapkan bahwa lingkup ilmu komunikasi dapat ditinjau dari aspek: bidang komunikasi, sifat komunikasi, tatanan komunikasi, tujuan komunikasi, fungsi komunikasi, teknik komunikasi, dan metoda komunikasi. Disini akan diungkapkan klasifikasi komunikasi yang didasarkan pada berbagai cara tersebut, secara terinci meliputi: 1) berdasar jumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi, 2) penggunaan media komunikasi, 3) kecepatan pesan komunikasi diterima, 4) indera penerima, 5) arah pesan, 6) kode yang digunakan dalam komunikasi dan 7) berdasarkan bidang kajian komunikasi.

1. Klasifikasi Komunikasi Berdasar Jumlah Orang yang Terlibat

Pengelompokan ini sebenarnya tidak semata-mata atas dasar jumlah orang saja tetapi ada aspek-aspek lain yang terlibat, seperti misalnya suasana komunikasi juga aspek keformalan. Namun jumlah orang yang terlibat dipandang sebagai hal yang menonjol. Berdasarkan jumlah orang / pihak yang terlibat, komunikasi dapat dikelompokkan menjadi: komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal,

komunikasi kelompok (*small group communication*), komunikasi organisasi (*organizational communication*), dan komunikasi massa (*mass communication*).

1. Komunikasi Intrapersonal (intra pribadi)

Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi, dimana dalam pengiriman dan penerimaan pesan dilakukan satu orang saja. Komunikasi jenis ini merupakan proses komunikasi yang terjadi di dalam individu itu sendiri. Proses komunikasi intrapersonal merupakan kegiatan neurofisiologis.

Ketika ada stimulus (informasi) yang datangnya dari luar, akan ditangkap oleh panca indera manusia (misal: melalui mata) respon akan diberikan dengan mengirim informasi tersebut melalui impuls saraf sensorik menuju pusat saraf. Di pusat saraf akan terjadi pengolahan informasi (melalui proses berpikir). Alternatif selanjutnya adalah 1) informasi ini akan disimpan di dalam short term memory ataupun long term memory, dan dapat dibongkar kembali (melalui proses pengingatan atau remembering) jika suatu ketika dibutuhkan. Alternatif 2) langsung diteruskan melalui impuls saraf motorik, yang akhirnya anggota badan manusia bereaksi sesuai keperluannya.

Pada kenyataannya komunikasi intrapersonal ini mendasari dan merupakan proses komunikasi awal untuk terjadinya proses komunikasi lainnya. Keberhasilan proses-proses komunikasi yang lain sangat ditentukan bagaimana proses komunikasi intrapersonal ini terjadi. Contoh dari komunikasi intrapersonal adalah: proses berpikir itu sendiri, berdoa, sembahyang, melamun, merenung, proses berpikir, dan lain-lain. Untuk melamun bisa saja tidak dikategorikan sebagai komunikasi intrapersonal. Karena proses komunikasi merupakan proses yang disadari dengan pengembangan pesan secara terarah. Sementara pesan yang dikembangkan pada aktivitas melamun di dalam saraf pusat nampak tidak terarah

(liar). Namun yang perlu dicatat, bahwa dalam melamun ada tujuan (dan ini merupakan salah satu unsur komunikasi) yang dapat dicapai, yakni kenikmatan, rasa aman, rasa sedih, dan sebagainya. Untuk berdoa dan sembahyang ada yang menyebutnya sebagai komunikasi transendental.

2. Komunikasi Interpersonal (antar pribadi)

Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih (beberapa orang) yang melibatkan suasana kejiwaan yang lebih mendalam dan umumnya bersifat tidak formal. Contoh dari komunikasi jenis ini adalah: pembicaraan antara dua orang petani yang sedang membicarakan tanaman padinya yang terserang wereng atau pembicaraan beberapa orang pemuda tani yang sedang bercerita tentang pacarnya masing-masing. Komunikasi yang melibatkan 2 orang disebut diadic communication dan jika melibatkan 3 orang disebut triadic communication dan seterusnya.

Pada level komunikasi intrapersonal ini menyentuh sisi kejiwaan yang lebih dalam, yang ditekankan adalah dimensi hubungan (relationship) dari pada isi pesan (content). Seringkali isi pesan menjadi tidak begitu penting, yang penting adalah penciptaan kenyamanan selama proses komunikasi. Dan inilah kenapa dikatakan klasifikasi didasarkan jumlah orang yang terlibat tidak begitu pas betul. Dan karena sifatnya tidak formal, maka pesan bisa berkembang kemana saja, yang penting suasana komunikasi (relationship) dirasa nyaman. Coba kita perhatikan pembicaraan sejumlah ibu rumah tangga yang sedang belanja sayur pada penjual sayur yang kebetulan lewat di pagi hari. Tentu pembicaraan tidak hanya masalah sayur yang akan dibeli, tetapi bisa apa saja memungkinkan untuk dibicarakan di dalam pertemuan tersebut.

3. Komunikasi Kelompok (*Group Communication*)

Komunikasi kelompok sering juga disebut komunikasi kelompok kecil, yang merupakan terjemahan dari *Small Group Communication*. Yang dimaksud dengan komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang melibatkan 3 orang atau lebih dalam suasana kelompok. Sebelum berbicara lebih lanjut, maka perlu pemahaman terlebih dahulu tentang pengertian kelompok yang dalam konsep sosiologi disebut sebagai kelompok sosial. Menurut Soekanto (1990:125-126) kelompok sosial merupakan himpunan manusia, mempunyai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan adanya kesadaran untuk saling tolong-menolong, dengan syarat:

- a. adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok
- b. ada hubungan timbal balik antar anggota
- c. ada faktor yang dimiliki bersama (misalnya seperti: nasib, kepentingan, tujuan yang sama dll)
- d. berstruktur (misalnya: ada ketua, sekretaris, bendahara, seksi, anggota), berkaidah dan mempunyai pola perilaku
- e. bersistem dan berproses.

Dengan mendasarkan adanya berbagai persyaratan tentang kelompok, jelas bahwa proses komunikasi kelompok memiliki corak tersendiri yang berbeda dengan komunikasi interpersonal. Dengan adanya kepengurusan dengan kaidah tertentu, maka jenis dan arus pesan akan lebih diatur. Sebagai ilustrasi, ketika seorang anggota ingin melakukan pinjam uang, ia akan melakukan komunikasi pada orang-orang tertentu (misal: dengan bendahara, dan harus di setujui ketua) yang sudah diatur. Ada berbagai bentuk komunikasi yang ada di dalam suatu kelompok, misalnya rapat pengurus, rapat rutin bulanan, rapat pleno (rapat tahunan) dan sebagainya. Dalam rapat pengurus, maka proses komunikasi yang terjadi akan berbeda dengan rapat tahunan. Karena pesan yang dibahas dan orang yang terlibat di dalamnya akan berbeda pula. Disamping dalam bentuk rapat-rapat, komunikasi kelompokpun bisa dilakukan pada konteks lain, misalnya melalui pesan tertulis,

kurir, dan sebagainya. Namun yang lebih menonjol dalam komunikasi kelompok dibanding komunikasi organisasi adalah masih ditekankannya komunikasi langsung (*face to face communication*).

4. Komunikasi Organisasi (*organizational communication*)

Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang ada di dalam suatu organisasi. Namun demikian dalam kajian tentang komunikasi, juga dipelajari bagaimana sebuah organisasi tersebut harus berkomunikasi dengan organisasi atau perusahaan lain dan lingkungan dimana organisasi tersebut berada dan berperan. Disini proses komunikasi yang terjadi akan lebih kompleks lagi dibanding komunikasi kelompok. Komunikasi dalam organisasi bisa bersifat formal maupun non formal. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Disamping melalui rapat-rapat, penggunaan pesan tertulis dan atau lisan, yang jelas karena mereka memiliki kemampuan yang lebih dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, bisa digunakan berbagai cara komunikasi lain terkait dengan pemilikan teknologi tersebut. Bentuk-bentuk komunikasi organisasi bisa dengan komunikasi lateral, komunikasi vertikal, komunikasi diagonal, komunikasi publik atau yang lainnya.

5. Komunikasi Massa (*Mass Communication*)

Komunikasi massa adalah komunikasi yang terjadi dimana dalam proses penyampaian pesannya melibatkan banyak orang yang tidak teridentifikasi. Biasanya komunikatornya adalah lembaga, dan penerimanya adalah khalayak yang tidak teridentifikasi, baik menyangkut umur, pekerjaan, status, jenis kelamin, pendidikan dan sebagainya, dengan kedudukan (tempat tinggal) yang tidak diketahui dan menyebar pula.

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang terjadi dengan menggunakan media massa. Media massa terdiri

dari media massa cetak dan media massa elektronika. Media massa cetak (printed media) misalnya koran, majalah, tabloid, brosur, leaflet, folder, buku, journal dll. Sedangkan Media massa elektronika bisa berupa radio, televisi, media internet dan sebagainya.

Pada awalnya proses komunikasi massa cenderung bersifat searah. Tetapi dengan berkembangnya penggunaan teknologi komunikasi, memungkinkan berbagai acara atau sajian dalam komunikasi massa dibuat interaktif.

2. Klasifikasi Komunikasi Berdasarkan Penggunaan Media

Berdasarkan ada tidaknya media yang digunakan dalam penyelenggaraan proses komunikasi, dikenal ; a) komunikasi primer (komunikasi tanpa media) dan b) komunikasi sekunder (komunikasi bermedia). Komunikasi primer (tanpa media) yaitu proses komunikasi yang terjadi tanpa bantuan media komunikasi. Contohnya: komunikasi tatap muka (face to face communication). Sedangkan komunikasi sekunder adalah komunikasi yang terjadi dengan bantuan media komunikasi. Contohnya: komunikasi melalui media massa, komunikasi melalui kurir, surat-menyurat, komunikasi melalui internet, email, faksimili, komunikasi menggunakan telepon, dan sebagainya.

3. Klasifikasi Komunikasi Berdasarkan Kecepatan Pesan Diterima

Berdasarkan kecepatan pesan dapat diterima oleh komunikan, maka dapat dibedakan menjadi: a) komunikasi langsung (komunikasi pesan segera), dan b) komunikasi tidak langsung (komunikasi pesan tertunda). Komunikasi langsung adalah komunikasi yang terjadi dimana pesan dapat disampaikan dengan segera (tidaktertunda) oleh komunikator kepada komunikan. Contoh: komunikasi tatap muka,

komunikasi lewat telepon, kotbah jum'at, pidato, presentasi seminar, siaran langsung TV, siaran langsung radio dan sebagainya. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah proses komunikasi dimana akan ada penundaan sampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Jenis komunikasi ini merupakan sebagian komunikasi bermedia. Adanya media butuh tenggang waktu tertentu untuk sampainya pesan. Contoh: komunikasi lewat surat, lewat kurir, siaran ulang di TV, siaran tunda di radio, buku, folder, koran, majalah dan sebagainya.

Ada sebagian pandangan, menganggap sama antara komunikasi langsung dengan komunikasi tanpa media, dan antara komunikasi tak langsung dengan komunikasi bermedia. Padahal dasar klasifikasinya sudah berbeda. Misalnya dalam komunikasi bermedia sendiri ada yang langsung dan ada yang siaran tunda. Dengan uraian pembedaan antara klasifikasi komunikasi atas dasar penggunaan media dengan klasifikasi atas dasar tertunda tidaknya dalam penyampaian pesan diatas, maka menjadi lebih jelas.

4. Klasifikasi Komunikasi Berdasarkan Saluran (Indera Penerima)

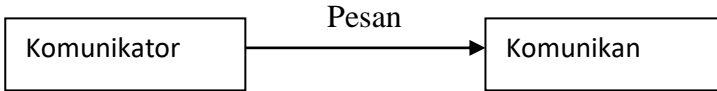
Berdasarkan saluran komunikasi anatau indera penerima dibedakan menjadi: a) komunikasi visual, b) komunikasi audio, c) komunikasi taktil, d) komunikasi gustatif, e) komunikasi alfaktoris, dan f) komunikasi audio visual (kombinasi beberapa indera penerima).

Komunikasi visual merupakan proses komunikasi yang dalam penerimaan pesannya menggunakan lambang-lambang yang dapat dilihat. Misalnya komunikasi melalui media cetak (seperti majalah, koran, buku, journal, dll), slide, film tanpa suara, internet, faksimili, email, telegram, dan sebagainya. Komunikasi audio adalah komunikasi yang dalam penerimaan pesannya lebih menekankan indera telinga (dengan suara). Contoh: tape recorder, radio, telepon, dll. Komunikasi taktil

adalah komunikasi yang terjadi, dimana pesan diterima melalui indera perabaan (kulit), Contoh: komunikasi intrapersonal seorang tuna netra yang sedang membaca huruf brailer; pelukan antara dua orang sebagai ungkapan rasa bahagia atau rasa sedih. Sedangkan komunikasi gustatif adalah komunikasi yang dalam penerimaan pesannya menggunakan indera pengecap (lidah). Contoh: komunikasi intrapersonal dari seorang juri yang sedang mengenali kelezatan suatu masakan. Dan komunikasi alfaktorik adalah suatu bentuk komunikasi dimana dalam penerimaan pesannya menggunakan indera pembau (penciuman). Misalnya dalam komunikasi intrapersonal untuk memilih dan mengenali berbagai jenis masakan, buah-buahan yang dianggap enak/lezat.

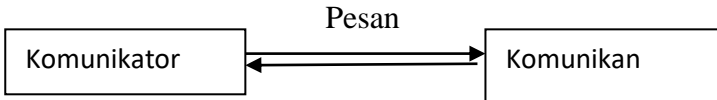
5. Klasifikasi Komunikasi Berdasarkan arah pesan

Berdasarkan arah pesannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi: komunikasi searah/satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi banyak arah. Komunikasi searah adalah bentuk komunikasi dimana pesan hanya berjalan dari sumber kepada penerima pesan. Contoh dari komunikasi bentuk ini adalah: seorang khotib yang sedang berkotbah, seorang change agent yang sedang ceramah di depan masyarakat tani di pendopo kecamatan, seorang rektor yang sedang memberikan pidato milad di hadapan civitas akademika, dan sebagainya. Ciri dari komunikasi searah antara lain, komunikator bersifat aktif (menyampaikan pesan); komunikan bersifat pasif (hanya mendengarkan dan atau melihat, tidak memberikan feedback); pesan jelas berjalan satu arah (dari komunikator kepada komunikan); saluran bisa bermedia maupun tanpa media; feedback tidak dapat diketahui (karena tidak ada feedback secara jelas); konsekuensinya keberhasilan komunikasi menjadi sulit diukur. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1. Komunikasi Satu Arah

Komunikasi dua arah adalah suatu bentuk komunikasi dimana suatu pesan bisa mengalir dari komunikator kepada komunikan, maupun sebaliknya dari komunikan kepada komunikator karena adanya feedback. Ciriya komunikator dan komunikan bersifat aktif (sama-sama mengirim dan menerima pesan), feedback diketahui, keberhasilan komunikasi lebih terukur, jumlah komunikan bisa tunggal maupun banyak, mempunyai potensi “konflik” (pandangan berbeda). Digambarkan sebagai berikut:



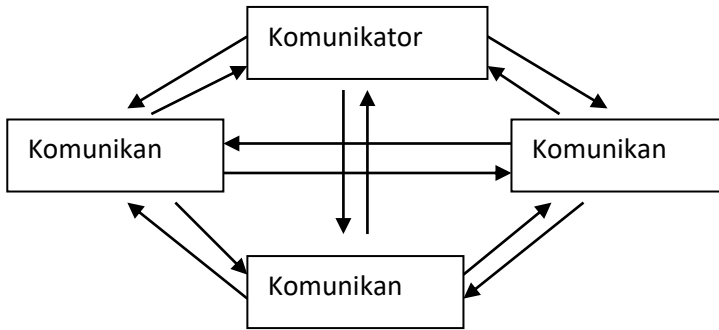
Gambar II.1. Komunikasi Dua Arah

Komunikasi banyak arah adalah suatu bentuk komunikasi, dimana pesan dapat mengalir dari komunikator kepada komunikan dan sebaliknya, juga secara timbal balik dinantara peserta komunikasi itu sendiri.

Ciri dari komunikasi banyak arah adalah semua pihak yang terlibat (komunikator dan komunikan) dalam proses komunikasi bersifat aktif untuk saling mengirim dan menerima pesan; sehingga pesan akan mengalir dari komunikator kepada komunikan dan sebaliknya dan juga diantara komunikan itu sendiri; feed back lebih jelas (*full feedback*); keberhasilan komunikasi dapat dilihat secara lebih jelas lagi; potensi adanya “konflik” sangat besar; jumlah komunikan bisa beberapa atau banyak; umumnya terjadi pada komunikasi kelompok. Hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi banyak arah, agar

proses komunikasi berjalan efektif dan produktif hendaknya ada salah yang cukup kredibel terhadap suatu pesan yang sedang didiskusikan atau ada salah seorang yang ditunjuk/memposisikan diri sebagai nara sumber.

Contohnya diskusi antara guru dengan sejumlah muridnya; atau diskusi antara penyuluh, kontak tani dan sejumlah petani. Digambarkan sebagai berikut.



Gambar II.3. Komunikasi Banyak Arah

Masing-masing bentuk komunikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan dalam aplikasinya. Hal ini digunakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi, juga tidak terlepas dari tujuan komunikasi yang dikehendaki.

6. Klasifikasi Komunikasi Berdasarkan Kode yang Digunakan

Berdasarkan penggunaan kode dalam penyampaian pesan, dikenal adanya komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal adalah suatu bentuk komunikasi dimana dalam penyampaian pesannya menggunakan kode/lambang bahasa, baik berupa seorang bahasa tulis maupun bahasa lisan. Hal yang menjadi penting di dalam komunikasi verbal adalah adanya "*kesamaan makna*" dalam menggunakan lambang bahasa tersebut. Sehingga ada berbagai

aspek perlu diperhatikan, agar lambang bahasa yang digunakan dapat dimaknai secara sama oleh orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Aspek perbedaan budaya, status sosial, *field of experience* (pengalaman lapang) atau *frame of reference* (kerangka referensi), konsep *in-group* dan *out-group*, tingkat pendidikan yang berbeda, perbedaan umur, ataupun latar belakang kehidupan yang lainnya dan sebagainya dapat menyebabkan suatu lambang bahasa diberi arti secara berbeda. Dengan demikian agar proses komunikasi verbal yang dibangun cukup efektif, seorang komunikator haruslah memahami berbagai hal tersebut dari komunikannya.

Sedangkan komunikasi non verbal adalah suatu bentuk komunikasi dimana dalam penyampaian pesan menggunakan lambang selain bahasa. Kode/lambang yang bisa digunakan dalam komunikasi non verbal antara lain adalah: 1) para bahasa, 2) bahasa tanda (*sign language*), 3) bahasa perbuatan (*action language*) dan 4) bahasa objek (*object language*).

Para bahasa adalah lambang/kode yang menyertai lambang bahasa, baik lisan maupun tertulis. Komunikasi non verbal ini sebagai contohnya adalah nada suara; lagu kalimat; tekanan kata; saat berhenti pada kalimat; dan sebagainya. Bahasa tanda yang dimaksud adalah lambang dalam penyampaian pesan yang berupa isyarat tertentu yang menggantikan lambang bahasa. Contoh komunikasi non verbal yang ini adalah isyarat memanggil teman dengan siulan; isyarat berkomunikasi dengan tuna rungu; isyarat mengajak pergi dengan melambaikan tangan; isyarat rasa jengkel dengan mengepalkan tangan; isyarat menghentikan kegaduhan dengan meletakkan jari telunjuk ke mulut; dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud bahasa perbuatan adalah lambang yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang berupa aktivitas tertentu. Bahasa perbuatan ini hampir mirip dengan bahasa tanda. Contoh dari komunikasi non verbal yang ini adalah perbuatan keluar ruang yang berarti tidak setuju

terhadap putusan rapat; tindakan tidak masuk kelas dari sekelompok mahasiswa sebagai ungkapan terhadap dosennya; dan sebagainya. Bahasa objek yang dimaksud adalah kode untuk menyampaikan pesan komunikasi dengan cara menampilkan benda-benda tertentu. Contohnya mengenakan baju hitam dengan maksud untuk ikut bela sungkawa; membawa vas bunga untuk ungkapan rasa gembira atas keberhasilan teman; mengenakan baju safari memberi identitas bahwa dirinya seorang pejabat; dan sebagainya.

7. Klasifikasi Komunikasi Berdasarkan Bidang Kajian

Berdasarkan bidang kajian dikenal adanya komunikasi politik, komunikasi islami, komunikasi lintas budaya, komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, komunikasi kedokteran, komunikasi kesehatan, psikologi komunikasi, komunikasi industri, komunikasi perusahaan, komunikasi pertanian, komunikasi pembangunan, dan sebagainya termasuk komunikasi pemberdayaan masyarakat yang dikaji dalam tulisan ini.

D. Model Komunikasi

Pengertian Model

Model merupakan visualisasi unsur-unsur yang terdapat dalam proses komunikasi, sehingga dapat ditunjukkan hubungan antar unsur-unsur tersebut. Menurut Sereno dan Mortensen (Mulyana, 2000) suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Suatu model mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan cincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata.

Menurut Severin dan Tankard (Mulyana, 2000), model membantu merumuskan suatu teori dan menyarankan hubungan. Model merupakan teori yang disederhanakan. Oleh karena hubungan antara model dengan teori begitu erat, model sering dicampuradukkan dengan teori. Ketika seseorang

menyebut model, tidak lain maksudnya adalah teori, dan sebaliknya. Sebab, ketika memilih unsur-unsur tertentu yang dimasukkan dalam model, suatu model mengimplikasikan penilaian atas relevansi, dan ini pada gilirannya mengimplikasikan suatu teori mengenai fenomena yang diteorikan. Model dapat berfungsi sebagai basis bagi suatu teori yang lebih kompleks, alat untuk memperjelas teori dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki konsep-konsep.

1. Fungsi Model

Wiseman dan Barker (Mulyana, 2000) bahwa model komunikasi mempunyai 3 fungsi, yakni: 1) melukiskan suatu proses komunikasi yang terjadi, 2) menunjukkan hubungan visual antar variabel yang ada dan 3) membantu dalam menemukan dan memperbaiki jika terjadi kemacetan komunikasi. Masih dalam buku yang sama, Deutsch menyebutkan bahwa model komunikasi mempunyai 4 fungsi, yakni: 1) mengorganisasikan (kemiripan data dan hubungan) yang tadinya tidak teramati; 2) heuristik (menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui); 3) prediktif, yaitu memungkinkan melakukan peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak hingga kuantitatif yang berkenaan dengan kapan dan berapa banyak; 4) pengukuran, yang dimaksud adalah mengukur fenomena yang diprediksi.

Selanjutnya Bross mengungkapkan beberapa keuntungan model, yakni: 1) model menyediakan kerangka rujukan untuk memikirkan masalah, bila model awal tidak berhasil memprediksi, 2) terbukanya problem abstraksi, pembuat model harus memutuskan ciri-ciri apa dari dunia nyata, misalnya dari fenomena komunikasi yang akan dimasukkan ke dalam sebuah model.

2. Mengenal Beberapa Model Komunikasi

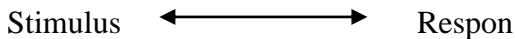
Sebelum mengenal beberapa model-model komunikasi, nampaknya perlu diungkapkan berbagai tipologi model. Ada

beberapa tipologi model (Hanneman dan McEwen dalam Mulyana, 2000): 1) model mental, yang mempresentasikan proses mental internal; 2) model simbolik, terdiri dari model matematik (misalnya: $E= mc^2$) dan model verbal; serta 3) model fisik, terdiri dari model ikonik dan model analog. Model-model yang banyak diungkapkan dalam ilmu komunikasi adalah model verbal. Model verbal adalah model atau teori yang dinyatakan dengan kata-kata, meskipun bentuknya sangat sederhana. Misalnya model S-R, model komunikasi dari Aristoteles, model SMCR dari David K. Berlo, dan sebagainya.

Teori komunikasi telah begitu banyak berkembang, sehingga model-model komunikasi yang adapun juga berkembang. Mc Quail dan Windahl (1981) mengungkapkan adanya berbagai pengelompokan model-model komunikasi, seperti adanya model dasar, model-model yang berpusat pada audiens/khalayak, dan sebagainya. Ada sejumlah model komunikasi yang dipandang penting, yang barangkali perlu diungkapkan dalam tulisan ini.

a. Model S – R

Model stimulus-respon (S – R) merupakan model komunikasi yang paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh disiplin ilmu psikologi, khususnya aliran behavioristik. Model ini menggambarkan hubungan stimulus – respon.



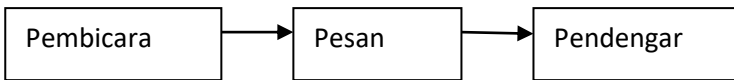
Gambar II.4. Model S – R

Model ini menunjukkan komunikasi sebagai proses “aksi-reaksi” yang sangat sederhana. Model S – R mengasumsikan bahwa kata-kata verbal (lisan, tulisan), isyarat non verbal, gambar-gambar dan tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Ilustrasi, ada seorang lelaki mengerdipkan mata pada

seorang wanita maka salah satu reaksinya adalah bahwa wanita tersebut tersipu malu; atau seseorang tersenyum pada orang lain, yang kemudian disambut senyuman pula, dan sebagainya. Dalam proses ini terjadi pertukaran atau pemindahan informasi, timbal balik dan mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi berikutnya.

b. Model Aristoteles

Model Aristoteles merupakan model yang paling klasik dan sering disebut model retorik (*rhetorical model*). Ia berjasa dalam merumuskan model komunikasi verbal yang pertama. Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya merubah sikap mereka. Tepatnya, ia mengungkapkan 3 unsur dasar proses komunikasi, yakni pembicara (*speaker*), pesan (*message*) dan pendengar (*listener*).



Gambar II.5. Model Aristoteles

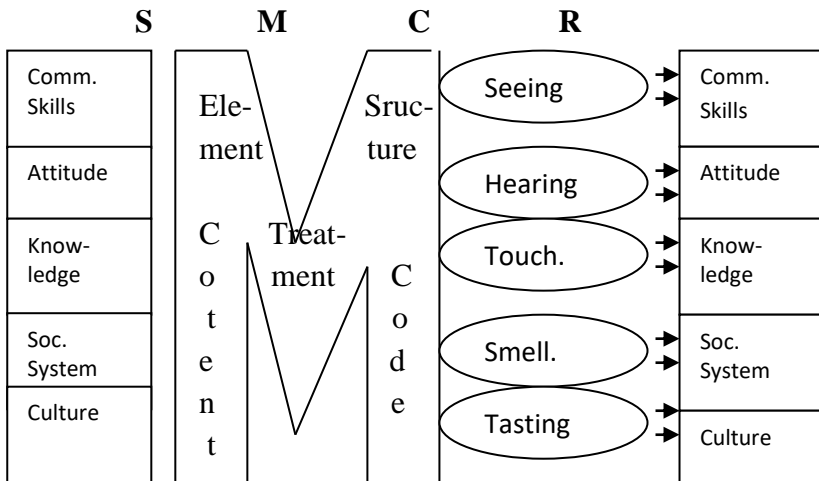
Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles merupakan komunikasi retorika, yang kini lebih dikenal sebagai komunikasi publik (*public speaking*) atau pidato. Model ini telah mengilhami pakar-pakar komunikasi yang lain untuk merancang model-model komunikasi yang lebih baru dan lebih sempurna sesuai dengan kebutuhannya.

Kelemahan model ini adalah bahwa komunikasi dianggap fenomena yang statis. Seorang pembicara, pesannya berjalan kepada khalayak, dan khalayak mendengarkan. Model ini berfokus pada komunikasi yang disengaja terjadi ketika seseorang berusaha membujuk orang lain untuk menerima

pendapatnya. Kelemahan lain model ini, yaitu tidak membahas aspek non verbal dalam persuasi (membujuk).

c. Model SMCR

Model komunikasi SMCR diungkapkan oleh David K. Berlo pada tahun 1960. SMCR kepanjangan dari *Source*, *Message*, *Channel* dan *Receiver*. Sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik oleh seseorang atau sekelompok orang. Pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam suatu kode simbolik, berupa bahasa/isyarat. Saluran adalah medium yang membawa pesan dan penerima adalah sasaran komunikasi.



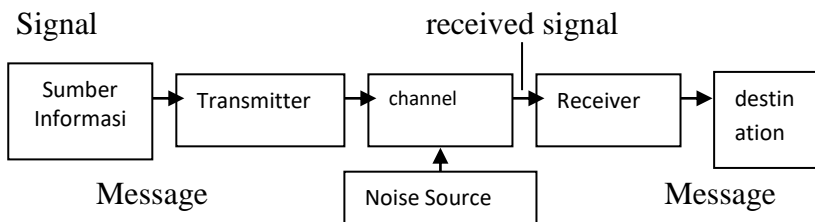
Gambar II. 6. Model Berlo

Menurut Berlo, Sumber dan Penerima pesan dipengaruhi oleh faktor-faktor ketrampilan berkomunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial dan budaya. Pesan dikembangkan berdasarkan unsur, struktur, isi, perlakuan dan kode. Saluran berkaitan dengan panca indera: melihat, mendengar, menyentuh, membau dan mencicipi. Berlo juga

mengungkapkan adanya kebutuhan penyandi (*encoder*) dan penyandi balik (*decoder*).

d. Model Shannon dan Weaver

Model ini merupakan model komunikasi searah, tidak menjelaskan bagaimana sistem feedback berfungsi. Ia diilhami dalam konteks komunikasi bermedia, yakni komunikasi massa yang pesan komunikasinya cenderung berjalan secara searah khususnya komunikasi dengan media elektronika (seperti komunikasi radio). Shannon dan Weaver mengasumsikan sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Pemancar (*transmitter*) mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran adalah medium yang mengirimkan sinyal (tanda) dari *transmitter* ke penerima.

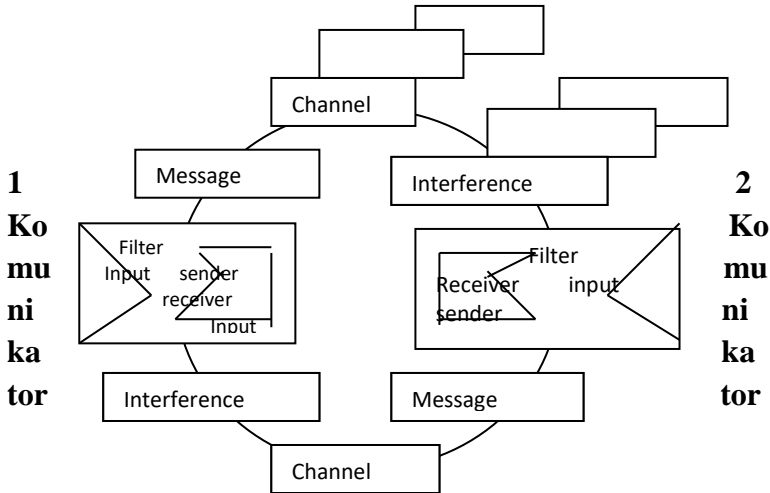


Gambar II.7. Model Komunikasi Shannon dan Weaver

Dalam komunikasi oral(*speech communication*), sumber informasi adalah otak, transmiternya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal (kata-kata terucap), yang ditransmisikan lewat udara (sebagai saluran). Penerima yakni mekanisme pendengaran, melakukan operasi yang sebaliknya, dilakukan *transmitter* dengan merekonstruksi pesan dari sinyal. Sasaran adalah otak orang yang menjadi tujuan pesan itu.

e. Model Stewart L Tubb dan Sylvia Moss

Model komunikasi ini merupakan komunikasi interaktif. Dimana masing-masing individu berperan sebagai komunikator (komunikator 1 dan 2), yakni masing-masing berfungsi untuk mengirim pesan (*sender*) juga sekaligus sebagai penerima pesan (*receiver*). Dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan terjadi proses penyaringan pesan (*filter*).

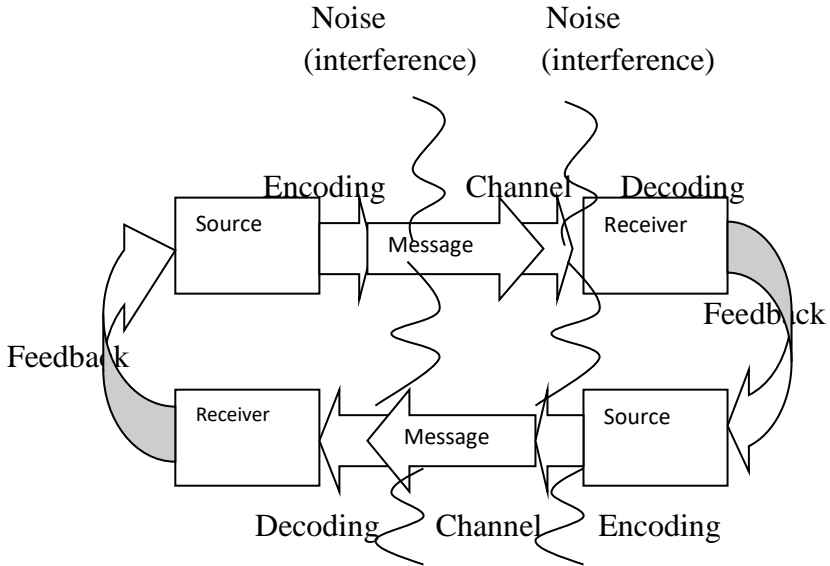


Gambar II.8. Model Stewart L Tubbs dan Sylvia Moss

Proses pengiriman dan penerimaan pesan terjadi berulang-ulang. Bayangan yang ada di belakang model menunjukkan bahwa proses pengiriman dan penerimaan tidak terjadi sekali, tetapi berkali-kali sehingga diperoleh pemahaman atau kesepakatan bersama atau dalam rentang waktu tertentu sesuai yang diinginkan kedua komunikator. Contoh dari model ini misalnya diskusi antara dua orang mahasiswa yang sedang membahas tentang suatu mata kuliah tertentu.

f. Model Komunikasi Joseph R Dominick

Dominick (1990) secara lengkap mengungkapkan berbagai unsur komunikasi yang dituangkan dalam sebuah model komunikasi seperti yang tersaji pada gambar II.9.



Gambar II.9. Model Komunikasi Joseph R. Dominick

Mirip dengan model komunikasi dengan yang diungkapkan oleh Stewart L Tubb dan Sylvia Moss. Bedanya dalam model komunikasi Dominick secara eksplisit mengungkapkan adanya feedback. Selanjutnya modelnya Tubb dan Moss secara eksplisit memunculkan konsep input baik terjadi pada komunikator 1 maupun 2. Konsep input memberikan makna bahwa dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan antara komunikator pertama dan kedua tidak lepas dari proses berpikir. Sehingga memunculkan berbagai gagasan, ide, atau masukan-masukan. Sementara untuk model Dominick tidak demikian.

E. Komunikasi Efektif

komunikasi efektif merupakan proses penyampaian pesan dari pihak satu kepada pihak lain dimana makna suatu pesan dalam komunikasi tersebut dapat ditangkap dan dipahami seperti apa yang dimaksud oleh pengirim pesan. Stewart L. Tubb dan Sylvia Moss (1994) membuat rumusan matematis sebagai berikut:

$$EC : \frac{RM}{SM} = 1$$

Dimana, EC :komunikasi efektif (*effective communication*)

RM :makna pesan yang ditangkap oleh penerima pesan (*receiver's meaning*)

SM :makna pesan yang disampaikan oleh sumber pesan (*sourcer's meaning*)

Berdasarkan rumusan matematis tersebut jelas bahwa suatu proses komunikasi dikatakan betul-betul efektif apabila makna pesan yang dipahami oleh penerima pesan sama persis dengan apa yang dimaksud oleh pengirim pesan. Di sini tidak terjadi sedikitpun kesalahan, kekeliruan ataupun perbedaan penafsiran pesan antara yang diterima dengan yang dikirim. Dalam perkembangannya definisi komunikasi efektif menjadi begitu beragam sesuai dengan kepentingan penulisnya tanpa harus menyimpang pemahamannya dari pengertian dasarnya. Ada yang memberi definisi komunikasi efektif adalah proses komunikasi dimana pesan dipahami secara baik oleh penerimanya. Definisi lain, komunikasi efektif adalah proses komunikasi dimana dicapai keadaan bahwa komunikan dapat menangkap pesan, memahami, mengerti ataupun melaksanakannya sesuai yang dikehendaki (Moss dan Tubb).

Hal yang menjadi pertanyaan menarik adalah kapan komunikasi efektif itu dapat dicapai. Dan bagaimana upaya yang harus dilakukan agar komunikasi efektif bisa terwujud.

Mengingat beragamnya permasalahan kehidupan manusia, dengan tingkat kerumitan yang beraneka ragam pula, maka jawaban terhadap pertanyaan tersebut haruslah bersifat kontekstual, yang tergantung pada masalah apa yang sedang dihadapi dan ingin dipecahkan. Untuk pesan-pesan sederhana seperti permintaan seorang ibu minta tolong pada putrinya untuk berbelanja beras dan sayuran ke warung tetangga, tentu akan sangat berbeda dengan bagaimana suatu pesan atau program pembangunan pertanian harus disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Semakin kompleks proses komunikasi yang terjadi, semakin kompleks pula variabel yang harus di analisis agar suatu proses komunikasi dapat berjalan efektif. Riyanto (1995) mengungkapkan prinsip dan teknik berbicara efektif. Menurutnya ada beberapa prinsip berbicara efektif yang perlu diperhatikan, yakni: motivasi dalam komunikasi, perhatian dan keinderaan dalam komunikasi.

Motif berbicara. Sudah diketahui bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki motif dan berbeda-beda antara yang satu yang yang lain. Dalam berbicarapun seseorang mempunyai motif tertentu. Sebelum berbicara perlu ditanyakan terlebih dahulu: apa yang akan dibicarakan (menyangkut isi pesan), dengan siapa kita berbicara (menyangkut masalah komunikasi), bagaimana kita berbicara, dimana kita bicara, mengapa mebicarakannya. Berkaitan dengan berbagai pertanyaan tersebut maka seorang komunikator hendaknya mampu meningkatkan motivasi, meluruskan motivasi, menjaga motivasi, dan sebagainya agar tetap dalam kondisi baik, walaupun motivasinya berbeda-beda.

*Prinsip perhatian.*perhatian dapat diartikan sebagai minat seseorang terhadap sesuatu seorang komunikator harus mampu menjadikan informasinya sebagai hal yang diminati khalayaknya. *Prinsip keinderaan.* Artinya bahwa dalam berbicara hendaknya menggunakan alat bantu atau fasilitas yang melibatkan penggunaan semua alat indera manusia (panca

indera). Semakin banyak alat indera audien yang terlibat, proses komunikasi akan berjalan secara lebih efektif.

Sedangkan teknik berbicara efektif, dapat ditempuh dengan cara mengutarakan dorongan kebutuhan, menghargai audien, dan memanfaatkan naluri ingin tahu. Kebutuhan merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan atau berbuat sesuatu. Kebutuhan manusia banyak dan beraneka macam, namun secara garis besar dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Komunikasi akan berjalan efektif apabila komunikator mampu membangkitkan rasa membutuhkan pada diri khalayaknya. Untuk itu informasi yang diberikan haruslah informasi yang menjadi kebutuhan khalayak baik yang dirasakan maupun yang riil dibutuhkan sasaran tersebut. Dengan penghargaan kepada audiennya, maka iapun akan menghargai komunikator. Untuk itu pembicara haruslah memiliki kepribadian yang menarik, menyenangkan, *emphaty*, dan sebagainya. Komunikator seharusnya juga bisa membangkitkan dan mencoba untuk mengembangkan rasa ingin tahu khalayaknya.

F. Perspektif Komunikasi

Proses komunikasi antar manusia dapat ditinjau berdasarkan beberapa perspektif. Perspektif adalah cara pandang seseorang dalam melihat suatu objek permasalahan. Proses komunikasi sebagai objek permasalahan setidaknya dapat dilihat berdasarkan 3 perspektif, yakni:

1. Model komunikasi linier (*one-way communication*).
Yakni proses komunikasi dipandang sebagai suatu proses yang linear. Pesan dalam proses komunikasi mengalir secara searah dari komunikator ke komunikan dan tidak ada umpan balik (searah). Bentuk komunikasi ini bisa terjadi pada banyak peristiwa, seperti khotib yang sedang berkhotbah, banyak kasus dalam komunikasi melalui media massa, pidato yang tidak membuka sesi tanya jawab, dan sebagainya.

2. Model komunikasi interaksional. Yakni persepektif komunikasi, dimana ada salah satu pihak yang lebih memiliki peranan sebagai komunikator dan di pihak lain ada yang berperanan sebagai komunikan. Komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan melakukan respon atau umpan balik. Seperti memberikan feedback karena ada bagian yang belum difahami untuk meminta penjelasan. Komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog, pada satu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan. Namun tetap ada kejelasan siapa yang berperan sebagai sumber dan penerima pesan.

3. Model komunikasi transaksional. Yakni perspektif komunikasi, dimana kedua belagh pihak sama-sama berperan sebagai komunikator dan sekaligus berperan komunikan. Ciri yang nampak jelas adalah pesan yang mengalir ditransaksikan oleh kedua belah pihak. Masing-masing pihak meemiliki bargaining position yang relatuf seimbang dalam mengatur pesan. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan.

BAB III.
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

A. Konsep Komunikasi Pembangunan

Istilah pembangunan dalam pandangan tradisional diidentikkan dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita di Negara sedang berkembang. Hal ini di dasarkan pada anggapan semula banyak orang bahwa yang membedakan antara negara maju dengan negara sedang berkembang adalah pendapatan rakyatnya. Peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan (seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan) yang dihadapi oleh negara sedang berkembang melalui apa yang dikenal dengan *trickle down effect* (dampak merembes ke bawah). Indikator keberhasilan pembangunan semata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional (GNP) perkapita riil. Kecenderungan pemikiran tersebut terlihat dari pemikiran-pemikiran awal mengenai pembangunan, seperti teori Harrod Domar, Arthur Lewis, WW Rostow, Hirschman, Rosenstein Rodan, Nurkse, Leibenstein (Mudrajat Kuncoro, 2006: 9).

Sejumlah negara berkembang mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi (melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan) dibarengi dengan masalah pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang dan ketidakseimbangan struktural, yang terjadi pada akhir dasa warsa 60-an. Paradigma baru mengenai pembangunan mulai bermunculan. Myrdal dalam Mudrajat Kuncoro (2006: 11) misalnya, mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (*growth with change*), terutama perubahan nilai kelembagaan.

Everett M. Rogers (1976:2) mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan yang berguna menuju suatu system social dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Sitem sosial memiliki bobot yang sama pentingnya

dengan perbaikan sistem ekonomi. Meier (Mudrajad Kuncoro 2006: 11) lebih khusus mengatakan:

”..... perhaps the definition that would now gain widest approval is one that defines economic development as the process whereby the real percapita income of a country increases over a long period of time- subject to the stipulation that the number of people below an ‘absolute poverty line’ does not increase, and that the distribution of income does not more unequal”.

Pembangunan tidak lagi mengagungkan atau memuja pertumbuhan pendapatan nasional (GNP) sebagai sasaran pembangunan, tetapi lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Bahkan pada tahun 1973, Dudley Seers mengungkapkan pengertian pembangunan dengan menunjuk pada tiga sasaran utamanya, yakni mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Banyak orang memandang bahwa definisinya dalam kerangka meredefinisi pembangunan dalam konteks tujuan sosial.

Berbagai fakta empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak mempertimbangkan faktor sosial budaya, tidak menjamin terwujudnya pemerataan hasil pembangunan dengan baik. Dokumen Dudley Seers (dalam Sumadi Dilla, 2007: 94-95) menyebutkan beberapa alasan lemahnya aspek sosial budaya dan pemerataan hasil pembangunan sebagai berikut:

1. Masalah sosial pada pembangunan nasional, perhatiannya hanya mengenai nilai lingkungan yang berkaitan dengan pertumbuhan.
2. Adanya kesenjangan pendapatan perkapita antara dua blok yang sedang berkembang.
3. Pertumbuhan sebagai definisi pembangunan tidak mencapai status politik atau kesetaraan seperti yang diharapkan.
4. Ketidakadilan pendapatan muncul di hampir semua negara ketiga.

5. Angka pengangguran yang diakibatkan upaya menolak kembali pada penekanan angka pertumbuhan.
6. Kekuasaan dikonsentrasikan di antara elit saja, karenanya mereka merasa diuntungkan dengan adanya pertumbuhan.

Terkait dengan berbagai kelemahan dan kekurangan dari model pembangunan ekonomi yang ada, Todaro (dalam Sumadi Dilla, 2007: 103-104) menawarkan agar sistem ekonomi di analisis dan didudukkan pada konteks sistem sosial secara keseluruhan di suatu negara, juga dalam konteks global.

Pemahaman akhir dari pembangunan (paradigma baru pembangunan) adalah apa yang disebut sebagai pembangunan yang berpusat pada rakyat. Ginanjar Kartasasmita (1996) menyebutnya sebagai pemberdayaan masyarakat, yang dipandang sebagai strategi pembangunan yang berakar kerakyatan. Ada yang menyebutnya konsep pembangunan model partisipasif, yakni suatu pandangan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat, yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik (Sumadi Dilla, 2007: 104). Paradigma ini melihat bahwa hakekat pembangunan adalah dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, dalam upaya mencapai sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan akhirnya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat.

Penghujung tahun 60-an, di kalangan ilmu komunikasi telah berkembang spesialisasi mengenai penerapan teori dan konsep komunikasi secara khusus untuk keperluan pelaksanaan program pembangunan. Pengkhususan itu dikenal *komunikasi pembangunan*. Sementara di University of Philippine, Los Banos; yang dipandang sebagai cikal bakal tumbuhnya komunikasi pembangunan adalah disiplin ilmu *komunikasi pertanian* (Nasution, 1996: 1-2).

Kehadiran komunikasi pembangunan dapat dipandang sebagai suatu perwujudan respon kalangan disiplin komunikasi untuk menyumbang dan menerapkan ilmunya, dalam rangka

ikut ambil bagian menjawab tantangan dan tuntutan pembangunan. Pada hakekatnya perbedaan lahiriah antara kegiatan komunikasi pembangunan dengan yang “bukan komunikasi pembangunan” nyaris tidak kelihatan. Menurut Nasution (1996: 5) disebut sebagai komunikasi pembangunan apabila sudah benar-benar dikaitkan dengan tujuan suatu proyek pembangunan secara khusus atau dan program-program pembangunan nasional secara keseluruhan.

Ada beberapa konsep dalam komunikasi pembangunan (KP) atau *Development Communication* yang perlu diungkap pada kajian ini diantaranya; peliputan pembangunan (*development reporting*), jurnalisme pembangunan (JP) atau *Journalism of Development*, komunikasi pendukung pembangunan (KPP) atau *development support communication*, periklanan pembangunan (*development advertising*), serta penyuluhan khususnya penyuluhan pertanian (*agricultural extension*). Konsep ini dalam praktek memiliki peran masing-masing di dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Sebelum menjelaskan tentang komunikasi pembangunan lebih lanjut, terlebih dahulu perlu diungkap beberapa konsep tersebut.

1. Jurnalisme Pembangunan

Konsep JP mulai diperkenalkan berawal pada pemikiran bagaimana menemukan rumusan komunikasi yang cepat, murah, dan massal bagi tujuan pembangunan. JP pada saat itu (1968) ditekankan pada perannya untuk teknik penulisan yang jelas dan memiliki fungsi jurnalisme dalam pembangunan ekonomi Asia. Lahirnya konsep JP di dorong oleh para praktisi berlatar belakang wartawan, dengan memanfaatkan potensi media dalam kegiatan pembangunan. Menurut Aggarwala (dalam Nasution, 1996: 3) dalam meliput berita, jurnalis pembangunan (JP) dapat dan harus secara kritis mengkaji, mengevaluasi, dan memberikan:

- a. Relevansi suatu proyek pembangunan dengan kebutuhan nasional, dan yang terpenting dengan kebutuhan lokal
- b. Perbedaan antara program menurut rencananya dengan yang di implementasikan
- c. Perbedaan antara dampaknya terhadap masyarakat seperti yang diklaim oleh pejabat pemerintah dan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Peliputan Pembangunan

Development reporting atau peliputan pembangunan muncul (di penghujung tahun 60-an) didasarkan pada keinginan untuk melaksanakan kebijakan pemberitaan yakni suatu kegiatan yang mendukung untuk meliput berbagai informasi atau peristiwa yang terkait dengan kegiatan pembangunan. Para pelopor / jurnalis yang peduli terhadap *development reporting* tersebut mendapat sebutan (dengan istilah) jurnalisme pembangunan. Setelah beberapa aktivitas yang diprakarsai oleh Juan Mercado (direktur Phillipine Press Institute), maka pada tahun 1967 didirikanlah *Press Foundation of Asia* yang mempromosikan jurnalisme pembangunan melalui sebuah kantor berita Depth news. Pada tahun 1968, Press Foundation of Asia menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan *development reporting* ini, yakni “ kursus latihan penulis ekonomi se Asia yang pertama kali. Dari hasil latihan tersebut perlu adanya penekanan bagi jurnalisme pembangunan di dalam melakukan *development reporting*, yakni tentang pentingnya materi pembangunan ekonomi di Asia dan teknik penulisan yang jelas.

3. Komunikasi Pendukung Pembangunan

Development support communication (KPP) bersumber dari kalangan badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) : United National Development Programme (UNDP) di Bangkok. Komunikasi penunjang pembangunan dirancang oleh

Erskine Childers untuk menunjang berbagai proyek pembangunan melalui program UNDP. Berdasarkan asal-usul istilah, menurut Gercelea komunikasi penunjang pembangunan disebut juga komunikasi penyuluhan/ komunikasi pertanian, yaitu komunikasi yang ditujukan untuk menunjang pembangunan nasional dan local, khususnya di negara-negara berkembang. *Development support communication* adalah penggunaan yang berencana sumber-sumber informasi dan komunikasi (tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan media) oleh organisasi untuk mencapai tujuan (Sumadi Dilla, 2007).

4. Periklanan Pembangunan

Istilah *development advertising* (periklanan pembangunan) diajukan relative belakangan. Kegiatan inilah yang kemudian meluas dan dicakup dalam konsep dan praktek komunikasi pembangunan seperti yang berkembang pada masa sekarang ini. Konsep *development advertising*, merujuk pada pengertian tindakan-tindakan promosi yang dilakukan pemerintah dan pihak lain dalam mempengaruhi masyarakat agar tergerak dan terlibat/berpartisipasi sesuai pesan yang dimuat dalam iklan tersebut.

Komunikasi pembangunan (KP) pertama kali dikenalkan oleh Lerner pada tahun 1958 dan konsep KP memiliki ideologi sebagai berikut:

- a. Esensi pembangunan adalah pemaksimalan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat.
- b. Dunia maju dan berkembang dibedakan oleh barang dan jasa
- c. Cara cepat dan efektif yang membawa perubahan kesadaran dilakukan melalui penggunaan teknologi yang berbasis komunikasi, terutama radio. Radio dan TV mampu menciptakan citra baru, mobilitas psikis dan empati (Sumadi Dilla, 2007: 8)

Menurut Quebral (Sumadi Dilla, 2007: 8-9), pembangunan bukan sekedar proses kuantitatif dan linier

dengan maksimalisasi barang dan jasa seperti analisis Lerner, melainkan membutuhkan juga distribusi produk ekonomi secara adil dan merata. Selanjutnya Quebral dan Gomez (dalam Nasution, 1996 : 128) menyatakan bahwa komunikasi pembangunan (KP) merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Masih dalam halaman sama, diungkapkan oleh Nasution, bahwa komunikasi pembangunan (KP) dimaksudkan secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi, dan itu berarti komunikasi yang akan menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Konsep KP di sini sangat sesuai untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat berdasarkan pemahaman pembangunan menurut pandangan Dudley Seers, yang sudah di bahas pada alinea di atas.

Mengingat bahwa kebanyakan yang menjadi pusat perhatian dari kajian pembangunan adalah negara-negara dunia ketiga (negara-negara berkembang) yang notabene adalah negara-negara agraris, maka terkait dengan itu muncullah konsep Komunikasi Pertanian, yakni mengkaji berbagai permasalahan komunikasi dalam pembangunan masyarakat pada bidang pertanian. Dapat dipandang bahwa komunikasi pertanian merupakan kajian terhadap berbagai persoalan komunikasi dalam pembangunan pertanian.

5. Penyuluhan Pertanian

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, dikenal adanya penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan sistem pendidikan di luar sekolah yang (terutama) dilakukan pemerintah untuk para petani dan keluarganya agar kemajuan-kemajuan dalam pembangunan pertanian lebih bisa tercapai.

Penyuluhan pertanian (*agricultural extension*) di Indonesia sebagai kegiatan formal ada semenjak didirikannya Kebun Raya Bogor oleh Reinwardt pada tahun 1817. Pada

tahun 1905 dibentuk *Departement van Landbouw*, diantaranya bertugas melaksanakan penyuluhan. Penyuluhan ditujukan untuk menyalurkan hasil-hasil penelitian, pembagian bibit unggul, dan mengajarkan cara-cara perlindungan tanaman. Tahun 1910 dibentuk *Landbouw voorlichtingdienst* (LVD) yang pelaksana penyuluhannya tetap dilakukan Pangreh Praja. Baru tahun 1921, penyuluhan dilakukan oleh aparat LVD dan ternyata memberi hasil baik. Akhirnya LVD dilepaskan dari Pangreh Praja dan dijadikan Dinas Propinsi yang secara teknis bertanggung jawab kepada *Departement van Landbouw* atau Departemen Pertanian. Kegiatan penyuluhan semakin berkembang dengan dibukanya sekolah-sekolah pertanian dan didirikannya AVB (*Algemene Volks Credietbank*) atau Bank Rakyat untuk menunjang pembiayaan pertanian. Pada era ini konsep penyuluhan pertanian lebih professional dengan tenaga penyuluh memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Dalam prakteknya system penyuluhan diterapkan secara “*olievleksystem*”, atau system tetesan minyak dengan pendekatan individual (Totok Mardikanto, 1993 : 166 – 167). Di era Orde Baru penyuluhan pertanian berperan sebagai ujung tombak dalam mensukseskan program-program pembangunan pertanian pemerintah. Di era reformasi dan otonomi daerah masih memiliki posisi dan peran penting bagi masyarakat tani.

B. Perspektif Komunikasi Pembangunan

1. Komunikasi Pembangunan dalam Perspektif Keilmuan

Sumadi Dilla (2007) setidaknya mengungkapkan dua perspektif dari komunikasi pembangunan, yakni perspektif psikologi dan perspektif ilmu komunikasi. Komunikasi pembangunan juga bisa dilihat dari perspektif sosiologi dan budaya. Hal mana dalam perspektif psikologis, Hegen (1962) dan McClelland (1961) melihat pembangunan dengan pendekatan psikologis interaksional. Selanjutnya dikatakan bahwa salah satu pandangan Hegen yang kuat kaitannya

dengan komunikasi dalam pembangunan adalah penekanan analisis yang lebih mendalam pada masalah efek komunikasi. Hegen melihat pentingnya keluarga, sebagai proses kunci suksesnya memotivasi bagi pembangunan yang diharapkan. Pandangan psikologi melihat pentingnya efek komunikasi sebagai akibat proses interaksi yang dilakukan melalui pesan-pesan komunikasi sehingga timbul efek berantai dari khalayak (Sumadi Dilla, 2007).

Perhatian yang sama juga dilakukan oleh Melvin De Fleur; ia katakan bahwa masalah yang penting dalam teori komunikasi kontemporer adalah bagaimana mengukur pengaruh (effect) komunikasi terhadap kehidupan masyarakat (Eduard Depari dan Colin MacAndrews, 1998). Fleur menguraikan usaha-usaha para ahli untuk mengukur pengaruh media terhadap pribadi maupun kelompok, serta adanya faktor yang memperkuat pengaruh (intervening factor) di antara media dengan audience. Ditunjukkan adanya empat jenis intervening variables di antara media dengan audience, yakni teori perbedaan individu, teori penggolongan sosial, teori hubungan sosial, dan teori norma budaya. Hal mana untuk teori perbedaan individu didasarkan pada ilmu psikologi, sedangkan tiga teori lainnya lebih didasarkan pada sosiologi dan budaya.

Teori perbedaan individu (*The Individual Differences Theory*) menyatakan bahwa setiap individu memiliki kepribadian masing-masing yang akan mempengaruhi perilaku mereka dalam menanggapi sesuatu. Teori ini mengakui adanya motivasi individu serta perbedaan-perbedaan pengalaman berdasarkan hasil belajar. Perbedaan individu terjadi disebabkan karena perbedaan lingkungan yang menghasilkan pula perbedaan pandangan dalam menghadapi sesuatu. Dari lingkungannya akan membentuk sikap, nilai-nilai dan kepercayaan yang mendasari kepribadian mereka. Atas dasar pengakuan bahwa tiap individu tidak sama perhatiannya (kepentingannya, kepercayaan, maupun nilai-nilainya) maka

dengan sendirinya selektivitas mereka terhadap komunikasi massa juga berbeda. Disimpulkan bahwa pengaruh media terhadap individu akan berbeda satu sama lain disebabkan adanya perbedaan (psikologi) antar individu.

Teori penggolongan sosial (*The Social Category Theory*) beranggapan bahwa terdapat penggolongan sosial yang luas dalam masyarakat yang memiliki perilaku yang kurang lebih sama terhadap rangsangan-rangsangan tertentu dari media. Penggolongan sosial bisa didasarkan atas seks, tingkat pendidikan, penghasilan, tempat tinggal, agama, profesi atau pekerjaan, dan sebagainya. Dinyatakan bahwa masyarakat yang memiliki sifat-sifat tertentu yang sama akan membentuk sikap yang sama dalam menghadapi rangsangan tertentu. Persamaan dalam orientasi serta sikap akan berpengaruh pula terhadap tanggapan mereka dalam menerima pesan komunikasi. Masyarakat yang memiliki orientasi yang sama akan memiliki isi komunikasi yang sama serta menanggapi isi komunikasi tersebut dengan cara yang sama.

Teori hubungan sosial (*The Social Relationship Theory*) menyatakan bahwa dalam menerima pesan-pesan komunikasi yang disampaikan oleh media, orang lebih banyak memperoleh pesan itu melalui hubungan dengan orang lain dari pada menerima langsung dari media massa. Hubungan sosial yang informal merupakan salah satu variabel yang turut menentukan besarnya pengaruh media. Pada banyak peristiwa terutama di negara-negara berkembang, kebanyakan petani memperoleh informasi pertanian, mengadopsi berbagai teknologi pertanian, dan cara-cara baru dalam berusaha justru dari interaksi sosial atau hubungan di antara mereka (anggota lain, tetangga, kerabat dekat, dan sebagainya) ataupun dengan tokoh-tokoh mereka (ketua kelompok tani, kontak tani, penyuluh pertanian di lapangan dan sebagainya) dari pada langsung membaca surat kabar, siaran radio ataupun media massa lainnya. Proses komunikasi terjadi melalui dua tahap;

pertama, informasi berkembang melalui media kepada individu-individu masyarakat yang relatif cukup informasi (*well informed*), yang umumnya memperoleh informasi langsung dari media. Kedua, informasi tersebut berkembang dari mereka yang cukup informasi melalui saluran komunikasi antarpribadi kepada individu-individu yang kurang memiliki akses/hubungan langsung dengan media serta ketergantungan mereka akan informasi kepada orang lain besar sekali. Hal yang mendapatkan perhatian penting dari teori ini adalah bagaimana peran orang yang cukup informasi, yang biasa disebut sebagai pemuka pendapat (*opinion leader*) sebagai kurir pesan-pesan komunikasi. Pemuka pendapat memiliki dua peran penting, yakni meneruskan informasi dan memberikan penafsiran (sebelum diteruskan ke petani di sekitarnya). Cara penafsiran pesan komunikasi ini kemudian berkembang menjadi pengaruh pribadi (*personal influence*) yang merupakan mekanisme penting yang berada diantara pesan-pesan komunikasi dengan tanggapan yang diberikan pada pesan-pesan komunikasi tersebut. Disimpulkan bahwa teori ini mencoba menekankan pentingnya variabel hubungan antarpribadi sebagai sumber informasi maupun sebagai penguat pengaruh media komunikasi.

Teori norma budaya (*The Cultural Norms Theory*) melihat cara-cara media massa mempengaruhi perilaku sebagai produk budaya. Teori ini menganggap bahwa media massa melalui pesan-pesan yang disampaikannya dengan cara-cara tertentu dapat menumbuhkan kesan-kesan yang oleh audience disesuaikan dengan norma-norma budayanya. Perilaku individu umumnya didasarkan pada norma-norma budaya yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapinya, dalam hal ini media akan bekerja secara tidak langsung untuk mempengaruhi sikap individu tersebut. Setidaknya ada tiga cara yang dapat ditempuh oleh media untuk mempengaruhi norma-norma budaya. Pertama, pesan-pesan komunikasi massa

dapat memperkokoh pola-pola budaya yang berlaku serta membimbing masyarakat agar yakin bahwa pola-pola tersebut masih tetap berlaku dan dipatuhi masyarakat. Kedua, media dapat menciptakan pola-pola budaya baru yang tidak bertentangan dengan pola budaya yang ada, bahkan menyempurnakannya. Ketiga, media massa dapat merubah norma-norma budaya yang berlaku dengan mana perilaku-perilaku individu dalam masyarakat dirubah sama sekali.

Sementara McClelland melakukan studi tentang dorongan psikologis yang memotivasi suatu masyarakat untuk mencapai kemajuan. McClelland mengungkapkan suatu konsep/istilah penting, mengapa seseorang memiliki dorongan untuk menghadapi berbagai permasalahan dan kesulitan hidup. Ia menyebutnya sebagai *n/Ach* atau *need for achievement* atau kebutuhan untuk mencapai sesuatu atau kebutuhan untuk berprestasi. Dalam studinya yang berjudul *The Achieving Society* (1961), ia antara lain berkesimpulan bahwa untuk memajukan masyarakat harus dimulai dengan mengubah sikap mental (*attitude*) para anggotanya. Dikatakan bahwa kebutuhan untuk mencapai sesuatu (*n/Ach*) merupakan dorongan pada seseorang individu untuk menghadapi tantangan, mengatasi oposisi dan berhasil menanggulangi berbagai kesulitan (Nasution, 1996). McClelland berasumsi bahwa motivasi pencapaian memang yang terpenting, namun hal itu hanyalah salah satu unsur dari suatu matriks kepribadian yang berpengaruh bagi pembangunan ekonomi. Unsur-unsur lain antara lain adalah percaya diri, berorientasi ke depan, berkompentensi, menyukai resiko, dan sebagainya.

McClelland merekomendasikan adanya tiga cara dalam mengembangkan jalan ke modern dan mengintensifkan motif pencapaian, yakni:

1. Pentingnya menciptakan opini publik yang paham (*informed public opinion*) yang ditandai oleh suatu masyarakat dengan pers yang bebas

2. Emansipasi wanita, karena mereka yang membesarkan generasi berikutnya. Wanita hendaknya diberi informasi melalui media massa, sehingga mereka menerima nilai-nilai dan norma baru
3. Pentingnya pengaruh pendidikan dari luar negeri untuk memperkuat motivasi pencapaian (Nasution, 1996).

Baik dalam perspektif ilmu psikologi, sosiologi maupun budaya melalui metodenya sendiri-sendiri sedikit banyak telah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan komunikasi pembangunan (baik dalam terapan pembangunan ataupun dalam perkembangan ilmu komunikasi pembangunan itu sendiri). Melalui teori komunikasi massa (bagaimana pengaruh media massa terhadap individu dan kelompok) sedikit banyak telah dapat dijabarkan posisinya dalam memberikan kontribusi dalam perkembangan komunikasi pembangunan. Pengaruh media terhadap individu maupun kelompok (melalui berbagai perspektif keilmuan tadi) telah berhasil menumbuhkan pembaharuan-pembaharuan yang berjalan pesat. Pembaharuan yang berwujud perubahan (change) maupun pembangunan (development) pada umumnya merupakan suatu proses berlanjut yang yang menyangkut hubungan antara media dengan massa (Depari dan MacAndrews, 1998).

Komunikasi pembangunan dalam perspektif ilmu komunikasi telah diperlihatkan oleh sejumlah ahli komunikasi, seperti yang dilakukan oleh Everett M. Rogers dan Daniel Lerner. Mereka mencoba mencari hubungan antara komunikasi dengan pembangunan. Rogers (1976) membuat tulisan untuk mengungkapkan a) konsep lama tentang pembangunan kemudian membandingkannya dengan beberapa alternatif yang sedang berkembang; serta b) mengungkapkan konsepsi lama mengenai komunikasi dalam pembangunan kemudian membandingkannya dengan beberapa peranan komunikasi dalam model-model pembangunan yang sedang

muncul. Konsepsi lama pembangunan ia menyebutnya "model dominan dalam pembangunan" yang lahir pada akhir periode 1960-an, dengan latar belakang peristiwa sejarah, seperti revolusi industri di Eropa dan Amerika Serikat, pengalaman penjajahan di Amerika Latin, Afrika dan Asia, ilmu-ilmu sosial Amerika Utara yang empiris kuantitatif, serta filsafat ekonomi/politik yang kapitalis. Pembangunan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan teknologi padat modal (yang dikuasai barat), bersifat kuantifikasi, berfokus pada pertumbuhan ekonomi melalui penghitungan produk domestik bruto (GNP) atau pendapatan perkapita.

Peranan komunikasi massa dianggap memiliki kekuatan yang ampuh dan langsung di dalam mempengaruhi masyarakat luas pada proses pembangunan (dengan teori jarum hipodermiknya). Pendapat ini mendapat sejumlah dukungan dari penelitian komunikasi. Sebuah studi lama dan berpengaruh mengenai modernisasi di Timur Tengah oleh Lerner (1958) menjadikan para sarjana komunikasi mengharapkan media massa sebagai semacam pengganda ajaib yang mampu melipatgandakan pembangunan di negara-negara berkembang. Periode ini ditandai dengan optimisme yang besar akan sumbangan potensial komunikasi terhadap pembangunan, dan kemungkinannya untuk mempercepat pembangunan. Tahun 1950-an dan 1960-an terjadi perkembangan dalam media. Kemampuan baca tulis yang semakin meluas di negara-negara berkembang, menyebabkan bertambah banyaknya masyarakat membaca media cetak. Radio-radio transistor mulai banyak digunakan di pedesaan. Arus komunikasi satu arah dari badan-badan pembangunan pemerintah kepada masyarakat yang sangat menyolok di dukung oleh paradigma dominan. Media massa menjadi sangat ideal dalam menjalankan perannya, sangat cepat menjangkau khalayak luas dengan pesan-pesan yang informatif dan persuasif mengenai berbagai hal tentang pembangunan.

Serangkain penelitian komunikasi dilakukan di berbagai negara berkembang, seperti yang dilakukan Rogers (1965) di Columbia, serta oleh Fry (1964) di Turki, yang menunjukkan bahwa kebiasaan terhadap media massa sangat erat kaitannya dengan variabel modernisasi pribadi. Penelitian Inkeles dan Smith di enam negara (1974) menyimpulkan bahwa media massa bersama-sama dengan sekolah dan pabrik berada pada posisi terdepan sebagai penanam modernisasi pribadi.

Meskipun penelitian-penelitian kekuatan media massa tampak berarti, kekuatan relatif media massa dalam mengarahkan pada pembangunan lebih banyak berupa asumsi dari pada pembuktian. Sesungguhnya menilai pengaruh media massa dalam pembangunan merupakan pekerjaan yang rumit. Survei terhadap khalayak mengenai pengaruh komunikasi serta percobaan lapangan sebetulnya tidak terlalu banyak jumlah dan ukurannya; dan dalam keadaan kurangnya bukti-bukti yang kuat, maka timbul kecenderungan untuk menganggap adanya peranan yang besar dari media massa dalam pembangunan.

Terkait dengan model pembangunan dominan di atas, kritik Rogers terhadap model tersebut antara lain adalah mengidentikkan kemiskinan dengan keterbelakangan, bangsa barat mengendalikan 'aturan permainan' pembangunan, sebagian besar sarjana yang menulis pembangunan adalah orang-orang barat, neraca pembayaran dan nilai tukar mata uang lebih ditentukan di New York, London dan Washington, serta bantuan teknik internasional yang disponsori oleh negara kaya justru menjadikan para penerimanya bergantung kepada negara pemberi. Rogers (1976) juga mengungkapkan adanya "etnosentrisme intelektual", sebagai contohnya seperti karya Walt Rostow (1961), Everet Hegen (1962), dan David McClelland (1961) yang sedikit banyak melukiskan tulisan-tulisan terdahulu dari Max Weber, yang kesemuanya tersebut para teoritis orang barat, dan seringkali menggunakan data

dasar yang kurang kuat untuk mendukung konseptualisasinya. Setelah mengulas sejarah dan sifat model dominan serta membandingkannya dengan kenyataan pembangunan di Asia, pada tahun 1975-1976, Inayatullah (Rogers, 1976) menyimpulkan: "Teori pembangunan Barat... bukanlah suatu kerangka intelektual yang tepat karena ia terlalu menekankan faktor-faktor internal masyarakat Asia yang menolak faktor-faktor eksternal sebagai penyebab keterbelakangan".

Sejumlah kritik sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan bertemunya berbagai peristiwa internasional (pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an), mulai mengguncang kredibilitas paradigma pembangunan sebelumnya, muncul jalan alternatif pembangunan. Sejumlah peristiwa dunia penting tersebut antara lain adalah:

1. Kemajuan ekologis sehubungan dengan pencemaran di negara-negara maju menimbulkan pertanyaan apakah semua itu merupakan model ideal bagi pembangunan
2. Krisis minyak dunia membuktikan bahwa beberapa negara berkembang dapat mengatur percaturan internasional serta melahirkan beberapa negara berkembang yang kaya mendadak baik di Amerika Latin, Asia dan Afrika. Negara-negara tersebut tidak mau lagi menerima asumsi-asumsi sebelumnya bahwa penyebab keterbelakangan adalah terutama karena faktor di dalam negeri mereka.
3. Dibukanya hubungan internasional dengan Republik Rakyat Cina telah memungkinkan negara-negaralain di dunia untuk mempelajari segi-segi terperinci dari kebijaksanaan Cina dalam menuju pembangunan. Negara besar dan miskin, yang dalam dua dasa warsa telah menciptakan keajaiban modernisasi. Tersedianya pangan dan sandang yang cukup bagi rakyat, peningkatan pemerataan, status kaum wanita yang dapat ditiru. Sistem kesehatan masyarakat dan keluarga berencana membuat negara kaya menjadi iri hati.

4. Kenyataan yang mengecewakan bahwa pembangunan di negara-negara berkembang banyak yang tidak berjalan lancar mengikuti paradigma pembangunan tersebut (Rogers, 1976).

Berdasarkan kenyataan di atas, maka muncullah suatu kesimpulan bahwa ternyata masih banyak terdapat jalan alternatif menuju pembangunan, dengan masukan beberapa unsur dalam konsepsi yang lebih baru ini. Dengan kombinasi yang tentu saja berbeda pada setiap negara. Unsur-unsur utama dalam pembangunan yang dimaksud adalah:

1. Pemerataan dalam penyebaran informasi, keuntungan sosial, ekonomis dan sebagainya. Pemikiran ini bahwa penduduk desa dan orang kota yang miskin menjadi sasaran pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan biasanya dibarengi dengan desentralisasi kegiatan-kegiatan tertentu di pedesaan.
3. Berdiri di atas kaki sendiri, mandiri dalam pembangunan, dengan suatu penekanan kepada potensi sumber daya setempat.
4. Perpaduan antara sistem tradisional dengan modern, sehingga pengertian modernisasi adalah suatu sinkretisasi antara pemikiran lama dengan yang baru, dengan perimbangan berbeda-beda di setiap daerah (Rogers, 1976).

Konsepsi pembangunanpun menjadi berubah sebagai perubahan menuju pola masyarakat yang memungkinkan terwujudnya nilai-nilai manusiawi yang lebih baik, yang memungkinkan masyarakat memperluas fungsi pengawasannya terhadap lingkungan mereka serta atas tujuan politik mereka sendiri, dan memperkenankan setiap pribadi untuk mengatur diri secara lebih bebas (Inayatullah, dalam Rogers, 1976). Berdasarkan konsepsi-konsepsi pembangunan tersebut, Rogers menyimpulkan definisi pembangunan sebagai suatu proses partisipasi di segala bidang dalam perubahan sosial dalam

suatu masyarakat, dengan tujuan membuat kemajuan sosial dan material (termasuk pemerataan, kebebasan serta berbagai kualitas lainnya secara lebih besar) bagi sebagian besar masyarakat dengan kemampuan mereka yang lebih besar untuk mengatur lingkungannya. Dengan demikian konsepsi pembangunan menjadi lebih luas, fleksibel, dan memiliki implikasi yang lebih manusiawi.

Munculnya alternatif-alternatif lain terhadap paradigma lama tentang pembangunan juga akan mengubah peranan komunikasi dalam pembangunan. Hal mana kalau semula menekankan kekuatan media, kemudian bergeser ke arah adanya kesadaran bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk melakukan pemilihan, penolakan, mampu melakukan proses penyaringan (proses selektif) dalam menanggapi berbagai informasi yang dilancarkan oleh media. Ada kesadaran bahwa peranan komunikasi massa dalam merangsang pembangunan seringkali tidak langsung dan hanya bersifat membantu, ketimbang langsung dan menentukan (ampuh). Hal ini bervariasi menurut berbagai segi, seperti media, pesan, khalayak, serta sifat pengaruh yang diharapkan.

2. Komunikasi Pembangunan dalam Perspektif Kebijakan di Indonesia

Kegiatan komunikasi pembangunan dalam konteks pembangunan di Indonesia tidak akan lepas dari kebijakan pembangunan secara makro yang ada di Indonesia, hal ini sesuai dengan masing-masing era (kurun waktu) pembangunan di Indonesia, baik pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, maupun pada era Reformasi dan Otonomi Daerah. Komunikasi Pembangunan, khususnya yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia secara menonjol dapat diperlihatkan terutama pada masa Orde Baru (di bawah Kepemimpinan Jenderal Soeharto), dan pada era pasca Orde Baru, yang disebut sebagai era reformasi dan Otonomi Daerah.

Pada masa Orde Baru memiliki ciri yang khas dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, yakni pembangunan yang tersentralistik, dengan berbagai konsekuensinya seperti kegiatan pembangunan yang seragam, pendanaan yang di atur dari Jakarta, proyek-proyek pembanguna yang diatur dari Jakarta, dan sebagainya. Keseragaman dalam suatu kegiatan pembangunan seperti program Bimas, Insus dan Supra Insus (rekomendasi penggunaan paket teknologi pertanian, prosedur perolehan kredit dalam suatu kegiatan pembangunan, dan sebagainya), keseragaman dalam program Keluarga Berencana (KB), keseragaman dalam mengatur pegawai negeri sipil atau PNS (bahkan dalam pakaian pun harus seragam di seluruh Indonesia, seperti seragam pegawai pemda, seragam Korpri, seragam guru SD, dan sebagainya).

Akhirnya sistem komunikasi yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru juga akan berjalan secara linear, yakni sistem komunikasi satu arah secara *top down*. Hal ini bukan berarti bahwa pemerintah tidak mau mendengar kemauan rakyatnya. Bahkan komunikasi dua arahpun sangat marak dilakukan pada berbagai bidang kegiatan pembangunan. Seperti komunikasi dua arah dalam kegiatan pembangunan tersebut bisa dalam bentuk kunjungan kerja pejabat negara ke daerah-daerah untuk melakukan komunikasi tatap muka (*face-to-face communication*) langsung dengan para petani, peserta program KB, peternak, dan sebagainya. Atau secara perwakilan dari sejumlah element masyarakat yang diundang ke istana negara Jakarta. Juga komunikasi langsung jarak jauh dari presiden dan pembantunya yang ada di Jakarta dengan sejumlah kelompok masyarakat yang ada di sejumlah daerah di Indonesia dengan menggunakan media komunikasi, yang disiarkan oleh sejumlah media massa ke seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan komunikasi dua arah yang dilakukan pemerintah lebih merupakan untuk mendapatkan feedback bagi kepentingan dan keberhasilan program-program pemerintah.

Sementara dalam implemementasi pembangunannya, masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaannya, pelaksanaan maupun evaluasi. Masyarakat lebih banyak sebagai objek dari pada sebagai subyek pembangunan, karena dalam berbagai program pembangunan masyarakat tinggal melaksanakan dengan berbagai aturan yang sudah ada dalam suatu proyek pembangunant pemerintah.

Fenomena lain bagaimana gambaran komunikasi pembangunan dalam perspektif kebijakan Indonesia adalah pada masa setelah runtuhnya masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Pada awal reformasi kegiatan komunikasi pembangunan nampak kurang terarah, tidak jelas siapa bicara kepada siapa dan bicara tentang apa. Seperti anak ayam kehilangan induknya, perilaku pesan menjadi tidak jelas arahnya. Masing-masing element masyarakat, baik itu dari pihak media/ insan pers, organisasi-organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh politik, tokoh masyarakat lainnya, semuanya merasa memiliki hak untuk bicara. Saat ini terjadi euforia demokrasi, semua pihak bebas bicara tentang apa saja, terutama melakukan kritik terhadap pemerintah. Melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, melalui pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, konsep otonomi daerah digarap, dan kewenangan pemerintah pusat banyak didelegasikan ke daerah. Hal ini akan mengubah proses komunikasi pembangunan yang terjadi. Proses komunkasi *bottom up* menjadi cukup dinamis, dan berbeda antar daerah satu dengan lain di wilayah Indonesia.

Berikut mencoba melihat lebih jauh bagaimana proses komunikasi pembangunan di Indonesia baik pada masa Orde Baru maupun masa Reformasi, baik dalam kegiatan Peliputan Pembangunan, Jurnalisme Pembangunan, Komunikasi Pendukung Pembangunan, Periklanan Pembangunan, maupun Penyuluhan Pertanian.

Pada masa Orla, *development reporting* sudah dilakukan oleh beberapa media. Dalam prakteknya misalnya *development reporting* atau peliputan pembangunan berupa pidato kenegaraan (Presiden Soekarno) tentang berbagai perkembangan perpolitikan dan upaya-upaya menyatukan bangsa yang pernah dilakukan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) di seluruh wilayah Indonesia. RRI pada waktu itu merupakan tulang punggung di dalam menyampaikan hasil-hasil pembangunan pada masyarakat. RRI menjadi alat perjuangan sebelum Indonesia Merdeka. Sedangkan *development reporting* di bidang pertanian, pemerintah menyiarkannya melalui RRI tentang hasil-hasil pembangunan pertanian seperti adanya peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pangan melalui BPMD dan lainnya.

Pada masa Orba kegiatan *development reporting* betul-betul dikendalikan oleh pemerintah. Kegiatan *development reporting* harus sesuai dengan apa yang dikehendaki pemerintah. Berbagai surat kabar dan majalah hanya diperkenankan meliput berbagai informasi ataupun peristiwa kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah yang menunjukkan keberhasilan. Tidak diperkenankan meliput kegagalan pembangunan, apalagi melakukan kritikan terhadap pemerintah. Apabila ini dilakukan maka akan terkena sanksi, dicabut izinnya atau dikakukan *pembredelan*. Pada masa ini kegiatan *development reporting* mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan (dari segi kuantitas), namun terjadi pembrangusan sifat kritis para jurnalis pembangunan. Pada masa Orde Baru, praktek-praktek yang dilakukan pemerintah dari konsep *development reporting*, antara lain dapat berupa kegiatan seperti berikut ini:

Sedangkan pada era reformasi, *development reporting* terkesan kurang memiliki konsep yang jelas. *Development reporting* terlihat kurang focus, lebih banyak terjebak pada kepentingan kelompok (kegiatan partai), ataupun pemenangan

tender-tender proyek untuk orang atau kelompok-kelompok tertentu. Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono lebih disibukkan oleh berbagai kegiatan yang lebih bersifat pemulihan. Untuk menangani berbagai musibah alam, teroris (pemboman diberbagai tempat), dan lainnya. Konflik kepentingan diantara kelompok-kelompok politik nampak menonjol dari pada memikirkan rakyat banyak. Hal ini sebuah pembelajaran yang berharga bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan jurnalis pembangunan pada era Orde Baru sangat dibatasi oleh kehendak pemerintah. Berbagai bentuk tulisan para kuli tinta, siap-siap untuk menanggung resiko jika apa yang menjadi perhatiannya berseberangan dengan pemerintah, bahkan sampai pembredelan surat kabar.

Pada masa Orde Baru untuk menjadikan para jurnalis sebagai insan kritis seperti yang diharapkan barangkali hanya dalam teori saja, dan sulit untuk dilaksanakan di lapangan. Para jurnalis tidak mungkin mengangkat perusakan lahan pertanian akibat pemberian pupuk kimia yang terus-menerus demi ambisi swasembada beras (nilai politis di dunia internasional), tanpa memperhatikan keanekaragaman jenis tanah (kebutuhan pupuk secara lokal) dan kandungan unsur haranya yang secara alamiah sudah ada di dalamnya. Belum lagi berbagai permasalahan sosial, politik lainnya.

Begitu kran reformasi dibuka, para jurnalis menikmati kebebasan untuk menuliskan apa saja yang menurut mereka perlu dikritisi atau penting untuk konsumsi publik, berbagai kebijakan pemerintah dipandang tidak memberikan perbaikan bagi masyarakat banyak ditelanjangi, mengorek berbagai sisi gelap para birokrat yang dianggap tidak pantas di beberkan dimuka masyarakat. Bahkan memberikan kesan bahwa dari sisi etika seorang jurnalis sering ditinggalkan, sehingga ada yang mengomentari sebagai kebebasan pers yang kebablasan.

Telah diungkapkan di atas bahwa *development support communication* adalah suatu penggunaan yang berencana sumber-sumber (resources) informasi dan komunikasi (tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan media) oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan (Sumadi Dilla, 2007). Dari pengertian tersebut memperlihatkan bahwa pelaku pembangunan, baik *change agent* ataupun subyek pembangunan (sasaran pembangunan) bisa saja 1) antara pemerintah dengan masyarakat, 2) antara pihak swasta (perusahaan/ organisasi social/ LSM/ dsb) dengan masyarakat, 3) atau bisa jadi agen pembaharuan dan sarasannya adalah orang/ lembaga yang sama. Namun pengertian yang ketiga ini jarang digunakan secara luas

Pada masa Orla pengertian pertama dan kedua dari istilah *development support communication* digunakan oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama berjuang memperbaiki nasib bangsa selepas dari penjajahan. Sedangkan pengertian *development support communication* digunakan oleh partai-partai yang ingin mendapat simpati rakyat. Contoh dalam prakteknya pada masa ORLA tentang *development support communication* ini dimana pemerintah melakukan pidato atau penerangan melalui (sumberdaya informasi dan komunikasi) siaran radio (RRI).

Dalam era Orde Baru istilah *development support communication* memiliki makna yang banyak mengalami pergeseran. Konsep *development support communication* dapat diberikan pengertian sebagai penggunaan dan atau pengendalian berbagai *resources* informasi dan komunikasi (tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan media) oleh pemerintah (baik sumber daya yang dimiliki pemerintah maupun milik masyarakat) dalam upaya mendukung (mempercepat, mnggerakkan, mendinamisasikan) program-program pembangunan yang diselenggarakannya dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah diputuskannya.

Terkait dengan sumber daya informasi dan komunikasi pemerintah (misal: RRI, TVRI, lembaga penerbitan, dsb), maka *development support communication* bisa berupa kegiatan publikasi pemerintah tentang berbagai informasi yang ada kaitannya dengan pembangunan yang diorientasikan pada tersosialisasikannya program-program untuk percepatan pembangunan itu sendiri. Dalam prakteknya pemerintah juga memiliki juru penerangan yang siap memberikan penerangan terkait berbagai program pembangunan, Deppen juga menerbitkan brosur, leaflet, journal, dan majalah yang terkait dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan..

Sedangkan terkait dengan berbagai sumber daya informasi dan komunikasi yang dikuasai/dimiliki public atau masyarakat, maka pemerintah memiliki peran pengendalian yang ketat dan sangat otoriter. Peran pengendalian ini dilakukan oleh Departemen Penerangan. *Komunikasi sebagai pendukung pembangunan*, baik secara konsep maupun dalam prakteknya di era Orba ini sangat rapi, terencana, terarah bahkan terlembaga (di bawah pengelolaan Departemen Penerangan) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Bahkan istilah pembangunan itu sendiri adalah menurut apa yang dimau pemerintah.

Pada masa tersebut secara nasional ada integrasi dan koordinasi antara kegiatan *penyuluhan* dan kegiatan *penerangan*. Berbagai departemen masing-masing pada level di lapangan melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan bidangnya, seperti penyuluhan pertanian (Departemen Pertanian), penyuluhan kehutanan (Departemen Kehutanan), penyuluhan KB (BKKBN), penyuluhan gizi (Departemen Kesehatan), penyuluhan sanitasi dan air minum (Departemen PU), penyuluhan koperasi (Departemen Koperasi), penyuluhan hukum (Dep. Kehakiman), penyuluhan pajak (Dep. Keuangan), penyuluhan keselamatan kerja (Depnaker) dan sebagainya.

Sedangkan konsep *development support communication* pada era reformasi ada dinamikanya tersendiri, bahkan pada era pemerintahan Gusdur, Departemen Penerangan dibubarkan karena dianggap tidak dibutuhkan dan tidak memiliki peran yang jelas (dan muncul yang pertama kali jabatan juru bicara kepresidenan), dan muncul kembali setelahnya (di bawah kepemimpinan Presiden Megawati) dan sekarang (dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono) diganti nama Departemen Komunikasi dan Informasi. Konsep *development support communication* saat ini lebih dimaknai untuk mengatur hal-hal yang menyangkut pemanfaatan ruang public (penggodokan undang-undang pers dan siaran). Strategi *Development support communication* lebih demokratis dan bersifat dua arah (*top-down dan bottom up*). Dalam prakteknya Departemen Komunikasi dan Informasi memang mengakomodasi aspirasi dari berbagai unsur masyarakat, tetapi justru inilah praktek penyusunan UU pornografi dan pornoaksi sulit diselesaikan (tarik ulur berbagai kepentingan di masyarakat). Demikian juga pembuatan UU pers dan Siaran juga susah diselesaikan, tetap saja insan pers menganggap pemerintah tidak mau mengakomodasi apa yang berkembang di masyarakat dan menuduh pemerintah bertindak otoriter.

Development advertising, merujuk pada pengertian tindakan-tindakan promosi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mempengaruhi masyarakat agar tergerak dan terlibat/berpartisipasi sesuai dengan pesan yang dimuat dalam iklan tersebut. Sebagai contoh *development advertising* pada awalnya adalah iklan layanan masyarakat dari pemerintah yang ditayangkan TVRI. Dalam praktek *development advertising* bisa berupa himbuan melakukan penghijauan, himbuan tidak melakukan penebangan hutan sesukanya, anjuran hidup sejahtera dengan ikut program KB, dsb) melalui media TV. Konsep ini berkembang menjadi kegiatan pameran pembangunan, dan yang dipamerkan/dipromosikan antara lain

hasil-hasil pembangunan dan manfaat, perbaikan hidup atau peningkatan kesejahteraan kehidupan apabila mengikuti program-program tertentu dari pemerintah.. Praktek *development advertising* misalnya pameran pendidikan yang diselenggarakan oleh Depdikbud (sekarang Diknas) Contoh lain pameran industri kecil yang diprakarsai oleh Departemen Perindustrian, dan sebagainya. Konsep *development advertising* sekarang ini semakin berkembang lagi, bahkan tidak hanya diprakarsai oleh pemerintah tetapi juga oleh pihak lain (perusahaan swasta, LSM, koperasi, BUMN, dan sebagainya) dengan media edvertising yang semakin berkembang dan dinamis (termasuk penggunaan internet).

Di bidang penyuluhan masyarakat (*agricultural extension*) setelah kemerdekaan, Kepala Pusat Djawatan Pertanian Rakyat (perubahan nama dari LVD) mencanangkan “Plan Kasimo” pada bulan Oktober 1947) untuk mengadakan pusat-pusat pendidikan masyarakat desa, yang berdasarkan Konferensi Jawatan Pertanian Rakyat ke I di Madiun (1-2 Juli 1948) yang diberi nama BPMD (Balai Pendidikan Masyarakat Desa). BPMD kepanjangan tangan dari Dinas Pertanian Rakyat (perubahan nama dari LVD) BPMD sebagai pusat penyuluhan pertanian pada prinsipnya akan dibangun di setiap kecamatan, namun baru berhasil dibangun sebanyak 375 buah dari jumlah kecamatan sebanyak 2800 buah. Konsep penyuluhan pada era ini nampaknya menerapkan falsafah “*learning by doing*” atau belajar sambil berbuat dan falsafah “*seeing is believing*” atau melihat baru percaya. Dalam *prakteknya* penyuluhan system ini, dimana setiap komplek BPMD selain menyelenggarakan latihan-latihan, juga dilengkapi dengan kebun percontohan, kolam ikan dan percontohan peternakan; dan penyuluhan kepada petani tetap dilakukan secara tetesan minyak; disamping itu juga diterapkan metoda penyuluhan yang lain, seperti: kursus, pameran, demonstrasi/percontohan dan pertunjukan.

Menjelang akhir pemerintahan Orde Lama pemahaman penyuluhan pertanian memiliki makna atau cakupan yang lebih luas, yakni tidak hanya dilakukan oleh BPMD, juga dilakukan penyuluhan pertanian lewat Koperasi Pertanian (Koperta). Dalam prakteknya Koperta juga menggunakan system tetes minyak, dengan menekankan pendekatan kelompok.

Pada masa Perusahaan Negara “Padi Sentra”, *konsep penyuluhan pertanian* lebih diberikan pengertian pemberian penyuluhan dalam proses produksi padi untuk progam intensifikasi pada wilayah (sentra) tertentu. *Dalam prakteknya* penyuluhan ini meliputi pemberian bimbingan teknis, penyediaan kredit, sarana produksi (benih unggul, pupuk, pestisida dan uang); dan petani wajib menjual produknya ke perusahaan Padi Sentra dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan wajib memberi balas jasa 12,5 % per tahun.

Sejak pemerintahan Orde Baru (1966), pelaksanaan penyuluhan pertanian dilimpahkan (dari BPMD dan Koperta) kepada organisasi BIMAS yang menggabungkan berbagai instansi (Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Pertani, Perguruan Tinggi, BNI, dan lain-lain). Di sini konsep penyuluhan pertanian diberi pengertian secara lebih luas lagi, tidak hanya menyangkut teknis budidaya, tetapi juga bagaimana pengelolaan keuangan, masalah sarana produksi pertanian, pentingnya kerja sama melalui koperasi, dan petani diajak untuk berpikir logis dan nalar (ilmiah) dalam tindakan usahatannya. Dalam prakteknya, Bimas merupakan penyuluhan yang dilakukan bersama-sama dari berbagai instansi terkait, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban; dengan materi tentang: Pancakarya (panca usahatani, penguasaan, pengolahan, pemasaran, pembangunan masyarakat) dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan mempertinggi kesejahteraan petani dan keluarganya maupun bagi masyarakat umum.

Konsep penyuluhan pertanian selama Orde Baru diberi pengertian sebagai pendidikan kepada para petani yang diorientasikan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani (dan masyarakat umumnya) melalui berbagai program yang dirancang pemerintah dan untuk pemenuhan pangan nasional. Teori-teori penyuluhan pertanian; seperti falsafah penyuluhan, prinsip dasar penyuluhan, etika penyuluhan, di ajarkan pada sekolah-sekolah pertanian. Dalam teori-teori penyuluhan tersebut menempatkan petani sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang baik seperti halnya kelompok masyarakat yang lainnya. *Dalam prakteknya* berbagai norma dan nilai-nilai penyuluhan yang ideal banyak ditinggalkan, pendidikan kepada petani lebih bersifat otoriter, dan menempatkan petani sebagai objek pembangunan.

Di era reformasi dan Otonomi Daerah, kebijakan penyuluhan pertanian diserahkan dan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, hal mana dalam pelaksanaannya sangat kondisional sesuai dengan kemampuan dan orientasi daerah, bisa dilakukan oleh BIPP kabupaten, Dinas Pertanian, atau lainnya. Pada era ini konsep penyuluhan nampak lebih menempatkan petani sebagai subyek dalam prakteknya dan mengembangkannya sesuai dengan potensi wilayahnya.

C. Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat

Konsep komunikasi pembangunan sudah sangat familier kita dengar, lalu bagaimana dengan komunikasi pemberdayaan masyarakat? Mungkin ini termasuk konsep baru bagi telinga kita, atau bisa jadi istilah tersebut baru diketemukan melalui tulisan ini? Mengapa perlu ada komunikasi pemberdayaan masyarakat? Seberapa pentingkah konsep komunikasi pemberdayaan masyarakat ini perlu untuk dikembangkan? Seberapa pentingkah dalam implementasinya dalam kegiatan pembangunan di masyarakat sehingga komunikasi pemberdayaan masyarakat tersebut perlu dikaji dalam tulisan ini? Ataukah memunculkan konsep komunikasi

pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang mengada-ada dan tidak penting? Bukankah sudah ada komunikasi pembangunan yang barangkali sudah bisa membahas secara lebih luas? Mungkin berbagai pertanyaan lainnya bisa muncul, terutama bagi sebagian kita yang baru mendengar istilah ini dan juga bagi orang-orang yang kurang banyak bersinggungan dengan istilah pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Ketika suatu cabang ilmu belum berkembang, maka ia relatif bisa dikaji secara meluas (lateral). Hal-hal yang berkaitan dengan cabang ilmu tersebut bisa dipelajari. Seiring dengan berkembangnya kajian-kajian dan orang-orang yang menaruh perhatian terhadapnya, suatu cabang ilmu tidak hanya maju secara meluas tetapi juga secara mendalam. Jika ditemukan anak cabang ilmu tertentu dalam suatu cabang ilmu tersebut dan dianggap penting bagi masyarakat, baik bagi kepentingan pengembangan keilmuan maupun kepentingan yang sifatnya lebih praktis (kemaslahatan umat, kemajuan peradaban, percepatan pembangunan, dan sebagainya), memungkinkan anak ilmu tersebut akan semakin berkembang dan menjadi cabang ilmu tersendiri, seperti halnya komunikasi pertanian, penyuluhan pertanian, komunikasi kesehatan, komunikasi politik, dan sebagainya.

Jika mengingat lebih jauh dari apa yang diungkapkan tersebut serupa dengan bagaimana perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, bahwa dahulu hanya dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Kemudian ilmu alam terbagi menjadi ilmu hayat (biologi), ilmu kimia dan ilmu fisika. Ilmu sosial dibedakan menjadi ilmu ekonomi, ilmu hukum dan ketatanegaraan, sosiologi, dan sebagainya. Masing-masing ilmu tersebut semakin berkembang dan terspesialisasi sehingga seperti berbagai macam cabang ilmu yang dewasa ini ada. Demikian halnya dengan apa yang digagas sebagai komunikasi pemberdayaan masyarakat. Ketika pemberdayaan masyarakat diyakini banyak pihak sebagai pendekatan yang

paling sesuai dalam kerangka pembentukan masyarakat madani (*civil society*), yang menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian (*centre of attention*) dan sekaligus menempatkan masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan maka berbagai upaya untuk keberhasilan dalam prakteknya perlu dilakukan dengan sungguh dan seksama. Berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu dicermati termasuk proses komunikasinya.

Proses komunikasi merupakan aspek penting, yang membedakannya dari strategi/ pendekatan pembangunan yang lainnya. Proses komunikasi *linear* yang sangat penting di masa Orde Baru, menjadi tergeser dalam pemberdayaan masyarakat. Proses komunikasi *interaktif*, dan bahkan proses komunikasi *transaksional* menjadi sangat urgen dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di era reformasi banyak menuntut partisipasi masyarakat, maka pendekatan pemberdayaan masyarakat dipandang paling sesuai dan relevan sebagai pendekatan pembangunan dengan proses-proses komunikasi yang menyertainya. Hal ini berarti berbagai kegiatan komunikasi yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi urgen untuk dikaji.

Pemahaman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah banyak di singgung di bab terdahulu, dan untuk memahami serta bagaimana kaitannya antara komunikasi pembangunan dan komunikasi pemberdayaan masyarakat tidak akan lepas dari pemahaman kedua konsep terdahulu tersebut. Kehadiran komunikasi pembangunan dapat dipandang sebagai suatu perwujudan respon kalangan disiplin komunikasi untuk menyumbang dan menerapkan ilmunya, dalam rangka ikut ambil bagian menjawab tantangan dan tuntutan pembangunan. Pada hakekatnya perbedaan lahiriah antara kegiatan komunikasi pembangunan dengan yang “bukan komunikasi pembangunan” nyaris tidak kelihatan. Disebut

sebagai komunikasi pembangunan apabila sudah benar-benar dikaitkan dengan tujuan suatu proyek pembangunan secara khusus atau dan program-program pembangunan nasional secara keseluruhan (Nasution, 1996).

Sedangkan untuk membedakan antara komunikasi pembangunan dengan komunikasi pemberdayaan masyarakat juga agak sulit. Namun kalau mengacu pada pengertian pemberdayaan yang diungkapkan oleh Ginanjar Kartasmita terlihat bahwa komunikasi pemberdayaan masyarakat merupakan kajian yang lebih fokus dari komunikasi pembangunan. Komunikasi pemberdayaan masyarakat merupakan kajian komunikasi dalam kegiatan pembangunan yang menekankan pada pentingnya pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat. Sehingga proses-proses komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada proses yang bersifat transaksional dan interaktif dari pada linear. Dalam pemberdayaan masyarakat, berbagai kegiatan/proyek pembangunan lebih menempatkan masyarakat sebagai subyek yang memiliki berbagai sisi kemanusiaannya, baik berupa keinginan, cita-cita, daya, nilai-nilai, budaya dan peradaban, dan sebagainya.

Apabila konsep pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut dikaitkan dengan sektor tertentu dari pembangunan ekonomi, seperti sektor pertanian; maka kita akan menemukan konsep baru lagi, yakni pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat tani. Lalu bagaimana dengan proses komunikasinya? tentu saja kajian komunikasinya akan lebih terfokus lagi, halmana pesan-pesan komunikasi, konteks komunikasinya juga akan khas (sesuai dengan budaya masyarakat tani, yang berbeda dengan budaya masyarakat yang lain), *treatment* dalam kegiatan komunikasinya-pun juga akan berbeda, termasuk juga penggunaan medianya, dimensi *relationship* yang harus dibangun dan sebagainya.

Ilmu komunikasi adalah ilmu yang sifatnya mengambang (*floating sciense*) yang tergantung dari objek (bidang kajian) yang ditemelinya. Dengan demikian sejauhmana pentingnya kajian komunikasi pemberdayaan masyarakat juga akan ditentukan oleh sejauh mana bidang kajian pemberdayaan masyarakat itu dipandang penting oleh banyak orang. Telah diungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah dewasa ini secara dominan digunakan sebagai pendekatan/strategi pembangunan. Artinya bahwa keberhasilan pembangunan di Indonesia diantaranya ditentukan oleh sejauh mana pendekatan pemberdayaan masyarakat cukup berhasil dalam impelementasinya. Dengan demikian komunikasi pemberdayaan masyarakat juga menjadi penting dikaji untuk keperluan keberhasilan pembangunan.

Berkembangnya kajian komunikasi pemberdayaan masyarakat tersebut juga akan ditentukan oleh berkembangnya bidang kajian pemberdayaan masysrakat. Untuk itu untuk mempelajari komunikasi pemberdayaan masyarakat, maka penting memahami apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Ginanjart Kartasasmita memandang pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan yang berakar kerakyatan bertitik tolak dari pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Upaya tersebut harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai modern seperti: kerja keras, hemat, keterbukaan, bertanggung jawab, pembaruan

lembaga social, dan integrasiannya ke dalam pembangunan, serta peranan masyarakat di dalamnya adalah pokok dari upaya pemberdayaan ini. Penting adanya peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut diri dan masyarakat. Proses pemberdayaan juga mengandung arti melindungi, harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Peningkatan yang dituju tidak hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat: “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995). Konsep pemberdayaan masyarakat tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi justru sebaliknya mencoba memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Pemberdayaan betitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan akan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan menjamin pertumbuhan berkelanjutan.

Telah diungkapkan sebelum ini bahwa ada beberapa konsep dalam komunikasi pembangunan yang penting, diantaranya adalah peliputan pembangunan (*development reporting*), jurnalisme pembangunan (*journalism of development*), komunikasi pendukung pembangunan (*development support communication*), periklanan pembangunan (*development advertising*), serta penyuluhan khususnya penyuluhan pertanian (*agricultural extension*). Berbagai konsep ini memiliki perannya masing-masing di dalam konteks pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Dengan mendasarkan pada konsep-konsep tentang pemberdayaan masyarakat dari Ginanjar Kartasasmita maka

bisa dilihat *adanya kaitan dengan level dan bidang singgung yang beragam* diantara konsep-konsep yang sudah dijelaskan dengan pemberdayaan masyarakat tani. *Development reporting* di tingkat lapangan bisa berupa laporan hasil penyuluhan ataupun hasil laporan kegiatan dinas-dinas daerah dari berbagai departemen yang ada (termasuk di dalamnya hasil penyuluhan pertanian dan dari dinas pertanian daerah) termasuk berbagai alasan atau permasalahan masyarakat termasuk petani (catatan: sebegini besar masyarakat desa adalah petani); sehingga menampilkan hasil laporan seperti yang disajikan. Sementara pemberdayaan masyarakat tani mencoba mengangkat kesejahteraan dan martabat masyarakat petani yang bertolak dari mengurai akar permasalahan petani yang sebenarnya. Kemudian laporan pembangunan daerahnya ini diteruskan ke pusat, yang akhirnya akan melahirkan kebijakan dan program-program pemerintah yang telah diperbaiki (mengakomodasi permasalahan yang sebenarnya di tingkat lapangan) untuk diterapkan dalam program pembangunan pada tahap / tahun berikutnya. Jadi, *Development reporting* bisa menjadi jembatan dalam pemberdayaan masyarakat tani dalam mencapai keberhasilannya.

Demikian halnya dengan jurnails pembangunan (*journalism of development*) dalam pemberdayaan, semestinya juga lebih menghargai dan menjunjung tinggi etika-etika jurnalisme, dan keperpihakan pada kepentingan masyarakat luas sebagai subyek pembangunan dari pada sebagai kepanjangan dari kepentingan satu pihak saja. Idealisme seorang jurnalis lebih dituntut di sini. Proses-proses komunikasi dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat luas baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi merupakan proses yang lebih rumit; sehingga membutuhkan kesabaran, keikhlasan, keuletan untuk keberhasilannya. Proses pendidikan terjadi pada semua element yang terlibat dalam kegiatan pembangunan, termasuk para kuli tintanya. Karena kalau

tidak, bisa saja hasil tulisan-tulisannya bukan dalam kerangka memberdayakan masyarakat, tetapi bersama-sama dengan pihak-pihak tertentu memberdayai masyarakat banyak.

Kita tahu bahwa dalam era sekarang ini *kegiatan pemberdayaan masyarakat tani* tidak saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga berbagai elemen masyarakat lainnya, seperti LSM, organisasi social kemasyarakatan, organisasi social keagamaan, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan sebagainya yang memiliki kepedulian terhadap perbaikan nasib petani. *Development support communication* merupakan sarana, dimana berbagai informasi dan perkembangan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat tani dapat disebarkan kepada berbagai pihak termasuk kepada pemerintah (personal-personal pejabat pemerintah). Para *change agent* (pemerintah dan elemen masyarakat lainnya) saling mengirim dan menerima (bertukar) informasi yang bisa dijadikan dasar/ bahan pemikiran untuk kegiatan pemberdayaan petani selanjutnya.

Untuk persoalan-persoalan tertentu yang belum banyak diketahui oleh public, sementara suatu kelompok penggerak (*change agent*) kegiatan pemberdayaan masyarakat tani memandang *urgent* untuk diketahui umum (karena dipandang perlu penanganan segera), maka melalui *development advertising* merupakan sarana yang dipandang membantu. Promosi ini bisa dilakukan komunikasi massa, melalui komunikasi kelompok (misalnya: melalui jaringan kerja sama LSM, atau jaringan kerja sama penggerak pemberdayaan masyarakat tani), atau komunikasi interpersonal (hubungan telepon, presentasi, pengajuan proposal dsb).

Pemberdayaan masyarakat tani dengan *agricultural extension* memiliki kaitan yang sangat erat. Subyek yang ingin diperbaiki nasibnya adalah sama, yakni masyarakat tani; dan objek atau bidang yang ingin dikembangkan juga sama, yaitu lingkup pertanian. Yang membedakan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat berangkat dari konsep yang lebih

makro dalam kerangka memperbaiki kesejahteraan rakyat (dari kemiskinan), sementara penyuluhan pertanian merupakan aspek pendidikan dalam pembangunan pertanian. Dalam orientasi akhirnya pemberdayaan masyarakat tani (pada tataran konsep) tidak hanya ingin meningkatkan ekonomi tapi juga menekankan aspek social, peningkatan harkat dan martabat manusia. Demikian juga konsep penyuluhan pertanian dengan falsafah, prinsip dan etika penyuluhannya juga ingin meningkatkan kesejahteraan dan harkat martabat petani. Pemerintah (Orde Baru) pernah menerapkan strategi pembangunan yang menekankan pertumbuhan baru pemerataan. Sehingga usaha-usaha dalam skala besarlah yang lebih didorong untuk maju dengan harapan akan memberi manfaat (*trickle down effect*) pada usaha-usaha menengah, kecil dan mikro. Tetapi ternyata kurang berhasil, yang terjadi bahwa gap kesenjangan semakin lebar. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap miskin atau bahkan semakin bertambah miskin. Sementara pemberdayaan masyarakat tani mencoba memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Dengan adanya pemerataan, akan memiliki landasan yang luas untuk pertumbuhan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

BAB IV.

**REALITAS KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

Pada bab ini akan mengungkapkan contoh di lapangan tentang bagaimana realitas komunikasi pemberdayaan masyarakat. Subyek kajiannya masyarakat petani yang tergabung dalam kelompok tani jamur merang di desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Objek kajian meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat (usahatani jamur merang) dan kegiatan komunikasi pemberdayaan masyarakat. Kegiatan komunikasinya meliputi pemaknaan petani terhadap pemberdayaan masyarakat, proses komunikasi yang terkait dengan usahatani jamur merang, dan pemaknaan petani terhadap keberhasilan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Hal yang menarik perhatian dari objek kajian adalah kelangkaannya dan intensitas kegiatannya yang tinggi, juga komoditas usahatannya yang dipandang prospektif oleh pemerintah DIY.

Informasi disajikan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara (memanfaatkan beberapa sumber bukti). Pertama secara *dokumentasi*, seperti dokumen administrasi kelompok jamur merang (administrasi kegiatan, administrasi produksi dan cash flow keuangan kelompok). Kedua *wawancara*, seperti data aktivitas rutin pekerjaan sehari-hari, proses produksi jamur merang, upah dan berbagai sumber pendapatan petani, pemahaman petani tentang pemberdayaan masyarakat, proses komunikasi yang terjadi dalam kelompok, dan pemahaman tentang keberhasilan petani.

Ketiga secara *Observasi langsung*, misalnya dalam mendapatkan informasi proses produksi (mulai dari persiapan media sampai dengan cara panen), proses komunikasi kelompok, aktivitas sehari-hari petani yang berkaitan dengan kelompok. Keempat dengan *Rekaman arsip*, seperti data monografi desa, data statistik terutama yang terkait dengan pertanian (data potensi berbagai jenis komoditas yang ada di tingkat kecamatan dan kabupaten), informasi iklim (rata-rata curah hujan, kelembaban udara dan temperature harian).

Kelima secara *observasi partisipan*, yakni dengan mengambil peran fungsional seperti terlibat langsung sebagai tenaga kerja dalam proses penyiapan media tanam dan sebagai tenaga pemetik jamur merang.

A. Kegiatan Kelompok Pemberdayaan

Seperti halnya kebanyakan kelompok tani komoditas lainnya, kelompok tani jamur merang pada awalnya juga anggota kelompok tani tanaman pangan yang tertarik untuk mengusahakan jamur merang. Dalam perjalanannya kelompok tani jamur merang menjadi kelompok mandiri yang terdiri dari sejumlah petani yang ingin berusahatani jamur merang, terlepas dari kelompok tani tanaman pangan, dengan struktur organisasi dan aturan main yang tersendiri pula.

Jamur merang relatif memerlukan perhatian yang intensif dibanding kebanyakan komoditas atau tanaman pertanian lainnya. Usahatani jamur merang memerlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) petani khusus, baik menyangkut kesungguhan/kegigihannya, keahlian, kecermatan, kesabaran, dan keuletannya. Sehingga petani jamur merang ini jumlahnya tidak banyak, karena hanya petani yang sungguh-sungguh saja yang akan mengusahakan jamur merang sebagai keputusan usahataniannya.

Demikian juga menyangkut pembiayaan, relatif perlu investasi modal (awal) dan biaya operasional yang relatif lebih tinggi dibanding kebanyakan komoditas tanaman pangan. Usahatani jamur merang juga memiliki resiko kegagalan tinggi. Budidaya jamur merang butuh perawatan intensif yang berbeda dari kebanyakan tanaman lainnya. Keahlian khusus dari petani dalam mengatur kelembaban ruang produksi, dan ketepatan waktu panen akan menjadi penentu keberhasilan usahatani jamur tersebut. Itulah sebabnya penyelenggaraan usahatani jamur merang dilakukan secara berkelompok dalam bentuk *cluster* jamur merang. Jika dilakukan secara individual,

hanya petani yang bermodal kuat, dengan ketrampilan yang memadai sajalah yang bisa melakukan usahatani tersebut.

Sebenarnya berdasarkan kebijakan pemerintah, baik menurut Dinas Pertanian DIY dan juga Deptan Direktorat Jenderal Hortikultura di tahun 2005 bahwa yang ditetapkan sebagai wilayah pengembangan jamur DIY adalah Kabupaten Sleman, yakni di kawasan Kaliurang yang berhawa sejuk. Namun semenjak dua tahun terakhir (tahun 2007), pemerintah propinsi maupun Direktorat Jenderal Hortikultura berubah pikiran dan memberikan sinyal dan arahan agar di Bantul didorong untuk mengembangkan jamur. Hal ini setelah diketahui adanya kelompok tani di Bantul (di desa Argorejo) menemukan teknik pembuatan rumah-rumah jamur (disebut: *kumbung*) secara kedap suhu. Rumah jamur tersebut berkerangkakan batang bambu dan beratapkan genteng. Dinding, pintu dan plafon terbuat dari plastik yang bisa ditutup rapat. Dengan demikian, baik suhu maupun kelembaban udara dan cahaya di dalam kumbung bisa diatur sedemikian rupa sehingga memiliki iklim mikro sesuai dengan syarat tumbuh jamur merang, seperti halnya di kawasan Kaliurang yang memiliki dataran tinggi dengan hawa sejuk.

Budidaya jamur merang di Desa Argorejo pada awalnya dilatarbelakangi oleh keinginan 3 orang yang dulunya pernah menjadi karyawan di sebuah perusahaan jamur merang (Pabrik Jamur Tumbuh Agung), yang kebetulan berkedudukan di Desa Argorejo (dusun Gunung Polo) pula. Karena sesuatu hal, perusahaan tersebut bangkrut dan tutup. Sejumlah orang tersebut, dengan ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki, berinisiatif untuk budidaya jamur merang sendiri dengan modal sendiri dalam skala kecil (6 kumbung). Selanjutnya dalam mengembangkan usahanya, mereka mencoba untuk menghadirkan Dinas Pertanian Bantul dan anggota DPRD komisi B Bantul yang membawahi bidang pertanian.

DPRD komisi B Bantul memberikan penilaian bahwa gagasan usahatani jamur merang oleh beberapa warga Argorejo memiliki prospek yang baik ke depannya, baik dari sisi pendapatan maupun aspek pasarnya yang masih sangat terbuka luas. Selanjutnya anggota dewan dari komisi B memberikan masukan kepada dinas pertanian (atas nama pemerintah Kabupaten Bantul) agar mengusulkan anggaran pemberdayaan kelompok. Setelah mendapatkan bantuan 12 kumbung senilai Rp 40 juta pada tahun 2005/2006 usahatani jamur merang menjadi lebih besar (16 kumbung). Setelah mendapatkan penguatan modal melalui dana alokasi khusus (DAK) dari BIPP kabupaten Bantul pasca gempa pada tahun 2006 sebesar Rp 90 juta, rumah produksi tidak hanya di satu unit atau di satu tempat (di ketua kelompok) di dusun Polaman saja, tetapi juga didirikan cluster/unit, atau rumah produksi di dusun Senowo dan di dusun Semampir. Bahkan dengan melihat perkembangan produksi jamur merang yang ada di tahun 2008, dapat bantuan lagi dana dari Bank Indonesia DIY sebesar Rp 140 juta yang digunakan untuk membangun rumah produksi sebanyak 12 kumbung dan bantuan manajemen melalui kegiatan pendampingan. Cluster jamur merang tersebut berlokasi di Dusun Kepuhan. Halmana untuk pendampingan di lapangan, BI bekerja sama dengan perguruan tinggi (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Cluster Jamur Merang Kepuhan sudah mulai produksi sejak awal tahun 2009. Sehingga sampai awal tahun 2010 ini pemberdayaan masyarakat di Desa Argorejo yang diwadahi dalam kelompok tani jamur merang memiliki petani sejumlah 24 orang, yang terbagi dalam 4 cluster (Polaman, Senowo, Semampir dan Kepuhan), dengan jumlah kumbung sebanyak 70 buah. Rumah produksi di dusun Polaman ada 16 kumbung, Senowo ada ada 18 kumbung, Semampir ada 24 kumbung, dan Kepuhan ada 12 kumbung. Dipimpin oleh seorang ketua kelompok, dan masing masing cluster di pimpin oleh seorang koordinator cluster. Namun

karena kekurangan SDM petani, rumah produksi yang di dusun Senowo tidak bisa beroperasi.

Pemberdayaan masyarakat kelompok tani jamur merang di Argorejo memiliki sejumlah kegiatan, baik itu menyangkut budidaya jamur merang atau proses produksinya (mulai dari penyediaan media tanam, penanaman, pemeliharaan dan panen/petik), pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil, pengelolaan kelompok, maupun kerjasama (*relationship*) dengan pihak lain (terkait dengan ketersediaan bahan baku, penggalan sumber pembiayaan, bimbingan, maupun untuk pengembangan pasar).

Proses produksi atau budidaya jamur merang dimulai dengan *persiapan awal penyediaan media tanam*. *Pertama, perendaman bahan baku merang*. Merang dipilih yang baik (belum lapuk) direndam dalam bak perendaman selama 3 hari 3 malam, sehingga merang menjadi jenuh air. Untuk satu siklus, sebuah rumah produksi (kumbung) memerlukan bahan baku sekitar 10 meter kubik merang dalam keadaan basah, dan bahan aditif berupa 65 kg bekatul dan 36 kg kalsit. *Kedua, pembusukan media tanam*. Setelah direndam dalam bak perendaman (bak di semen berukuran 6 x 3 x 1,5 meter kubik), merang diangkat dan disusun secara berlapis-lapis di tempat yang telah dipersiapkan (lantai di semen, kerangka bambu, dinding terbuka dan beratap genting) dengan bahan aditifnya (lapisannya: lapisan merang-bahan aditif, di atasnya disusun merang-bahan aditif, dan seterusnya sampai habis semua bahan). Setelah 2 hari 2 malam, lapisan merang-bahan aditif tersebut dibalik, dengan menyusunnya kembali secara berlapis-lapis di tempat yang telah disediakan (disamping tumpukan pertama). Dan didiamkan selama 3 hari 3 malam. Apabila campuran bahan baku dan bahan aditif telah matang, maka bisa dimasukkan ke rumah produksi (ke dalam kumbung). Ciri bahan baku sudah matang adalah merang sudah membusuk, namun belum sampai lapuk. Jika belum matang, maka

dilakukan pembalikan kembali (pembalikan ke dua) dan didiamkan selama maksimal 2 hari 2 malam. Dengan demikian kegiatan penyediaan media tanam ini memerlukan waktu selama 10 hari 10 malam (perendaman bahan baku 3 hari 3 malam, dan proses pembusukan media tanam 7 hari 7 malam).

Kegiatan berikutnya *persiapan akhir penyediaan media tanam. Ketiga, pasteurisasi*. Media tanam yang sudah matang dimasukkan ke rumah produksi. Media tanam tersebut dihamparkan secara merata diatas rak-rak bambu yang sudah dibuat secara bertingkat dengan ketebalan lebih kurang 20 – 25 cm, kemudian diuapi. Petani menyebut tahap kedua ini sebagai *pasteurisasi*. Yakni suatu proses, dimana rumah produksi yang ber dinding, berplafon, dan berpintu plastik ditutup secara rapat, dan dimasukkan uap panas yang disalurkan melalui selang/pipa dari air yang dididihkan dalam tungku pemanas. Maksud dari proses ini agar terjadi proses sterilisasi, yakni agar media tanam bebas/ steril terutama dari bakteri-bakteri kompetitor jamur merang (bakteri kompetitor bisa mati). Pasteurisasi berlangsung hingga mencapai temperatur 60 derajat celcius, plus minus 2 (berarti temperatur berkisar antara 58 – 62 derajat celcius), dan dipertahankan temperatur tersebut selama 3 jam (dalam keadaan tungku tetap menyala). *Keempat, proses conditioning*. Setelah 3 jam dialiri uap panas, tungku dimatikan dan didiamkan, baru hari berikutnya proses *conditioning* dilakukan. *Conditioning* yang dimaksud adalah suatu proses pengkondisian dengan cara menurunkan temperature sedemikian rupa memiliki kondisi yang cocok bagi tumbuhnya / terbentuknya *bumikola* dan *actino*. *Bumikola* bentuknya seperti kasa, dan *actino* semacam bintik-bintik putih seperti tepung. Sehingga secara kasad mata terlihat seperti kasa yang ada bintik-bintik putih seperti tepung. Nantinya *bumikola* dan *action* ini merupakan makanan awal bagi *micelia* (benih jamur) sebelum jamur membentuk akar untuk menyerap sari makanan dari media tanam yang sudah jadi kompos.

Persiapan akhir penyediaan media tanam meliputi 3 hari, yakni hari pertama media tanam dihamparkan di rak-rak yang ada di dalam kumbung, hari kedua pasteurisasi, hari ketiga proses conditioning, dan pada hari keempat kumbung dibuka untuk kegiatan berikutnya.

Penanaman jamur merang. Kegiatan ini juga mencakup dua hal, yakni *sponing* dan *inkubasi*. *Sponing* adalah penaburan benih jamur merang di atas media tanam. *Sponing* dilakukan pada hari keempat (setelah proses conditioning), sambil membersihkan kondisi di dalam kumbung, sehingga betul-betul bersih dari tumbuhnya rumput, sisa-sisa media yang berserakan, peralatan yang tertinggal dalam kumbung, dan sebagainya yang tidak diperlukan dan dianggap mengganggu bagi pertumbuhan benih jamur secara optimal. Setelah *sponing* dan membersihkan semaksimal mungkin lingkungan di dalam kumbung, pintu ditutup rapat kembali. Kegiatan berikutnya adalah *inkubasi*. *Inkubasi* adalah suatu proses dimana benih jamur merang setelah ditabur diberi perlakuan/perlindungan khusus, bahwa situasi kumbung tertutup rapat, bahkan idealnya dalam ruangan diupayakan tidak ada seberkas cahaya yang masuk, harus gelap total, dan diupayakan tidak ada oksigen yang masuk. Kondisi yang gelap/tanpa cahaya dan *unaerob* (tanpa oksigen) merupakan lingkungan yang cocok bagi tumbuhnya micelia (kecambah). Masa *inkubasi* dilakukan selama empat hari (mulai hari ke lima hingga hari ke delapan). Hal ini agar proses perkecambahan bisa optimal.

Pemeliharaan jamur merang. Kegiatan ini pada prinsipnya mengupayakan jamur bisa tumbuh secara baik, hingga nantinya siap dipanen. Hari ke sembilan pintu kumbung mulai dibuka. Pada hari ke sembilan dan ke sepuluh sudah banyak micelia yang sudah tumbuh, dan Jika kondisi micelia sudah cukup kuat, maka lobang-lobang ventilasi sudah bisa mulai dibuka. Pada fase/masa pertumbuhan micelia ini, adalah masa *aerob* (butuh oksigen yang cukup). Apabila kondisi

permukaan media tanam nampak kering, perlu di siram. Dan pada hari ke sebelas sudah fase *pinning* , yakni fase mulai munculnya bakal buah kecil-kecil. Pada hari ke dua belas merupakan fase *pinhead*, yakni fase dimana sudah sudah jelas bentuk jamurnya, tetapi masih kecil-kecil (seperti jarum pentul, ada yang ujungnya sebesar kedelai atau bahkan sebesar jagung). Setelah hari ke tiga belas dan ke empat belas sudah mulai kotrol/pengecekan untuk mulai pemetikan. Apabila ada jamur yang sudah besar atau tua, sudah bisa mulai dipetik.

Panen jamur merang. Pemetikan jamur merang dilakukan mulai hari ke lima belas, enam belas dan hari ketujuh belas, dan ini disebut sebagai puncak panen. Hari ke delapan belas tidak dilakukan pemetikan (istirahat). Biasanya hari ini merupakan fase *pinning* yang kedua. Baru pada hari ke sembilan belas, ke dua puluh dan hari ke dua puluh satu dilakukan panen tahap kedua. Setelah itu hingga hari ke dua puluh empat, tinggal petik sisa-sisa jamur yang ada. Jika pada hari ke dua puluh empat masih potensial, maka pemetikan bisa sampai hari ke dua puluh enam. Baru setelah itu media tanam (kompos) dibongkar. Satu siklus proses produksi jamur merang kurang lebih memerlukan waktu antara 34 hari sampai 37 hari.

Permasalahan teknis selain proses produksi yang dipandang perlu diungkapkan adalah penyediaan bahan baku dan pemasaran hasil (produk jamur merang). Bahan baku merang merupakan hasil sampingan dari usahatani padi, tidak lain adalah tangkai malai padi. Biasanya petani memanen padi bisa dilakukan dengan cara dibabat pada pangkal rumpunnya dengan sabit, yang kemudian dirontokkan dengan alat *thresher* (alat perontok gabah). Cara ini tidak akan menghasilkan merang secara terpisah dari batang/rumpunnya. Sisa batang padi tersebut disebut jerami. Sedangkan cara lain, petani bisa menggunakan ani-ani atau alat pemotong lainnya (sabit) pada ujung batang/rumpun padi (pangkal tangkai malai padi).

Dengan cara ini merang akan terpisah dari jeraminya, dan bisa dimanfaatkan untuk bahan baku/media tanam jamur merang.

Kelompok tani jamur merang di Desa Argorejo bisa memperoleh merang dari hasil panen padi sawahnya sendiri, dan sebagian besar lainnya bisa diperoleh dengan membeli pada petani tetangganya di desa Argorejo, tetangga kecamatan, atau kadang dari luar kabupaten. Secara teknis kelompok bekerjasama dengan orang-orang yang menjalankan truk (sopir). Orang-orang yang menjalankan truk (baik itu truk milik sendiri ataupun bekerja pada orang lain) itu yang akan mencari merang sendiri ke petani-petani padi yang sedang panen. Kelompok tani membeli seharga antara Rp 270.000,- sampai Rp 300.000,- per truknya kepada sopir tersebut. Satu truk diperkirakan sekitar 800 kg jerami. Sementara satu kumbung memerlukan sekitar 1200 kg bahan baku merang. Sehingga rata-rata tiga truk bahan baku merang bisa untuk media tanam sebanyak dua kumbung.

Kelompok tani sering merasa kesulitan mencari bahan baku, karen hal ini terkait dengan musim panen padi. Jika ada merang dengan harga tinggi, akhirnya tidak jadi terbeli. Dengan demikian ada sejumlah kumbung yang tidak bisa produksi. Akibatnya adalah pemanfaatan SDM kurang maksimal. Juga berdampak pada perolehan pendapatan kelompok tani jamur merang di desa Argorejo.

Sedangkan teknis pemasarannya, kelompok tani biasanya didatangi pembeli ditempat. Baik oleh pedangang (jw:bakul) dalam satu desa tetangga desa, atau tetangga kecamatan, atau bahkan dari kabupaten lain dan ada yang dari luar DIY (Purworejo, dan Magelang). Dari segi pasar, petani mengaku masih terbuka luas, dan belum bisa melayani permintaan, terutama dari luar kabupaten ataupun dari luar DIY. Dari segi harga produk jamur merangpun kelompok tani merasa memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang baik. Dalam babarapa waktu saja, terjadi peningkatan harga jamur

merang yang cukup tajam. Di awal tahun 2007 satu kilogram jamur merang dihargai sebesar Rp 6.000,- per kilogram, kemudian di akhir tahun tersebut naik menjadi Rp 9.000,- per kilogramnya. Tahun berikutnya naik lagi menjadi Rp 12.000,- per kilogramnya dan di pertengahan tahun 2009 sudah menjadi Rp 15.000,- perkilogramnya hingga sekarang.

Kegiatan lain yang perlu diungkapkan adalah terkait dengan pengelolaan kelompok. Secara garis besar masalah pengadaan bahan baku, pemasaran hasil dan keuangan menjadi tanggung jawab ketua kelompok. Khusus Cluster Semampir, masalah pengadaan bahan baku merang, dan keuangan ditangani koordinator rumah produksi yang bersangkutan, sementara pemasaran (penetapan harga jual) produknya tetap dalam koordinasi ketua kelompok tani. Sedangkan masalah teknis budidaya diserahkan pada anggota, di bawah koordinasi masing-masing koordinator cluster di tiap dusun.

Kelompok tani jamur merang di Argorejo secara organisatoris memiliki struktur kelompok, terdiri dari: ketua kelompok, sekkretari, bendahara, koordinator cluster, dan anggota. Anggota yang bekerja sebagai tenaga teknis produksi (meliputi aktivitas budidaya, petik, dan perawatan rumah produksi, ataupun kegiatan lain yang terkait). Diupah sebagai layaknya tenaga kerja dalam pertanian lainnya. Koordinator cluster, mengkoordinasikan berbagai kegiatan teknis produksi masing-masing cluster juga digaji. Sekretaris dan bendahara relatif kurang berfungsi. Ketua kelompok yang mengkoordinasikan berbagai aktivitas terutama masalah keuangan, pengadaan bahan baku dan pemasaran juga mendapatkan *fee*. Pada akhir tahun, apabila nilai produksi jamur setelah dikurangi semua biaya (termasuk untuk upah dan gaji) masih ada sisa hasil usaha (SHU), maka dibagikan kepada seluruh anggota secara proporsional. Namun berdasarkan pengakuan dari semua anggota, ia belum pernah mendapatkan SHU tersebut. Dan ketua kelompok menyampaikan bahwa

tidak ada SHU yang bisa dibagikan, ketua kelompok membagikan kue pada semua anggota pada tiap hari lebaran iedul fitri.

Kerja sama (membangun *relationship*), juga menjadi tanggung jawab ketua kelompok, dan dalam pelaksanaannya pun juga dilakukan oleh ketua kelompok. Semenjak awal kegiatan usahatani jamur merang, ketua kelompok mendominasi hubungan keluar, terutama hubungannya dengan pemerintah (khususnya dinas pertanian dan DPRD Bantul, maupun yang lainnya). Sehingga hal-hal yang terkait dengan pencarian pendanaan dari Pemda dan dari BI Yogyakarta, seolah-olah yang tahu hanyalah ketua kelompok. Perlu diketahui bahwa jauh sebelum ia menjabat sebagai ketua kelompok tani jamur merang, ia sudah menjabat sebagai ketua Gapoktan (gabungan kelompok tani) di desa Argorejo. Sehingga ia memiliki akses dan kolega yang relatif luas dan banyak, baik dengan pemerintah daerah, dengan sesama petani, penyedia bahan baku, pedagang, dari berbagai daerah lain.

B. Pemaknaan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelompok tani jamur merang di desa Argorejo di mulai dari gagasan sekelompok petani yang ingin berusahatani jamur merang, yang direspon positif oleh anggota Dewan (DPRD) di Bantul maupun dan ditindaklanjuti oleh pemerintah (dinas pertanian) setempat, dengan pemberian sejumlah pendanaan yang dilakukan beberapa kali. Pemberdayaan masyarakat tidak dimulai dari kegiatan yang paling awal, yakni mulai dari pengenalan konsep pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Hal ini akan memberikan berbagai pemahaman yang bervariasi baik itu antara pemerintah dengan masyarakat, di antara lembaga pemerintahan itu sendiri (misalnya antara dinas, pihak kecamatan, dan pemerintahan desa), maupun pemahaman di antara masyarakat petani.

Pemaknaan pemberdayaan masyarakat secara konseptual diungkapkan oleh camat Sedayu, bahwa:

Pemberdayaan masyarakat pada intinya menggerakkan masyarakat dan memberi wacana kepada masyarakat agar dapat berpikir dari oleh dan untuk mereka; sehingga masyarakat akan berpikir untuk dirinya tentang masalah pengembangan dirinya, sekaligus masyarakat berpikir untuk pengembangan masyarakat umum di sekitarnya.

Ia menambahkan bahwa yang menjadi tumpuan dalam pemberdayaan masyarakat adalah agar masyarakat tersebut dapat memberdayakan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Barangkali dengan kalimat yang berbeda dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang menekankan dan memberi kesadaran pada masyarakat akan pentingnya ia mampu membangun dirinya sendiri agar lebih baik kehidupannya di masa depan.

Dikatakan oleh camat sedayu bahwa ada upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan, yakni:

Pertama, masyarakat diberi peluang dan waktu, dan kesempatan. *Kedua*, masyarakat diberikan *support* dari berbagai unsur dari wilayah setempat, baik itu dari masyarakat setempat, organisasi masyarakat, ataupun dari LSM dimana mereka dapat bekerja sama bahu membahu, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat tersebut dapat dipenuhi. *Ketiga*, ada bimbingan dari pemerintah, baik dari pemerintah desa, kecamatan, maupun kabupaten.

Melalui tiga upaya tersebut, maka pada akhirnya diharapkan masyarakat dan lembaga masyarakat (unsur-unsur

masyarakat lainnya) yang ada di wilayah setempat dan juga pemerintah sebagai fasilitator pembangunan akan menjadi satu kesatuan (*team work*) yang padu (sinergik). Sehingga roda pembangunan berjalan terarah sesuai dengan keinginan masyarakat dan program pemerintah.

Pandangan yang hampir mirip dan lebih praktis mengenai pemberdayaan masyarakat telah diungkapkan oleh pemerintah desa. Menurut kepala desa (kades) setempat bahwa:

Yang namanya pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat yang dalam kondisi tidak berdaya tetapi mampu (memiliki potensi), kita berdayakan. Sehingga mereka mandiri dengan berbagai macam kegiatan.

Selanjutnya ia memberikan contoh untuk memberikan gambaran yang membedakan antara pemberdayaan dengan pendekatan lainnya dalam pembangunan. Kades menekankan pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana agar masyarakat dapat berdaya betul, sehingga sekelompok masyarakat harus berembung, misalnya membentuk kelompok tani jamur merang. Kelompok tani jamur merang tersebut harus berpikir dari perencanaan, pelaksanaan sampai akhir, dan hal tersebut dilakukannya sendiri. Berangkat dari modal dan potensi yang dimilikinya sendiri, seperti kepemilikan lokasi/lahan, teknologi (teknik pembuatan rumah produksi jamur), dan sebagainya. Ia mencontohkan lain yang disebutnya bukan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat (atas dasar pengamatannya sebagai kepala desa) adalah program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Menurutnya proyek PNPM bukanlah kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti adanya seseorang yang bekerja di suatu hari, ia dapat upah. Kegiatan tersebut hanya disebutnya sebagai kegiatan "menyambung hidup" bukan mengupayakan agar orang berdaya betul.

Pemberdayaan masyarakat dikelola oleh masyarakat itu sendiri, sedangkan PNPM yang mengelola adalah BKM.

Pemahaman pemberdayaan masyarakat yang relatif praktis juga diungkapkan oleh kepala dinas pertanian di Bantul. Pemaknaan pemberdayaan masyarakat lebih didasarkan pada pengalaman-pengalaman lapang dalam melakukan pembinaan secara langsung kepada petani selama ini.

Pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan pertanian menempati posisi kunci. Pertanian merupakan subyek sekaligus objek, dan yang digarap adalah petani. Yakni petani yang kondisinya kekurangan *skill*, manajerial, modal, dan sebagainya. Ketika pemerintah akan melakukan pembangunan pertanian, otomatis melibatkan sasaran atau subyek (petani). Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah adalah pemberian peningkatan ketrampilan dan kemampuan manajerial mulai yang paling sederhana berupa penyuluhan, pelatihan-pelatihan, bahkan dilakukan dengan magang. Bahkan pemerintah (dinas pertanian Kabupaten Bantul) membimbing petani secara rutin dengan dikirim ke luar negeri (ke Jepang), sebanyak 2 orang dalam setahun.

Responden lain dari unsur pemerintah adalah kepala BIPP (Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian) Kabupaten Bantul. Ketika ditanyakan tentang substansi pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan pendekatan pembangunan yang lain, diungkapkannya bahwa:

Sekarang petani dianggap sebagai subyek bukan objek. Petani dipandang mampu melakukan usaha taninya sendiri tanpa harus diatur oleh pemerintah. Kebutuhan petani dikelola dan dipenuhi sendiri. Kita mempunyai

pandangan petani itu mampu baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Ketika ditanyakan terkait adanya perubahan paradigma pembangunan yang saat ini dengan pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada partisipasi masyarakat, maka sejauhmana hal ini berefek pada perencanaan penyuluhan pertanian di wilayah Bantul (di bawah kewenangan BIPP). Ia mengungkapkan bahwa:

Kalau dahulu penyuluhan dilakukan misalnya dengan menyuruh petani menanam komoditas tertentu, menggunakan jenis-jenis pupuk tertentu dalam jumlah yang tertentu pula, sekarang tidak berlaku. Pada dasarnya penyuluhan itu meminta petani merencanakan sendiri usahataniannya, dan apa-apa yang diperlukan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Sekarang penyuluh hanya sebagai mitra pendamping petani dan rencana itu benar-benar atas inisiatif petani. Kalau dahulu penyuluh membawa pesan dari pemerintah, tetapi sekarang tidak.

Semestinya pemerintah memiliki persepsi yang sama tentang pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pendekatan pembangunan. Baik itu pemahaman pada tataran konseptualnya maupun pemaknaan pemberdayaan masyarakat pada level praktisnya. Demikian juga persepsi yang sama dalam berbagai operasional kegiatannya yang ada di lapangan. Hal ini akan menjadi acuan masyarakat ataupun pihak-pihak lain yang berkompeten dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan.

Pemahaman pemberdayaan masyarakat pada level petani lebih bervariasi lagi. Hal ini karena petani mengaku tidak pernah mendapatkan informasi dari sumber yang jelas

selama ini. Pemaknaan pemberdayaan masyarakat yang ia fahami lebih merupakan hasil pikir sesuai dengan *field of experience* –nya masing-masing.

Berdasarkan *interview* dengan seorang ketua kelompok tani jamur merang di Argorejo, peneliti tidak dengan mudah mendapatkan jawabannya. Peneliti merunutnya (semacam membuat jembatan keledai) dengan sejumlah pertanyaan mulai dari pemahamannya tentang pembangunan dan pembangunan pertanian. Akhirnya ia bisa mengungkapkan pemahamannya tentang pemberdayaan masyarakat.

Ketika ditanya tentang pemberdayaan masyarakat, ia tidak bisa menjawab. Demikian halnya ia tidak bisa menjawab dengan tegas apa itu pembangunan.

Ia memberi penjelasan bahwa pembangunan itu memiliki arti yang luas. Bisa secara fisik, bisa membangun SDM, ataupun membangun teknologinya. Ketika ditanya tentang apa arti pembangunan, ia menjawab bahwa pembangunan fisik seperti dilakukan sehabis gempa. Pembangunan SDM misalnya yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Ketika ditanya apakah pembangunan itu perbaikan, ia menjawab bahwa ”membangun menurut saya memberi spirit. Kalau fisik sifatnya membuat, kalau membangun SDM itu berarti menciptakan kegiatan.

Ketika ditanyakan tentang pembangunan pertanian, ia menjawab bahwa itu hal yang berbeda lagi. Pembangunan pertanian berarti produksi. Dalam berproduksi perlu dilihat dari kualitas atau keanekaragaman komoditasnya. Ia menegaskan bahwa pengertian substansi membangun adalah *menciptakan* atau *memberi spirit*. Dan meningkatkan produksi itu termasuk dalam *menciptakan*. *Ia mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat itu merupakan pembangunan dari sisi SDM-nya.*

Berbeda lagi hasil *interview* dengan koordinator rumah produksi/cluster Polaman, yang merasa tidak tahu menahu tentang apa itu pemberdayaan masyarakat. Berbagai

pertanyaan peneliti lakukan untuk menjembatani responden untuk memahami makna pemberdayaan masyarakat. Ketika ditanyakan apa itu pemberdayaan masyarakat, dijawabnya tidak tahu. Apakah pernah mendengar istilah pemberdayaan masyarakat, ia jawab belum pernah dengar. Ketika peneliti menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan dan pembangunan pertanian, ia pun juga menjawab tidak tahu. Ia katakan, bahwa yang ia tahu berkaitan dengan jamur merang. Ketika ditanyakan apa yang dimaksud pembangunan pertanian terkait dengan jamur merang, ia menjawabnya:

Pembangunan khususnya di jamur merang sepengetahuan saya adalah membuat kumbang-kumbang, merawat atau memperbaiki kumbang-kumbang yang rusak, dan selain itu tidak ada lagi.

Selanjutnya ketika ditanyakan kembali tentang apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat, ia mengaku tidak tahu dan tidak pernah dengar, kemudian ia melanjutkan berdasarkan pemikirannya sendiri:

Pemberdayaan itu ya memberdayakan masyarakat supaya bisa ikut bekerja. Sesudah bekerja, mendapat imbalan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tangga.

Terlihat bahwa pemahaman petani tentang makna pemberdayaan masyarakat sangatlah terbatas, walaupun sudah dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan pembantu sebelumnya. Ia mengaku belum pernah mendapatkan penjelasan dari manapun tentang istilah pemberdayaan masyarakat, baik itu dari petugas penyuluh lapangan (PPL), pemerintah desa, ataupun dari kecamatan, apalagi penjelasan dari dinas pertanian dari kabupaten. Bahkan mendengar istilah pemberdayaan masyarakat dari sesama petanipun, ia merasa belum pernah.

Pemahaman yang lebih baik tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat didapatkan dari seorang responden yang kebetulan sebagai koordinator rumah produksi jamur merang dusun Kepuhan (cluster Kepuhan). Responden ini mengaku sudah sejak lama mendengar istilah pembangunan, baru kemudian istilah pemberdayaan masyarakat. Namun ia mengaku lupa ketika ditanyakan sejak kapan ia mengenal kedua istilah tersebut.

Ketika ditanyakan tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan (khususnya pertanian), ia menjelaskannya seperti berikut ini:

Menurut saya, pembangunan khususnya di bidang pertanian itu menyangkut kualitas, kuantitas maupun secara teknis. Kualitas itu tentang peningkatan hasil dari pertanian itu. Kuantitas itu misalnya, dengan lahan yang sedikit/sempit dapat menghasilkan produk yang banyak. Dan maksudnya teknis, misalnya pola tanam terdahulu hanya asal tanam dan nantinya bisa tumbuh; maka sekarang pola tanam perlu diatur dan jarak tanamnya juga diatur. Jadi, secara teknis intinya ada perbaikan pola budidayanya.

Responden ini juga bisa memberikan contoh-contoh kegiatan pemberdayaan pada umumnya, seperti adanya pemberdayaan kelompok tani lele, kelompok tani pisang dan kelompok usaha olahan baik dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Ia juga mengungkapkan contoh-contoh kegiatan pemberdayaan lainnya yang ada di Bantul, seperti kelompok pemberdayaan mengolah umbi garut menjadi emping, dan kelompok pemberdayaan mengolah bonggol pisang menjadi emping/criping bonggol pisang.

Selanjutnya, ketika ditanyakan sesungguhnya kegiatan pemberdayaan masyarakat itu menjadi tanggung jawab siapa, lebih kurang ia menjawabnya sebagai berikut:

Kalau saya orang awam pak, mungkin lebih cenderung sebagai pengikut pada orang yang mengetahui bidang tertentu. Yang bisa menggerakkan misalnya kepala desa dan perangkatnya, atau juga ketua-ketua kelompok yang bisa melobi kelompok lain untuk mengembangkan kelompoknya, dan yang lainnya. Kira-kira semacam itu. Kalau kepala desa itu jalur pemerintah, kalau ketua-ketua kelompok merupakan jalur swasta atau swadaya masyarakat itu sendiri.

Responden memiliki pemahaman bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang-orang atau kelompok masyarakat. Dan juga bagi mereka yang memiliki posisi tertentu di masyarakat.

Pemahamannya tentang pemberdayaan masyarakat, sekali lagi tidak ia dapatkan dari penjelasan secara terprogram dari pemerintah desa, kecamatan, ataupun dinas kabupaten. Pemahamannya tentang pemberdayaan masyarakat lebih ia dapatkan dari pemikirannya dengan memanggil kembali memori yang ada padanya, dari *field of experience* yang selama ini ia miliki. Diantaranya didasarkan pada pengalamannya dari media massa (TV, radio, koran) ataupun pergaulannya sesama teman selama ini (sebelum bergabung dalam kelompok tani jamur merang di desa Argorejo).

Responden berikutnya adalah anggota kelompok tani jamur merang yang bekerja sebagai tenaga petik/panen. Tenaga petik jamur sifatnya khusus, karena kegiatan petik dilakukan di waktu malam (mulai jam 02.00 pagi). Anggota kelompok lain jarang yang mau menjadi tenaga petik jamur.

Walaupun ia sudah bekerja sebagai tenaga petik, iapun juga bekerja untuk berbagai kegiatan lainnya dalam proses produksi jamur merang.

Responden ini mengaku sering mendengar istilah pembangunan dan ia juga mengaku pernah mendengar istilah pemberdayaan masyarakat. Namun ia merasa belum memahami dengan istilah-istilah tersebut. Ketika ditanyakan apa itu pembangunan, langsung saja ia menjawab:

Pembangunan itu tergantung dengan apa yang mau dibangun. Kalau mau membangun jalan, ya kita musyawarah mengenai jalan. Kalau mau membangun perilaku ya rohani kita yang diperhatikan.

Seperti yang lainnya, responden ini tidak memiliki pemahaman dasar dari istilah pembangunan. Penjelasan tentang pembangunan ia kaitkan dengan objek/bidang tertentu dari pembangunan. Jawaban yang agak membingungkan ketika ditanya tentang apa itu pemberdayaan masyarakat. Ia justru menanyakan contoh dari pemberdayaan masyarakat agar bisa menjawabnya. Ketika peneliti memberikan gambaran bahwa sekarang ini banyak program-program pemberdayaan masyarakat, ia menjawab "*menurut saya itu upaya menambah pola-pola kehidupan kita*". Ia memandang bahwa program-program yang dilakukan pemerintah hanyalah memberi variasi kegiatan dalam mencari kehidupan ini.

Responden berikutnya bernama Martoyo, ia salah satu anggota kelompok di rumah produksi dusun Kepuhan (cluster Kepuhan). Responden ini sama sekali tidak tahu menahu tentang makna pembangunan ataupun pemberdayaan masyarakat. Berbagai pertanyaan pembantu di sampaikan, nampaknya tidak bisa membawa ia untuk memahami apa itu pembangunan. Ketika ditanyakan apakah ia pernah dengar istilah pembangunan, dari non verbal yang ia tampilkan ia

nampak ragu dan terkesan bertanya dan menjawab secara verbal "saya tidak begitu paham pak". Ketika ditanyakan pekerjaan yang ia lakukan itu bagian dari pembangunan atau tidak, ia menjawab "saya nggak tahu pak, saya disini cuma kerja selesai/sore pulang". Ketika peneliti menempelkan istilah-istilah/ideom lain yang barangkali lebih familier yang ada kaitannya dengan pembangunan, seperti membangun rumah (jawa: mbangun wismo), secara verbal ia tidak berkata apa-apa dan non verbalnya menunjukkan tidak mau berpikir. Ketika dilanjutkan dengan pertanyaan apa yang terpikir atau yang diketahui dengan istilah pembangunan pertanian, ia menjawab "saya nggak pernah ke sawah, jadi nggak tahu".

Saat penelitian dilakukan ia mengaku baru sebulan bergabung di jamur merang. Sebelumnya, selepas SMA ia ikut kakanya bekerja jual pecel lele. Ia masih sangat muda dari sisi umur maupun pengalaman. Dan tidak memiliki latar belakang kehidupan pertanian. Sehingga ketika ditanyakan tentang pemberdayaan masyarakat lebih tidak tahu lagi, walaupun sudah diberikan sejumlah pertanyaan untuk membantu dalam memahami istilah pemberdayaan masyarakat.

C. Proses Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat tani yang terjadi pada kelompok tani jamur merang adalah berbagai proses komunikasi dalam berbagai kegiatan kelompok tani, baik itu menyangkut teknis produksi, teknis pengadaan bahan baku dan pemasaran produk, pengelolaan kelompok, maupun membangun kerjasama dengan berbagai pihak.

Proses komunikasi yang terjadi pada kelompok tani jamur merang terkesan "komunikasi seperlunya". Jarang agenda-agenda yang sifatnya formal dilakukan kelompok. Berbagai permasalahan yang ada di tangani secara langsung di lapangan, yakni ketika kegiatan berjalan. Barangkali hal ini

relatif mudah dilakukan, karena disamping jumlah anggota yang relatif tidak terlalu besar (hanya 24 orang), juga hampir sebagian besar waktu anggota dihabiskan untuk kegiatan yang ada (proses produksi). Hal ini mengingatkan bahwa usahatani jamur merang memiliki intensitas kerja yang sangat tinggi. Hampir tidak ada masa senggang atau waktu luang selama satu siklus proses produksi. Jam kerja formal mulai jam 08.00 sampai jam 16.00 WIB. Dan istirahat satu jam, antara jam 12.00 – 13.00 WIB. Sementara jam petik mulai jam 02.00 sampai jam 06.00 WIB. Dan siklus produksi ini saling menyambung. Dengan demikian berbagai persoalan di lapangan bisa langsung di atasi ditempat secara *face to face communication*.

Pertemuan formal secara sederhana dilakukan tiap minggu sekali, yakni pada hari sabtu.. terkadang sabtu pagi (sebelum istirahat), maupun sabtu siang (setelah istirahat). Agenda utamanya, pemberian upah/gaji kepada anggota. Apabila ada hal-hal atau persoalan bisa disampaikan pada forum ini. Bisa antara anggota dengan koordinator, maupun dengan ketua kelompok. Demikian juga sebaliknya suatu pesan atau permasalahan bisa disampaikan dari ketua kelompok kepada koordinator maupun kepada anggota.

Proses komunikasi dalam kelompok tani lebih merupakan *high context communication* atau komunikasi kontek tinggi. Ini merupakan tipe komunikasi kebanyakan untuk budaya orang jawa. Ada rasa "ewuh pakewuh", makna atau *meaning* pesan yang sesungguhnya seringkali tidak muncul dalam bentuk verbal atau bahkan non verbal. Pesan non verbal (misalnya: diam, agak acuh) sering dimaknai sebagai hal yang biasa bagi ketua kelompok kepada anggotanya. Ketua kelompok lebih cenderung memandang bahwa tidak ada masalah selama hal itu tidak disampaikan secara verbal kepada dirinya. Selain di dunia kerja, setiap diri kita memiliki banyak urusan, baik pribadi, keluarga, bertetangga, atau yang lainnya. Aktivitas ketua kelompok sangat padat, disamping sebagai

mengurusi jamur merang dan sebagai ketua gapoktan yang punya banyak kegiatan, ia juga mengembangkan berbagai usaha di bidang pertanian, sebagai penangkar berbagai varietas bibit padi, pengembangan bibit pisang, pembuatan pupuk organik, penembangan produk hortikultura dan sayuran organik, dan sebagainya. Sehingga dianggap kurang penting atau bahkan kurang terpikir memperhatikan sesuatu atau hal-hal yang kurang atau tidak jelas, dan jangan-jangan justru menjadi pemikiran yang negatif atau bujuk sangka.

Di sisi lain bagi anggota kelompok juga tidak ingin terlalu banyak menuntut, lebih banyak "narimo ing pandum" atau bersyukur dengan apa yang didapat, walaupun terkadang ada perasaan ingin mendapatkan lebih dari jerih payahnya. Ia merasa bersyukur diajak bergabung, sehingga sampai kelompok mendapatkan bantuan dana tidak sedikit dari sejumlah pihak. Disamping itu mereka merasa masih mempunyai sumber pandangan lain untuk mendukung kebutuhan keluarganya. Baik itu menggarap sawah, usaha ternak unggas yang tidak seberapa, tanaman pekarangan, ternak kambing, jualan jamu tradisional (penjaga outlet). Ada juga yang istrinya ikut kerja di sawah (buruh tani), jualan sayur keliling, dan sebagainya.

Proses komunikasi intrapersonal nampak mendominasi pemikiran para individu anggota kelompok untuk menjadi pribadi yang lebih baik (ala mereka), sehingga ia bisa menyeimbangkan tata hubungan dengan dirinya sendiri, dengan anggota keluarga, dengan tetangga, dengan yang lainnya termasuk terutama dengan lingkungan kerjanya di usahatani jamur merang pada level kehidupannya yang demikian tersebut.

Barangkali proses komunikasi intrapersonal yang demikian merupakan perpaduan dari berbagai kondisi yang merasa kurang mampu dari sisi ekonomi, status sosial yang relatif kurang, sikap *narimo*, merasa cukup, kurang berorientasi ke masa depan, *need of achievement* yang kurang dan barangkali "sudah dikehendaki oleh yang Maha Kuasa".

Sementara ketua kelompok dipandang memiliki posisi yang jauh lebih kuat, baik dari sisi status ekonomi, status sosial, akses hubungan keluar yang luas, lebih "pintar", kosmopolit, dan kemampuan berpikir yang jauh lebih baik dari anggotanya. Bahkan tanpa dirinya (diri anggota) pun sebenarnya sosok pribadi seorang ketua kelompok tersebut bisa menjalankan/mengelola proses produksi jamur merang. Bahkan ada kesan "anggota lebih tepat disebut hanya sebagai tenaga kerja" saja.

Perbedaan karakteristik yang sedemikian berbeda antara ketua kelompok di satu sisi dan anggota di sisi lain, menyebabkan anggota sudah bisa menerima dengan ia bekerja dan mendapat upah dari hasil kerjanya. Anggota nampak tidak memiliki daya untuk menanggung resiko seandainya ada kerugian dalam usaha. Anggota hanya berkontribusi dalam proses produksi saja. Anggota tidak merasa memiliki bahwa usahatani jamur merang tersebut adalah milik kelompok, bukan milik pribadi ketua kelompok. Dengan demikian proses komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok yang terjadi, berada pada keseimbangan yang demikian keadaannya. Anggota kurang bisa mengusulkan bagaimana seharusnya proses produksi dikelola, bagaimana mestinya memasarkan.

Terutama sekali yang menjadi masalah yang paling *urgent* adalah terkait dengan bahan baku. Dan ini nampaknya masalah utama dalam kelompok tersebut. Seringkali dikatakan bahwa kurang bahan baku, sehingga semua kumbang tidak bisa produksi semuanya. Tidak ada kejelasan yang sesungguhnya, apakah masalah bahan baku yang kesediaannya terbatas di lapangan, atau mungkin karena harganya lebih tinggi sehingga tidak terjangkau. Atau karena persoalan keuangan kelompok yang tidak cukup untuk membeli bahan baku, anggota juga tidak tahu bagaimana kondisi keuangan kelompok, atau persoalan lain. "Seakan" anggota tidak perlu tahu hal itu. Hal ini anggota akhirnya tidak bisa bekerja secara maksimal. Hanya bekerja pada sebagian kumbang saja. Hal ini mengakibatkan

produksinya kurang, sehingga upah yang anggota terima juga kurang. Diakhir tahun pun akhirnya tidak ada SHU yang bisa di berikan pada anggota. Anggota kurang bisa berani menuntut kenaikan upah, anggota tidak tahu apa yang menjadi hak-haknya. anggota kurang bisa menuntut keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Anggota yang tidak bisa menerima upah yang ada bisa keluar dengan kehendak anggota tersebut.

Barangkali karena manajemennya yang tertumpu pada ketua kelompok. Hal ini bisa terjadi karena tidak mau atau kurang mampu anggota menanggung/ mengambil tanggung jawab, atau karena kurang ingin bagi ketua mendelegasikannya pada anggota yang lain. Hal ini terkait dengan prosedur yang "barangkali rumit" terkait proyek-proyek yang pendanaannya dari pemerintah (pemda dan BI). Disisi lain lebih mudah bagi pemberi dana dalam pengawasannya dan pengaturannya, apabila hanya diserahkan pengelolaannya pada salah satu orang (ketua kelompok) saja. Sementara ketua kelompok memiliki berbagai aktivitas yang sangat banyak terkait dengan berbagai posisinya di masyarakat. Dengan demikian ia kurang bisa mengelola secara maksimal di usahatani jamur merang.

Dalam komunikasi kelompok, tidak ditemukan adanya komunikasi interaktif apalagi komunikasi transaksional yang mendiskusikan tentang bagaimana cara mengatasi masalah bahan baku. Komunikasi yang terjadi hanyalah komunikasi linear dari anggota atau koordinator cluster kepada ketua kelompok agar disediakan bahan baku sesuai yang dikehendaki. Selanjutnya adalah komunikasi yang linear dari ketua kepada anggota bahwa *tidak ada bahan baku* sesuai dengan waktu yang diminta oleh koordinator kluster.

Tidak ada "keberanian" atau "enggan" dan rasa kurang enak dari anggota atau kordinator cluster untuk mengajak diskusi bagaimana permasalahan yang sesungguhnya dan kemungkinan pemecahannya. Demikian juga tidak ada

keinginan dari ketua kelompok untuk melibatkan koordinator cluster untuk memikirkan masalah bahan baku tersebut.

Komunikasi interaktif yang rutin terjadi adalah mengenai jumlah produksi, nilai produksi (nilai uangnya) yang harus disampaikan laporannya (laporan mingguan) dari koordinator cluster kepada ketua kelompok. Proses komunikasi terkait dengan upah anggota, lebih bersifat linear. Tentang upah yang harus diterima oleh masing-masing anggota, koordinator sifatnya menyampaikan apa yang diputuskan oleh ketua kelompok. Bisa disimpulkan bahwa proses komunikasi yang terkait dengan pengadaan bahan baku, dan pengelolaan kelompok merupakan proses yang linear. Proses komunikasi yang terkait dengan teknis produksi, merupakan komunikasi linear antara koordinator cluster yang dipandang menguasai permasalahan terhadap anggotanya. Proses komunikasi dalam pemasaran merupakan proses yang interaktif dan transaksional. Kelompok tani jamur memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang relatif baik, terkait dengan permintaan pasar yang terus naik. Sementara produsen jamur merang sangat terbatas.

Proses komunikasi interaktif dan transaksional, juga dilakukan dalam menjalin kerjasama kepada pihak luar. Misalnya dengan pihak DPRD Bantul, dengan Dinas Pertanian Bantul, maupun pihak Bank Indonesia. Kelompok bisa meyakinkan pada pihak-pihak pemerintah, sehingga kelompok taninya layak mendapatkan bantuan pendanaan.

Justru nampaknya yang menjadi masalah mendasar adalah terkait bagaimana ketua mampu memberdayakan teman-teman anggotanya sehingga memiliki keadaan yang jauh lebih maju, baik aspek ekonomi, sosial, maupun kemandiriannya, sehingga pemberdayaan bisa berkembang. Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah dan pihak pemberi dana lainnya, sehingga sesuai tujuan yang sebenarnya.

D. Keberhasilan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Setiap individu manusia tentu saja ingin berhasil dalam hidupnya. Bagaimana gambaran anggota kelompok tani jamur merang mendeskripsikan keberhasilannya dapat dipaparkan sebagai berikut ini. Tiap individu memiliki konsep keberhasilan tertentu yang bervariasi antara satu dengan yang lain. Bahkan dalam memahami keberhasilan itu sendiri bisa beragam. Sekali lagi bahwa *field of experience* akan mempengaruhi seorang petani di dalam mengkonstruksi makna keberhasilan hidup yang ia jalani. Namun semua berangkat dari hal yang sama, bahwa ia memulai usahanya untuk mencapai keberhasilannya selalu diawali dengan mimpi-mimpi dan harapan tentang masa depan. Dalam hal bermimpi ada petani yang sangat berani bermimpi dan ada pula yang membatasi mimpinya, dan hidup mengalir sebagaimana apa adanya.

Ada sejumlah sejumlah tata nilai yang nampaknya menjadi pemahaman bersama. Dan ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya, yakni nilai tentang "kerja keras". Karena mereka meyakini bahwa dalam usahatani jamur merang diperlukan "semangat dan perjuangan yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh ketua kelompok berikut ini:

Tidak ada petani jamur yang tidak *kerja keras*. Saya tidak bisa meremehkan teman-teman semua (anggota kelompok) dan saya melihat sendiri, bagaimana mereka bekerja. Mulai dari tahap awal, merendam, membalik-balik bahan baku dan seterusnya sampai petik di tengah malam. Kalau tidak ada *semangat tinggi* dan *perjuangan tinggi*, mereka tidak akan melakukannya.

Padahal ditengah-tengah kerja kerasnya tersebut ushatani jamur mereka juga belum tentu berhasil. Artinya ia bisa saja masih tetap rugi/gagal usahanya walalupun mereka sudah kerja keras. Ketika ditanyakan, berarti bapak (selaku

ketua kelompok) bekerja lebih keras lagi ya (dari pada anggotanya) agar usahatani jamur merang ini bisa berjalan seperti yang diharapkan, ia menjawab bahwa:

Saya merasa perjuangan kami cukup besar. Karena saya membawahi sekitar 23 anggota. Misalkan sampai kami tidak produksi, imbas yang dirasakan bukan hanya pada diri saya, tetapi dirasakan pada semua anggota kami dan keluarga (kurang lebih sekitar 100 orang).

Hal tersebut belum termasuk dengan bagaimana nasib para pedagang, driver/pemasok bahan baku (dan keluarganya) yang bisa memberi penghidupan baginya. Nilai lain yang nampaknya dipegang kuat oleh ketua kelompok dalam menjalankan pengelolaan usahatani jamur merang bahwa ia sangat memperhatikan *kenyamanan kerja kelompok (team work)* anggotanya. Hal ini terlihat sekali ketika ditanyakan perihal kemungkinan mengambil atau menambah tenaga kerja, mengingat bahwa tenaga kerja petik hanya satu orang dan ini adalah pekerjaan yang berat (dilakukan di malam hari), sementara tenaga tersebut juga masih bekerja di siang hari terkait dengan proses produksi jamur merang. Ketua kelompok menjawab sebagai berikut:

Kalau saya tergantung dengan orang yang saya bertanggung jawab (misalnya tenaga petik). Kalau ia ingin menambah tenaga saya persilahkan. Tetapi dari pemikiran saya sendiri selaku manajer, jika ada suatu (pos) pekerjaan (petik) dan orang yang bertanggung jawab disitu tidak sepakat, malah nantinya bisa jadi kendala. Juga pada pekerjaan lainnya, seperti jika ingin menambah tenaga perawatan jamur, maka kami (ketua) harus diskusi dengan koordinator cluster yang karena dialah yang nantinya harus mengatur.

Lebih lanjut terkait dengan nilai-nilai kelompok yang mendukung keberlangsungan pemberdayaan masyarakat tani jamur merang di Argorejo, menurut ketua kelompoknya adalah tentang kesadaran bersama tentang tanggung jawabnya masing-masing. Bahwa masing-masing individu memiliki tugasnya masing-masing dan ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini harus menjadi kesadaran bersama mereka. Seperti ketua kelompok ungkapkan berikut ini:

Saya sudah sering pertemuan dan mengutarakan bahwa kita bekerja pada bagian masing-masing. Dan saya pribadi tidak fokus pada budidaya atau pemeliharaan, tapi saya fokus yang sifatnya manajerial, informasi, tanggung jawab keseluruhan, dan lain-lain.

Ada kesadaran bersama akan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap. Hal ini menjadi kesadaran semua orang dalam kelompok pemberdayaan sebagai *team work* yang saling terkait (*sinergi*). Keteledoran seseorang dalam melakukan pekerjaan akan berpengaruh negatif pada pekerjaan lainnya. Seperti yang ia katakan bahwa ia tidak mungkin fokus pada budidaya, karena pekerjaan tersebut sudah ia delegasikan pada koordinator cluster. Tetapi ia merasa berat tanggung jawab menegur kesalahan (termasuk kekeliruan dalam budidaya) yang dilakukan bawahan dan memberi informasi apa saja yang diperlukan, dan tanggung jawab lainnya secara lebih makro.

Nilai lain yang dirasakan ada, dan tumbuh kuat dalam anggota kelompok tani jamur merang adalah *rasa tanggung jawab keluarga*. Ini juga nampaknya memberi warna bagi anggota sehingga ia sungguh-sungguh bekerja. Dikatakannya bahwa tuntutan ekonomi keluarga menjadi tanggung jawab kepala keluarga untuk memenuhinya. Hal ini mempengaruhi bagaimana etos kerja yang harus ia pegang dalam bekerja di

kelompok tani jamur merang. Anggota kelompok tani juga mengaku bekerja tambahan lainnya sesuai batas kemampuannya, baik usaha sampingan memelihara berbagai ternak, usahatani di pekarangannya, ataupun buruh tani, dan sebagainya. Disamping itu juga dibantu istrinya, yang juga harus bekerja di dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Seperti dikatakan ketua kelompok bahwa tuntutan ekonomi keluarga mengharuskan ia sungguh-sungguh bekerja agar mendapatkan hasil atau upah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Jika dicermati bahwa tidak mudah untuk mendapatkan orang untuk petik jamur. Mengingat pekerjaan ini cukup berat. Disamping dilakukan pada malam hari, juga tanpa penerangan. Penerangan yang digunakan sangat terbatas, hanya semata-mata agar sekedar bisa melihat jamur saat petik. Hal ini terkait dengan syarat tumbuh jamur yang memang kurang menyukai sinar atau cahaya. Disamping itu rumah produksi ada di beberapa dusun (tidak dalam satu *emplacement*). Di tengah malam harus naik motor dengan hawa yang sangat dingin. Dari seorang satu-satunya anggota inilah diperoleh nilai yang sangat mendasar yang harus ia pegang dalam hidupnya.

Dari anggota kelompok ini memiliki pemahaman bahwa pemberdayaan masyarakat akan berjalan baik dan nantinya berhasil kalau kita memiliki *kemampuan dan kemauan* dari setiap anggotanya. Kedua nilai ini harus ada dan berjalan secara seimbang, seperti yang ia katakan bahwa:

Semua berangkat dari *kemampuan dan kemauan*, seperti halnya dalam usahatani jamur merang ini. Walaupun kita mampu, tetapi kalau ngak mau atau ogah-ogahan, maka usahatani tidak akan bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Sebaliknya walaupun kita mau kalau tidak memiliki kemampuan juga akan susah berjalan. Jadi kemampuan dan kemauan harus seimbang.

Nampaknya benar prinsip ataupun nilai yang ia pegang. Seperti tenaga petik di usahatani jamur, walaupun orang lainnya ada yang mampu, tetapi ternyata tidak mau. Sebaliknya ada juga anggota kelompok lainnya yang mau, namun ternyata ia tidak memiliki kemampuan terkait dengan kondisi kesehatan fisiknya yang tidak memungkinkan bekerja di malam hari.

Nilai hidup lainnya yang bisa diperoleh dari anggota kelompok tersebut adalah *menyenangi atau mencintai pekerjaan*. Suatu usaha akan berhasil apabila kita menyukai pekerjaan, tidak setengah-setengah. Hal ini seperti yang ia tuturkan ketika ia ditanya apakah ia mau diberi kesempatan bantuan modal agar menjadi petani yang mandiri, dan ia jawab:

Kalau ada kesempatan saya mau, tetapi saya lebih senang bidang peternakan. Seperti dahulu saya pernah ikut pelatihan peternakan, walaupun saya tidak diberi modal saya beli sendiri ternak (kambing) dan kemudian bisa berkembang sampai sekarang.

Nampaknya menyukai pekerjaan menjadi hal penting bagi siapa saja untuk keberhasilan usaha. Bahwa kalau ada kesempatan untuk memilih dalam usaha, maka orang akan memilih pekerjaan yang ia sukai. Hal ini memunculkan nilai lain dalam diri anggota kelompok tersebut, yakni *bekerja sungguh-sungguh* (bekerja secara total). Seperti ketika peneliti menanyakan apakah usaha peternakannya akan lebih maju lagi ketika diberi bantuan modal (karena ia mempunyai kendala masalah modal), ia menjawab bahwa:

Insyallah, yang penting kita berusaha sungguh-sungguh dan berdoa (berupaya lahir batin). Kita tidak bisa menentukan (keberhasilan), kalau masalah rejeki (melalui usahatani ternak) kita hanya bisa berusaha semampunya, mudah-mudahan bisa lebih berkembang.

Rasa senang pada pekerjaan yang seseorang lakukan, memberi efek baginya untuk bekerja sungguh-sungguh, tidak hanya secara lahir (bekerja keras) tetapi juga secara batin (berdoa dan bertawakkal). Akhirnya hal ini akan melahirkan keberhasilan. Nilai-nilai lainnya juga diungkapkan bahwa keberhasilan pemberdayaan perlu *kejujuran, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan* yang diamanahkan pada kita.

Nikai penting lain dan diperlukan kelompok adalah *keterbukaan*. Ia mengaku terbuka dengan siapa saja untuk mendiskusikan berbagai hal khususnya menyangkut proses produksi jamur. Misalnya diskusi pengunduran pengentasan rendaman merang, jika dianggap belum matang. Keterbukaan yang baik ditemukan diantara anggota kelompok pemberdayaan jamur merang, seperti tenaga petik katakan bahwa "*kalau dengan teman kerja tidak ada hal-hal yang tidak terbuka*". Dengan keterbukaan, kita bisa kerja lebih nyaman. Bagaimana keterbukaannya dengan ketua kelompok, ia sampaikan bahwa:

Kami nggak bisa menilai soalnya pak Marjan (ketua kelompok jamur) orangnya diam. Kalau ada keluhan ditanggapi, tetapi pelaksanaannya kapan kita nggak tahu. Misalnya kekurangan alat blower (kipas untuk menghidupkan api dalam tungku untuk menghasilkan uap air panas) untuk mengatur suhu ruangan, kami mengusulkan tetapi pengadaannya kapan kita nggak tahu. Ketika ditanyakan lagi jawabannya "*nanti akan datang*", tetapi nantinya nggak tahu kapan lagi.

Jawaban yang tidak jelas menyebabkan anggota lebih berhati-hati untuk memberikan masukan-masukan ataupun usulan-usulan. Kehati-hatian tersebut seperti yang tergambar pada tenaga petik berikut ini:

Saya kalau usul (ke ketua kelompok) sudah saya pertimbangkan, bagi saya berat tidak dan bagi orang lain berat tidak, kalau tidak baru saya usulkan. Kalau memberatkan orang lain, saya lebih baik tidak usul. Apa yang ada kita jalani (sikapi) bersama (apa adanya).

Terkait dengan keterbukaan pengelolaan kelompok ini, sikap yang tegas dijawab oleh salah seorang anggota kelompok yang bekerja di rumah produksi Polaman (Pak Budi) bahwa "belum ada keterbukaan". Ketika peneliti konfirmasi pada koordinator rumah produksi Polaman di jawab hal yang serupa "sama" (belum ada keterbukaan). Jelas keterbukaan terbatas.

Keterbukaan ditemui di level operasional menyangkut proses produksi antara anggota dengan koordinator, dan antara ketua kelompok dengan koordinator menyangkut penentuan tingkat upah. Hal ini biasanya dikembalikan ke koordinator cluster untuk memutuskan, yang dikaitkan dengan kinerja anggota dan kemampuan kelompok untuk menggaji.

Usulan-usulan yang dibicarakan hanya berkisar teknis produksi, yang tidak perlu biaya. Seperti diungkapkan anggota yang bekerja sebagai tenaga petik ini:

Misalnya kegiatan kerja hari ini memasukkan merang ke bak perendaman, walaupun sudah waktunya di angkat untuk proses selanjutnya, bisa saya usulkan diundur pengangkatannya (tetap di bak perendaman satu atau dua hari lagi) sehingga dipandang sudah layak dientaskan. Sehingga merang lebih matang, dan hasilnya lebih bagus. Agar pekerjaan tahap berikutnya nantinya lebih ringan.

Misal tentang pengaturan pekerjaan yang menumpuk dalam satu hari, seperti pada hari yang sama ada pekerjaan perendaman, pembalikan bahan baku, dan pembongkaran

media tanam yang sudah tidak produktif. Hal ini bisa musyawarah dan ada sebagian pekerjaan yang dilakukan di lain hari sesuai prioritasnya, mengingat terbatasnya tenaga kerja.

Tidak memungkinkan bagi anggota kelompok atau koordinator cluster untuk mengusulkan kepada ketua kelompok, dan memusyawahkannya dan menemukan jalan keluar bersama terkait keterlambatan dan kurangnya bahan baku merangi. Dengan demikian efisiensi dan produktivitas kerja akan lebih baik. Hal ini nantinya bisa berdampak pada peningkatan pendapatan/ kesejahteraan anggota kelompok, dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat secara lebih luas lagi.

Nampak bahwa banyak nilai atau norma yang ada dan dimiliki secara individu maupun secara kolektif dalam kelompok. Namun tidak semua nilai baik yang dimiliki secara individu difahami dan jadi nilai kolektif dalam penerapannya.

Timbangnya keadaan, baik dari sisi ekonomi maupun status sosial antara ketua kelompok dengan anggota nampak menjadi satu satu kendala. Hal ini perlu dicari jalan keluarnya. Misalnya dengan penekanan peran ketua kelompok untuk memiliki tanggung jawab sosial yang lebih baik, agar kegiatan pemberdayaan dalam arti yang sebenarnya bisa terwujud. Demikian juga proses penyadaran akan kewajiban dan hak, sehingga akan terjadi pembagian tugas dan tanggung jawab beserta hak-haknya secara adil.

Fenomena ini perlu menjadi pemikiran bagi pihak-pihak yang berkompeten, bagaimana sebaiknya kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat seharusnya dibentuk. Apabila yang berdaya dalam suatu kelompok hanya satu orang (ketuanya saja), sangat mungkin yang terjadi bukan pemberdayaan, tetapi memberdayai anggota. Karena tidak ada *control* dan *balancing* yang baik dalam penyelenggaraan pemberdayaan.

Berdasarkan penelaahan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelompok tani jamur merang yang ada di Desa

Argorejo, Sedayu- Bantul, dapat diambil beberapa kesimpulan seperti yang diungkapkan berikut ini.

Realitas komunikasi pemberdayaan masyarakat yang ada di lapangan masih jauh dari harapan idealnya. Pendekatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat yang semestinya lebih menekankan partisipasi anggota masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan dan perencanaannya. Ternyata hal ini tidak terjadi di kelompok tani jamur merang. Musyawarah dan diskusi tidak terjadi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis (misal: dalam perencanaan bahan baku dan produksi). Musyawarah dan diskusi hanya terjadi pada kegiatan-kegiatan rutin atau kegiatan operasional dalam proses produksi (budidaya), yang tidak berimplikasi secara nyata pada kemajuan kelompok pemberdayaan secara keseluruhan.

Kegiatan strategis seperti perencanaan bahan baku dan produksi, serta pengelolaan keuangannya menjadi otoritas ketua kelompok. Dalam kegiatan tersebut, kalau terjadi proses komunikasi sifatnya linear, yakni koordinator cluster ataupun anggota tinggal menerima terhadap apa yang diputuskan ketua. Proses komunikasi baik secara transaksional maupun secara interaktif lebih banyak terjadi pada kegiatan-kegiatan rutin budidaya yang tidak strategis. Seperti musyawarah pada penundaan tanam, karena persiapan media tanam (merang) yang belum masak, dan sebagainya, yang kurang/tidak berdampak pada kemajuan kelompok pemberdayaan secara keseluruhan

Barangkali keadaan tersebut terjadi sudah keliru dari awalnya. Tidak dimulai dari yang paling awal yang harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni adanya sosialisasi tentang pemberdayaan itu sendiri serta maksud dan tujuannya kenapa pendekatan pembangunan dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat jelas dari hasil wawancara/telaah di lapangan bahwa sosialisasi awal tidak dilakukan sama sekali,

sehingga pemberdayaan masyarakat dipahami secara tidak benar. Tidak ada perubahan pola pikir terlebih dahulu sebelum kegiatan riil pemberdayaan dilakukan.

Orientasi kolektif pada keberhasilan kelompok pemberdayaan belum terbentuk, hal ini terlihat dari kurang mendukungnya aturan kelompok, tata nilai ataupun norma kelompok yang mengarah kesana. Sebenarnya secara potensial keberhasilan kelompok sangat mungkin dilakukan. Hal ini terlihat dari norma-norma pribadi/individual yang sudah berkembang, seperti nilai kerja keras, keterbukaan, motivasi (semangat dan perjuangan) yang tinggi, dan sebagainya.

Jelas bahwa kondisi yang demikian justru menunjukkan bahwa komunikasi pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk dikembangkan sebagai bahan kajian lebih lanjut, dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan yang menekankan pendekatan masyarakat pada era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik, dari Comte hingga Parsons*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ban, A.W. van den dan H.S. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Terjemahan Agnes Dwina Herdiasti. Yogyakarta: Kanisius.
- Beilharz, Peter. 2005. *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filsuf Terkemuka*, Terjemahan Sigit Jatmiko. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berlo, David K.1960. *The Process of Communication An Introduction To Theory and Practice*, Holt Rinehart and Winston Inc, USA.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Depari, E dan C.MacAndrews. 1998. *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- DeVito, Joseph A.1997. *Komunikasi Antar Manusia* (diterjemahkan oleh Agus Maulana), Edisi ke Lima, Professional Books, Jakarta.
- Dilla, Sumadi. 2007. *Komunikasi Pembangunan, Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Dominick, Joseph R. 1990. *The Dynamics of Mass Communication*, Third Edition, Mc Graw Hill, USA.
- Effendy, O.U. 1992. *Dinamika Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Effendy, O.U. 1995. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Eko, Sutoro.2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, Edisis ke-1*. Yogyakarta: APMD Press.
- Garna, Judistira, K. 2006. *Teori Sosial Pembangunan*. Primaco Akademika-Judistira Garna Foundation, Bandung.
- Griffin, EM 2006. *A First Look At Communication Theory, International Edition*. New York: McGraw-Hill.

- Hasansulama, HMI. 2005. *Petani dan Penyuluhan Pertanian, Manusia Cerdas*. Bandung: Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Edisi Revisi*. Bandung: Humaniora Utama.
- Infante, Dominic A; Andrew S. Rancer; Deanna F. Womack. 1993. *Building Communication Theory, Second Edition*. USA: Waveland Press Inc.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartasapoetra, A.G. 1994. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan yang Berakar Kerakyatan*. Jakarta: BPPN.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Korten, DC; Sjahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurnia, Ganjar. 2004. "Petani" Pejuang yang Terpinggirkan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sosiologi Petanian pada Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Bandung: UNPAD.
- Levis, Leta Rafael. 1996. *Komunikasi penyuluhan Pedesaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mardikanto, Totok. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

- Masyhuri HP. 1991. *Asas-Asas Komunikasi*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Mc Quail, Denis and Sven Windahl. 1981. *Communication Models*, Longman, New York, USA.
- McQuail, Denis and Sven Windahl, 1981. *Communication Models*. New York: Longman Inc .
- Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarimein. 1996. *Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Padmanagara, Salmon. 2004. *Penyuluhan Pertanian Alat Petani untuk Memperbaiki Sendiri Nasibnya*. Pidato Ilmiah pada Penerimaan Gelar Doktor Kehormatan (Dr.HC) dari Universitas Padjadjaran Bandung, 22 Desember 2004. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Penerbit, Team. 2003. *Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No 22, 25 dan 28 tahun 1999)*. Bandung: Citra Umbara.
- Ritzer, George; Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam*. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Kencana-Prenada Media.
- Prawirokusumo, Soeharto. 2001. *Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Strategi*. Yogyakarta: BPFE.
- Rogers, Everett M; F Floyd Shoemaker. 1971. *Communication of Innovations, A Cross-cultural Approach, Second Edition*. New York: The Free Press.
- Rogers, Everett M. 1976. *Komunikasi dan Pembangunan, Perspektif Kritis*. Terjemahan Dasmur Nurdin. Jakarta: LP3ES.

- Rogers, Everett M. 1983. *Diffusion of Innovations, Third Edition*. New York: The Free Press.
- Rogers, EM; F. Floyd Shoemaker. 1987. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, Disarikan oleh Abdillah Hanafi, Usaha Nasional, Surabaya.
- Ruben, Brent D. 1988. *Communication and Human Behavior*, Second Edition, Mac-Millan, New York.
- Shadily, Hasan; John M. Echold. 1984. *Kamus Bahasa Inggris – Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Shadily, Hasan; John M. Echold. 1994. *Kamus Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris*, Gramedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekartawi, 1988. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*, UI Press, Jakarta.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhardiyono, L. 1992. *Penyuluhan: Petunjuk Bagi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Suhendra, 2005. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI dan Bima Grafika.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi, Edisi Revisi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suparjan; Hempri S. 2003. *Pengembangan Masyarakat, dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.

- Syaukani; Afan Gaffar; Ryaas Rasyid. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tubb Stewart L and Sylvia Moss. 1994. *Human Communication, Seventh Edition*, Mc Graw Hill, USA.
- Usman, Sunyoto, 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Weber, Max. 2006. *Sosiologi*. Terjemahan Noorkholis dan Team Penrtjemah Promothea. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

INDEKS

Jurnalisme pembangunan (<i>journalism of development</i>)	: 78-79, 96
Komunikasi pembangunan (<i>development communication</i>)	: 75, 78, 80-82, 87, 92-94, 102, 104-105
Komunikasi pemberdayaan masyarakat	: 75, 102-103-106, 111, 145-146
Komunikasi pendukung pembangunan (<i>development support communication</i>)	: 78, 80, 97-99
Komunikasi pertanian	: 81
Modernisasi (<i>modernization</i>)	: 6- 9
Peliputan pembangunan (<i>development reporting</i>)	: 78-79, 95-96
Pembaharuan (<i>innovation</i>)	: 8
Pembangunan bangsa	: 9
Pembangunan nasional	: 9-10, 12, 37
Pembangunan masyarakat	: 23, 26-29, 34-36
Pembebasan (<i>liberation</i>)	: 8-9
Pemberdayaan masyarakat	: 35-40, 103-111, 115, 121-131, 137, 139-140, 145-146
Pembinaan	: 11
Pengembangan	: 10
Penyuluhan pertanian (<i>agricultural extension</i>)	: 81, 100-102
Periklanan pembangunan (<i>development advertising</i>)	: 78, 80, 99-100
Pertumbuhan (<i>growth</i>)	: 4-5
Perubahan social (<i>social change</i>)	: 7-9
Rekonstruksi (<i>rekonstruction</i>)	: 6
Wesernisasi (<i>westernization</i>)	: 7

